



LOBI PRABOWO MERAYU MEGAWATI

SAMBUTAN
LUAS UNTUK
SEKOLAH
RAKYAT

MEMPERBAIKI
MORAL
MEMBANGUN
EKONOMI
DESA

LANGKAH NEGOSIASI
INDONESIA HADAPI
KEBIJAKAN
TARIF TRUMP

SOAL
SEGITIGA
PRABOWO -
JOKOWI -
MEGA

PERJUANGKAN
PEMBANGUNAN
BENDUNGAN
TIGA DIHAJI
KE PRESIDEN

31 DUBES
BARU DAN
MISI ASTA
CITA



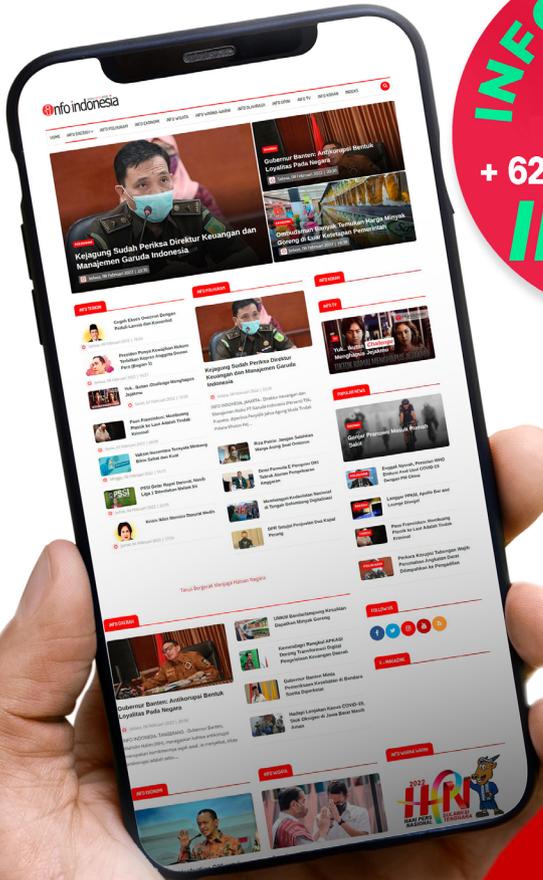


info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

Network

www.infoindonesia.id



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv



LAPOR MAS WAPRES

PENGADUAN:

LANGSUNG DATANG KE ISTANA WAPRES 📱
SENIN - JUMAT, JAM 08.00 - 14.00 WIB

KONTAK KE WHATSAPP 📱

08111 704 2207

ALAMAT 📍

ISTANA WAKIL PRESIDEN RI,
JLN. KEBON SIRIH No. 14, JAKARTA PUSAT

EDISI
BULAN
APRIL
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Belum 100 hari sejak gagasan pengembangan Sekolah Rakyat bergulir, sambutan datang dari berbagai daerah. Dari rencana uji coba di tiga tempat meningkat hingga 53 sekolah siap memulai kegiatan belajar-mengajar pada Juni 2025.



22

INFO SUMSEL

Upaya pemerataan pembangunan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur ini dilakukan agar pemerataan berjalan dan dirasakan hingga ke pelosok daerah.



32

INFO DAERAH

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan dana kompensasi kepada 1.322 sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor, sebesar Rp 1,5 juta. Bantuan tersebut terdiri dari Rp 1 juta dalam bentuk uang tunai dan Rp 500 ribu berupa paket sembako.



70

INFO NASIONAL

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kementerian Agama bekerja sama dalam menghadirkan program Pemberantasan Buta Huruf Al Quran dan Satu Desa Satu Majelis Taklim.



- ▼ Vietnam
- ▼ Thailand
- ▼ Tiongkok
- ▼ Indonesia
- ▼ Arabi
- ▼ India
- ▼ Korea
- ▼ Jepang
- ▼ Malaysia
- ▼ Kemari
- ▼ Itali
- ▼ Perancis
- ▼ Uni Emirat Arab
- ▼ Filipina
- ▼ Australia
- ▼ Brazil
- ▼ Meksiko
- ▼ Inggris
- ▼ Kanada
- ▼ Turki
- ▼ Arabi Saudi
- ▼ Singapura

58

INFO EKONOMI

Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan akan berdampak signifikan bagi perekonomian global. Begitu pun bagi kondisi dan kebijakan geopolitik sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia.



66

INFO ISTANA

Setelah lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komisi I DPR periode 2019-2024 pada pertengahan September 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk sejumlah negara.



87

INFO KHUSUS

Presiden Prabowo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan yang sudah lama menjadi spekulasi. Bagaimana pertemuan bisa terjadi?



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

50 INFO WISATA

54 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

78

INFO NASIONAL

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK masih menghantui sejumlah sektor industri di Tanah Air. Penyebabnya ketidakpastian ekonomi nasional. Makro ekonomi dalam negeri juga masih dalam volatile alias tak stabil.

TARIF

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menghebohkan dunia dengan menerapkan tarif impor barang dari semua negara, juga tarif timbal-balik (resiprokal) untuk kepentingan ekonomi dalam negerinya. Sedangkan Indonesia sudah mengantisipasi kebijakan tarif Trump itu.

Malah Presiden Prabowo pun menegaskan sudah mengantisipasi kebijakan Trump itu. Resep menghadapinya, menurut Presiden, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri agar tidak mudah terpengaruh oleh perubahan dalam geopolitik dan ekonomi global.

Bahwa suatu saat, kata Presiden, nobody is going to help us, tidak ada yang akan membantu kita kecuali kita sendiri. Setiap negara harus mengurus kepentingannya sendiri. Tak terkecuali AS.

Begitulah, AS ternyata kerepotan mengurus ekonomi dalam negerinya sendiri. Sebagai contoh sederhana, aneka produk garmen berbahan baku jeans bermerek Levi's sudah terkenal sebagai produk AS. Namun, harap diketahui tak ada lagi produksi Levi's di AS. Pabrik-pabrik, katakanlah industri garmen produsen Levi's sudah berada di luar AS karena standard upah pekerja di dalam negerinya akan membuat produk jeans ini lebih mahal. Termasuk bagi konsumen di dalam negeri AS sendiri.

Dalam konteks itu, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari), berswasembada, juga bukan soal mudah. Swasembada semua kebutuhan dalam negeri malah lebih sulit. Tiongkok dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, 1,4 miliar lebih warga tetap harus mengimpor banyak kebutuhan dalam negeri, termasuk keperluan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi, misalnya, negeri yang dulu dikenal dengan julukan Tirai Bambu itu harus mengimpornya terutama dari Brasil.

Untuk Indonesia, katakanlah jika berhasil swasembada beras pada tahun ini, toh tetap saja harus mengimpor produk pangan lainnya. Misalnya gula. Padahal di masa kolonial, Jawa justru menjadi produsen eksportir gula terbesar di dunia.

Indonesia juga merupakan produsen minyak mentah sawit, crude palm oil (CPO) terbesar di dunia. Pasar dengan daya serap terbesar antara lain Tiongkok dan India. Namun semua bisa berubah mengacu pada ungkapan tak ada yang pasti kecuali perubahan.

Selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar untuk produk semi-sarang burung walet. Sedangkan Tiongkok menjadi salah satu pasar terbesar jika bukan yang terbesar beriring dengan Hongkong dan Singapura. Belum lagi tuna sirip kuning. Belakangan Indonesia juga dikabarkan mengalami surplus produksi telur ayam. Tambahan pula produk tanaman herbal kratom yang berkhasiat untuk kesehatan.

Namun, untuk kebutuhan pangan lainnya, Indonesia masih banyak kekurangan. Termasuk madu murni hasil sarang lebah liar maupun budi daya. Indonesia masih harus mengimpor madu dari luar negeri. Jadi, berdikari sepenuhnya untuk semua kebutuhan dalam negeri memang sangat sulit.

Perekonomian AS juga bukan perkecualian sebagaimana contoh garmen bermerek Levi's tadi. Akhirnya memang lebih baik memilih kompromi dan negosiasi dalam menghadapi penerapan tarif Trump. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhri, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



SAMBUTAN LUAS UNTUK SEKOLAH RAKYAT

Belum 100 hari sejak gagasan pengembangan Sekolah Rakyat bergulir, sambutan datang dari berbagai daerah. Dari rencana uji coba di tiga tempat meningkat hingga 53 sekolah siap memulai kegiatan belajar-mengajar pada Juni 2025.

• INFO UTAMA

Usai mengikuti rapat terbatas tentang pemberdayaan masyarakat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 3 Januari 2025, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengemukakan ihwal Sekolah Rakyat ini. Menko Muhaimin mengatakan, Presiden ingin membuat Sekolah Rakyat, khusus untuk anak dari keluarga

akan berbentuk seperti sekolah asrama (boarding school) sehingga gizi siswa dapat terjamin. "Sebetulnya yang diutamakan boarding school-nya yang paling penting sehingga gizinya tertangani," kata Muhaimin.

Pak Menko menambahkan, program sekolah rakyat tersebut masih diuji coba di tiga titik di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). "Baru tiga titik dahulu. Jabodetabek," ujarnya.

menyelenggarakan Sekolah Rakyat.

"Kami melaporkan per hari ini sudah ada lebih dari 50 lokasi, 53 lokasi lah tepatnya, yang siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat ini. Namun demikian, data terus akan berkembang karena 2-3 hari ke depan kami akan koordinasi dengan gubernur, dengan bupati, wali kota, di mana persiapan-persiapan yang kami lakukan itu paralel," ujarnya dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat.



tidak mampu dan tergolong miskin ekstrem, di bawah kewenangan Kementerian Sosial.

"Presiden juga ingin membuat sekolah khusus untuk anak-anak yang tidak mampu, tetapi masih di bawah naungan orang tua dibina langsung khusus dalam sekolah rakyat," kata Menko Muhaimin.

la menjelaskan, Sekolah Rakyat ini

Namun, dari perkembangan lanjutan terungkap program Sekolah Rakyat justru bukan sekadar uji coba di sekitar Jabodetabek, melainkan segera meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025 di Istana Merdeka Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) melaporkan sudah 53 lokasi yang siap

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo meminta agar program ini terus dimatangkan dan bisa mencakup sebanyak mungkin daerah. "Pada prinsipnya Presiden meminta apa yang telah kami rencanakan itu terus dimatangkan, ditindaklanjuti, dan sebanyak mungkin daerah yang bisa berpartisipasi pada kesempatan pertama ini," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama,

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penerimaan siswa akan berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Prioritasnya adalah kelompok Desil 1 dan Desil 2, yang merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Ia juga menyebut bahwa dari 53 lokasi yang telah dipilih, sebagian besar berada di daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat



kurang mampu yang tinggi. "Jadi ini sudah sangat selaras dengan data-data yang ada di BPS," ucap Amalia.

Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelengkapan, termasuk ketersediaan asrama,

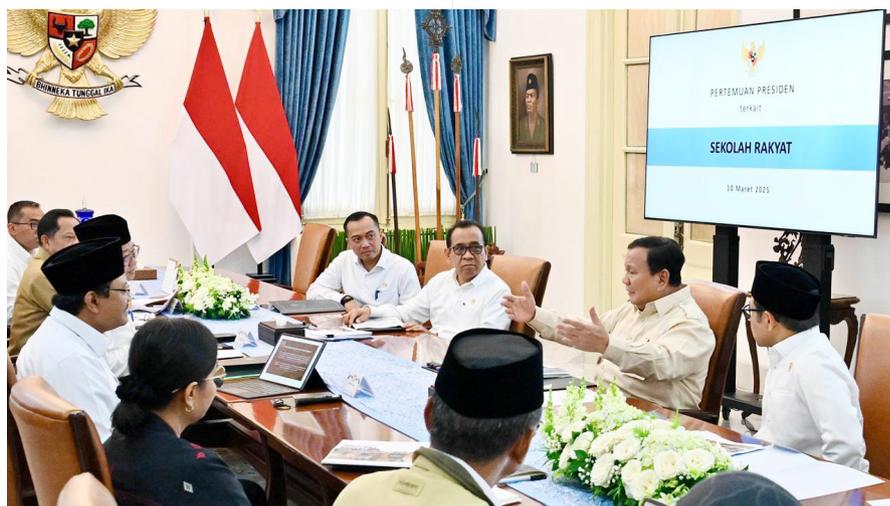
ruang kelas, tempat ibadah, kantin, hingga fasilitas olahraga.

"Ya makanya itu kita yang saya sebut 53 itu karena dianggap asramanya atau bangunannya sudah mencukupilah. Bangunannya sudah mencukupi, ada untuk sekolah, ada untuk asrama, ada untuk tempat ibadah, ada tempat untuk makan, ada tempat untuk olahraga, dan hal lain-lain yang dibutuhkan," jelasnya.

Lokasi sekolah rakyat juga tersebar di berbagai wilayah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, Kalimantan, dan Papua. Selain itu, dua pergu-

papun yang mampu. Ini bagian dari memulihkan keluarga miskin dan sekaligus mendorong agar kebangkitan wong cilik itu terjadi menuju Indonesia Emas tahun 2045 yang akan datang," kata Gus Ipul.

Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait sedang membahas aspek-aspek penting program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Gus Ipul juga menegaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumum-



ruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.

Pemerintah pun akan terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat. "Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat-kuatnya dan sebera-

kan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran. "Inshaallah dalam waktu 1-2 minggu yang akan datang mudah-mudahan sudah lebih jelas gambarnya," tutur Gus Ipul kala itu.

Nah, perkembangan berikutnya yang lebih jelas adalah terbentuknya Tim Formatour Sekolah Rakyat yang diketuai oleh Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 Prof Muhammad Nuh. Ia menegaskan,

• INFO UTAMA

kehadiran Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, melainkan justru melengkapi dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang belum bersekolah.

Menurut dia, pemetaan daerah dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak mengambil jatah sekolah lain, namun hadir di lokasi yang memang membutuhkan intervensi pendidikan. Jadi, salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat adalah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data

kan guna menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah. "Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus memperlancar distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan," jelas Robben.

Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah. "Kami ingin memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa

percepat pemerataan pendidikan di Indonesia.

Toh Sekolah Rakyat dalam naungan Kementerian Sosial sejauh ini belum akan lepas dari keterlibatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Misalnya untuk rekrutmen tenaga pengajar maupun penyusunan kurikulumnya.

Untuk tenaga pengajar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan kebutuhan 60 ribu orang untuk sekolah rakyat. Namun proses rekrutmen guru masih dibahas sejauh ini.

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya. Ya itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah



Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN).

"Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar," ungkap M Nuh Ketua Tim Formatour Sekolah Rakyat, di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

Dengan pendekatan ini, ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga Sekolah Rakyat bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico menjelas-

dan mendukung mereka secara optimal," ungkap Nuh pada rapat persiapan Sekolah Rakyat, Selasa (25/03/2025).

Agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. "Matrikulasi ini penting untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik," tambah Nuh.

Sementara itu, guru yang terpilih akan menjalani pelatihan khusus dengan fokus pada social empathy, sehingga mereka mampu mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang sosial. Dengan strategi yang terstruktur dan pendekatan yang berbasis kebutuhan masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi nyata dalam mem-



Sebetulnya yang diutamakan boarding school-nya yang paling penting sehingga gizinya tertangani.

ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," kata Mu'ti kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Sedangkan mengenai kurikulum Sekolah Rakyat, Mu'ti mengatakan sejauh ini ada dua pilihan skema. "Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti Pak Mendikdasmen. Tapi juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," ucapnya.

Sekolah unggul, kata Mu'ti, lazimnya berstandar internasional seperti Sekolah Unggul Garuda kelolaan Kemendikdasmen. "Tapi kalau kurikulum kami (Kemendikdasmen) ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," ujarnya.

Proses masih berjalan. Namun, program Sekolah Rakyat sudah jelas mendapat sambutan luas dan hangat. Sayang jika berantakan. • Editor: GE



MENGENAI DESIL 1-2 DTSEN ITU

Baiklah, para peserta didik di Sekolah Rakyat kelak adalah siswa yang berasal dari keluarga berada di kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Desil 1 dan 2 adalah dua kelompok dengan status sosial ekonomi terendah.

Desil adalah pemeringkatan 1-10 secara proporsional, merata, dalam satu rangkaian data. Jadi, setiap desil dalam DTSEN berisi 10 persen kelompok masyarakat Indonesia berdasarkan status sosial dan ekonominya. Desil 1 dan 2 berarti 20 persen keluarga yang paling rendah status sosial ekonominya: biasanya berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan angka penghasilan. "Kelompok paling rentan" menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widayanti.

Sedangkan DTSEN adalah suatu sistem yang dibangun berdasarkan basis data yang memuat berbagai informasi tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang mencakup tingkat nasional. Tujuan utama pembuatan DTSEN adalah untuk menyaji berbagai infor-

masi secara akurat dan komprehensif, sehingga dapat digunakan oleh pemerintah dan lembaga lain yang membutuhkan.

DTSEN menghimpun data yang terkait dengan demografi, pendapatan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta sektor-sektor lain yang krusial memengaruhi kualitas hidup penduduk Indonesia. Dengan demikian data tunggal mengintegrasikan berbagai data yang dihimpun lembaga-lembaga pemerintah yang terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan lembaga lain yang menangani permasalahan sosial dan ekonomi.

Tersedianya data tunggal dalam skala nasional ini akan memberikan dukungan bagi pihak yang berkepentingan dalam melakukan perencanaan, pengambilan kebijakan, serta melakukan evaluasi atas program-program pembangunan. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini diharapkan dapat memperbaiki efektivitas dalam menentukan berbagai kebijakan dan intervensi sosial ekonomi sesuai dengan kondisi nyata yang ada di Indonesia.

Pada 5 Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres tersebut ditujukan bagi Menteri dan Kepala Badan untuk melakukan optimalisasi dalam hal pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional. Pemerintah mengharapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan memberikan kepastian dalam hal akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data. Lebih jauh, melalui Instruksi Presiden No. 4/2025 ini diharapkan akan terbangun sinergi lintas sektor antar-kementerian/lembaga.

Program pengembangan Sekolah Rakyat adalah salah satu contoh konkret pemanfaatan DTSEN. Lebih dari itu, informasi dalam DTSEN juga dapat digunakan untuk, antara lain, menjaga ketepatan kelompok sasaran penerima subsidi. Akan lebih mudah menemukan, misalnya, warga yang mengkonsumsi gas melon kemasan 3 kg bersubsidi, padahal dalam DTSEN berada di desil 8, 9, bahkan 10. Begitulah. • Editor: GE

SAAT SAMBUTAN BERBALAS PERCEPATAN

Membangun sekolah, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, memang bukan soal mudah. Namun, upaya percepatannya akan jauh lebih baik daripada berpangku tangan.

Beroleh sambutan luas dan hangat dari berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Maret 2025. Rapat itu secara khusus membahas percepatan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang hadir dalam rapat, menyatakan

184 daerah lainnya telah mengajukan usulan pembangunan,” ujar Tito usai rapat, seperti dilansir dari laman web Presiden RI.

Mendagri Tito mengemukakan, pemerintah daerah sangat antusias menyambut program ini. Sebanyak 184 daerah telah mengajukan permohonan pembangunan Sekolah Rakyat dengan ketersediaan lahan yang sudah dipastikan. “Yang 184 ini usulan dari daerah-daerah sendiri, dan lahannya sudah siap,” ujarnya.



FOTO: FOTO: SETPRES

bahwa Sekolah Rakyat merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo. Pemerintah pusat akan mendukung penuh, mulai dari penyediaan tenaga pendidik hingga koordinasi dengan pemerintah daerah. “Sekolah Rakyat dibangun atas instruksi Bapak Presiden. Kami akan membantu dalam rekrutmen guru dan berkoordinasi dengan pemda. Saat ini sudah ada 53 sekolah yang siap, dan

Rapat terbatas ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan akses pendidikan berkualitas hingga ke pelosok negeri. Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh anak bangsa, terutama di daerah yang masih terbatas fasilitas pendidikannya.

Dengan 53 sekolah yang sudah siap beroperasi dan 184 usulan baru, pro-

gram Sekolah Rakyat semakin menunjukkan progres signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan merata di bidang pendidikan. "Ini bagian dari upaya kita memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan," tandas Tito.

Sepekan sebelumnya, Kementerian Sosial menyelenggarakan Rapat Pleno Progres Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI dan stakeholders terkait. Dalam rapat yang berlangsung pada Senin, 17 Maret 2025 itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta seluruh jajarannya serta stakeholder terkait untuk bergerak cepat agar target yang sudah ditetapkan tidak meleset.

"Presiden telah menginstruksikan seluruh kementerian dan pemerintah

Dalam kaitan ini, Gus Ipul mengemukakan, dalam masa persiapan, anak-anak yang akan bergabung dengan Sekolah Rakyat dapat mengikuti program matrikulasi selama satu tahun.

Program ini, sambungnya, bertujuan untuk memberikan orientasi bahasa dan keterampilan dasar sebelum pembelajaran reguler dimulai, terutama sambil menunggu penyelesaian sarana dan prasarana. "Presiden mengatakan, kalau memang perlu setahun untuk matrikulasi, tidak masalah. Yang penting anak-anak siap betul saat sekolah mulai berjalan penuh," jelasnya.

Dalam rapat tersebut terungkap sudah ada 79 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Rinciannya, 41 lokasi di bawah Kemensos, 30 lokasi di Jawa Timur, satu lokasi di Solok, Sumat-

itu, kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan pihak terkait untuk rekrutmen guru," kata Robben Rico.

Menurut dia, hingga saat ini, tim teknis juga masih menggodok penyelesaian status lahan dan bangunan yang akan digunakan. Pemerintah daerah diberikan opsi untuk menghibahkan atau meminjamkan aset yang dimiliki untuk kelancaran operasional Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah. Kementerian Sosial juga tengah membahas mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program ini,



daerah untuk mendukung Kemensos dalam proses persiapan, perencanaan, hingga operasional program ini. Kita harus bergerak cepat agar pelaksanaannya sesuai target," ujar Gus Ipul dalam rapat itu.

Beberapa agenda rapat menyangkut koordinasi yang membahas finalisasi regulasi, kesiapan lokasi, serta rekrutmen tenaga pengajar dan penerima program.

era Barat, dua lokasi di Perguruan Tinggi, dan empat lokasi di IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor).

Dalam rapat ini Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan pihaknya terus melakukan finalisasi berbagai aspek teknis agar program ini berjalan efektif. "Kami sudah menuntaskan draft final petunjuk teknis yang akan dipaparkan pekan ini. Selain

termasuk kemungkinan pembentukan tim khusus di daerah untuk mengawal jalannya Sekolah Rakyat.

"Kami tidak ingin ada kendala di lapangan. Oleh karena itu, kami memastikan semua peraturan, anggaran, dan tenaga pendukung siap sebelum program ini diluncurkan secara resmi," tambah Robben Rico.

Selain lokasi yang sudah dikonfir-

• INFO UTAMA

masi, masih ada beberapa daerah yang menyatakan kesediaan namun belum mengajukan surat resmi. Yang sudah terkonfirmasi antara lain adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengajukan empat lokasi untuk dimanfaatkan sebagai sarana Sekolah Rakyat. Lokasi yang dirujuk adalah Bina Siswa Cisarua, Kabupaten Bogor, Sentra Wyata Guna Kota Bandung, Centra Abiyoso Kota Cimahi, dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur Kota Bekasi.

"Kami sudah cek terkait dengan lahan atau bangunan yang akan digunakan untuk Sekolah Rakyat, yang sudah terkonfirmasi ada empat, tapi dua yang kami pastikan dan sudah lihat langsung kondisinya di lapangan," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman.

"Kami siap berbagi untuk pembiayaan. Ini luar biasa sekali dan kami tentu akan proaktif. Kemudian untuk yang Bina Siswa di Cisarua, tanahnya milik Kemensos dan bangunannya milik Pemda Provinsi. Kami siap menghibahkan bangunan yang ada di sana agar nanti memudahkan tata kelola keuangannya dan akuntabilitas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," ucapnya.

Lebih lanjut Herman juga mengungkapkan, pihaknya akan segera berkonsolidasi dengan para Sekda Kabupaten/Kota se-Jabar agar tak main-main mendukung pembentukan Sekolah Rakyat. "Kami ingin total dan untuk pemda kabupaten/kota yang sudah masuk sampai hari ini ada delapan yang menyampaikan alternatif lokasi, yang tentu harus dicek kondisinya di lapangan," ucap

menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor, kawasan Cibinong, Jawa Barat. Rapat ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Bogor Rudi Susmanto, juga Bupati dan Walikota se-Jawa Barat.

Dalam rapat yang berlangsung pada Kamis, 13 Maret 2025 itu, Gus Ipul mengemukakan, Kabupaten Bogor dan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu prioritas pembentukan Sekolah Rakyat. Terungkap pula proyeksi jumlah Sekolah Rakyat di Jawa Barat dapat mencapai 30 lokasi. "Satu kabupaten satu Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul.

Ia mengatakan anak yang menjadi sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Lalu, indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu," ujarnya. Gus Ipul mengatakan sekolah ini akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu. "Desil satu paling miskin ekstrem dengan ukuran tertentu," katanya. Ia menuturkan pemerintah akan memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara.

"Ke depan diharapkan jenjang pendidikannya SD, SMP, SMA," katanya. Ia menargetkan tiap jenjang memiliki kapasitas 300-500 siswa. Sehingga, satu Sekolah Rakyat memiliki sekitar 1.000 murid. "Akan dimulai tahun ini dengan melihat situasi dan kondisinya," katanya. Gus Ipul saat ini mengaku sedang konsolidasi dengan bupati dan wali kota. Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.

"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, Insya Allah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," katanya. Adapun untuk Jawa Barat, ia berharap memiliki 30 Sekolah Rakyat yang berdiri di tiap kabupaten/kota. "Nanti provinsi juga memiliki sendiri satu atau dua," katanya. Untuk kurikulum Sekolah Rakyat, ia mengatakan akan sama



Dari empat lokasi itu, sambungnya, yang relatif siap digunakan, yakni aset bangunan Bina Siswa dan Sentra Wyata Guna. Khusus Sentra Wyata Guna, kata Sekdaprov Herman, merupakan lokasi yang unik karena berada dalam Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), yang dikelola Pemdaprov Jabar mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.

Ia menyarankan supaya siswa di fabel Wyata Guna tidak direlokasi, namun justru diintegrasikan dengan Sekolah Rakyat sehingga menjadi lembaga pendidikan yang inklusif. Sekdaprov Herman juga mengemukakan Pemprov Jabar siap menganggarkan pembiayaan jika memang diperlukan.

Herman.

Kemudian untuk lahan milik pemda provinsi yang disiapkan jika akan dibuat bangunan baru, Herman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi tiga lokasi. Pertama di kawasan Ujungjaya, Kabupaten Sumedang, sekitar 10 hektare, Kedua, lahan di kawasan Kota Bandung, kurang lebih 10 hektare, dan di kawasan Jatinangor, Sumedang sekitar 5 hektare.

"Memang belum disertifikatkan tanahnya. Tapi prinsipnya, kami siap mendedikasikan itu. Kami ingin Jawa Barat harus terdepan," ungkapnya.

Sebelum Rapat Pleno di Kemensos, Mensos Gus Ipul malah sudah

dengan kurikulum sekolah unggulan. Tapi, hal ini masih dalam pembahasan lebih lanjut.

"Lagi dikombinasikan semua untuk membandingkan satu dengan yang lain, tapi acuannya sekolah unggulan," katanya. Gus Ipul juga menargetkan pada tahap awal akan didirikan 200 Sekolah Rakyat. Separuh dibangun pemerintah dan separuhnya lagi dibangun swasta. "Lagi kita konsolidasikan, termasuk Kabupaten Bogor salah satu yang prioritas," ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan adalah sebuah budaya, dan pola hidup miskin sering kali membuat individu terjebak dalam kemiskinan.

Program Sekolah Rakyat diharapkan dapat mengubah pola pikir dan membuka akses pendidikan yang lebih baik, sehingga anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi juga terhubung dengan berbagai peluang, termasuk akses ke sekolah unggulan dan akademi militer.

"Anak-anak yang berasal dari keluarga miskin harus diberikan akses pendidikan yang layak, agar mereka memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, bukan terjebak dalam pola hidup yang terus berulang," katanya.

Lebih lanjut, KDM -sapaan Dedi Mulyadi- juga menyampaikan pentingnya konektivitas antarprogram pendidikan, serta upaya untuk menciptakan kelas menengah baru di Jawa Barat. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah program diploma 3 dan S1 di bidang teknik, guna menciptakan angkatan kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia industri.

"Dengan hadirnya program ini, diharapkan dapat menciptakan kesempatan pendidikan yang lebih merata dan memberikan peluang bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas, serta menciptakan generasi yang lebih berdaya saing di masa depan," ucap KDM.

Menurut Gubernur KDM, proyeksi 30 Sekolah Rakyat di Jabar itu mulai dari jenjang SD, SMP, SMA. Lokasinya akan dibagi secara proporsional di kabupaten

dan kota. Tiap sekolah memiliki kuota 300 - 500 siswa. Sedangkan kurikulum, akan disamakan dengan ketentuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Agar sinkron dengan daerah, kata Dedi, Sekolah Rakyat bisa mengadopsi aturan lokal seperti masuk sekolah lebih pagi, yang saat ini sedang digodok Pem-

Dalam kesempatan terpisah Gubernur KDM juga mendukung percepatan pengembangan Sekolah Rakyat. "Kami memiliki ketersediaan ya, baik lokasi maupun lingkungan warganya dan sekretaris daerah sudah memverifikasi daerah-daerah yang prioritas," ujarnya, Rabu, 26 Maret 2025.

Ia memastikan, koordinasi dengan



da Provinsi Jabar. Aturan masuk sekolah lebih pagi bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, dan mencegah budaya nongkrong usai jam belajar terutama oleh anak-anak SMA yang berpotensi mengarah pada kenakalan remaja seperti tawuran, dan kebut-kebutan.

Sekolah lebih pagi juga bisa memunculkan budaya baru yaitu tidur lebih awal bangun lebih pagi. "Dari budaya nongkrong sampai jam 12 malam menjadi budaya tidur jam 9 malam," katanya.

kabupaten dan kota juga sudah terjalin untuk Sekolah Rakyat ini. "Selanjutnya para kepala daerah juga sudah punya kesanggupan, ya tinggal teknis pelaksanaan. Terutama biasanya kan menyangkut regulasi pengadaan tanah dan tanah-tanah yang milik Pemda provinsi, milik kabupaten juga relatif banyak di daerah-daerah," katanya.

Semoga tiada aral melintang. Pada Juli 2025 kelak semua akan kelihatan.

● Editor: GE

KRITIK DAN SARAN BUKAN PERKECUALIAN

Sebaik apapun niat pengembangan Sekolah Rakyat, kritik dan saran sudah menyertainya. Namun, kembalikan saja pada konsep awalnya bahwa Sekolah Rakyat merupakan upaya mengurangi, bahkan meniadakan angka putus sekolah.

Beberapa bulan sebelum gagasan mengembangkan Sekolah Rakyat, sudah mengemuka kritik terhadap kegagalan penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun di Indonesia, setara dengan lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan yang sederajat: katakanlah misalnya, sekolah vokasi (keterampilan) seperti sekolah menengah farmasi, atau sekolah teknik menengah. Lantas muncul gagasan mengatasi angka putus sekolah berbentuk Sekolah Rakyat, yang tak urung menghadapi kritik dan saran pula.

Semoga kritik dan saran terhadap Sekolah Rakyat bukan upaya menjegalnya. Itu sebabnya, para pemangku kebijakan seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) maupun Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof M Nuh mengupayakan agar upaya pengembangan Sekolah Rakyat tak dibenturkan atau diadu dengan pe-

nyelenggaraan sekolah lain yang ada di Indonesia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 2009-2014 sekaligus Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat M Nuh mengatakan bahwa nama Sekolah Rakyat dipilih bukan untuk merendahkan, melainkan untuk menanamkan keberanian dan tekad maju pada anak-anak kurang mampu. "Jadi dia berani secara clear, (berkata) saya memang miskin tapi saya ingin maju. Jadi dia tidak sembunyi-sembunyi kemiskinannya itu. Memang iya saya miskin, faktanya memang miskin tapi saya ingin maju," kata M Nuh dalam Rapat Koordinasi Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur 2025 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, 9 Maret 2025..

Sekolah Rakyat akan mengusung sistem boarding school atau asrama. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam membangun karakter dan rasa percaya diri dibandingkan sekolah bi-



asa. Menurut M Nuh, anak-anak miskin kerap mengalami inferiority complex atau rasa rendah diri, yang menghambat mereka berkembang.

"Karena memang anak-anak miskin itu perlu pembentukan karakter secara khusus, ini diangkat (kepercayaan diri) Sehingga untuk menemukan self confidence. Itu perlu pendekatan-pendekatan tersendiri yang rasanya tidak mungkin sekolah model biasa," ujarnya.

Yang perlu menjadi pegangan bersama, Sekolah Rakyat adalah untuk anak-anak putus sekolah serta riskan melanjutkan jenjang pendidikannya karena kondisi keluarganya berada di desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Kehadiran negara berupa kebijakan menyelenggarakan pendidikan anak-anak dari keluarga yang berada di desil 1 dan 2 itu, sudah sepantasnya jika bukan seharusnya.

Faktanya angka putus sekolah di Indonesia pada 2023 saja sudah sekitar 4,2 juta anak yang seharusnya mengenyam pendidikan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR pada Rabu, 30 Oktober 2024, Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) mengungkapkan program Wajib Belajar 12 Tahun belum tercapai. Kopaja mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan rata-rata lama sekolah bahkan tidak mencapai sembilan tahun.

Koordinator Kopaja, Ubaid Matraji mengemukakan, menurut data BPS rata-rata lama sekolah mencapai 8,48 tahun pada 2020. Angka itu naik tipis menjadi 8,54 tahun pada 2021, 8,69 tahun pada 2022, dan 8,77 tahun pada 2023. "Rata-rata lama sekolah kita SMP saja belum lulus," ujar Ubaid.

Jika melihat lebih jauh ke belakang, sambungnya, rata-rata lama sekolah pada tahun 2013 mencapai 7,61 tahun. Ini adalah selisih 1,16 persen dibandingkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2023. Artinya, ini adalah progres yang sangat lambat dalam kurun waktu sepuluh tahun.

Ubaid menyebut, Wajib Belajar 12 Tahun tidak tercapai berarti ada anak-anak yang tertinggal dalam mengakses pendidikan. Hal ini tercermin dari data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada Agustus 2024 yang mencatat jumlah anak tidak sekolah mencapai sekitar 4,6 juta. Dari angka itu, sekitar 2,2 juta anak belum pernah sekolah, sekitar satu juta anak putus sekolah, dan sekitar 1,3 juta anak tidak melanjutkan sekolah.

"Jadi, saya akses data Kemendikbudristek pada Agustus 2024, bahwa total anak yang enggak sekolah di Indonesia ada 4,6 juta. Rincian, rata-rata pada jenjang pendidikan menengah. Jadi masih banyak sekali yang ketinggalan," sambung Ubaid.

Berdasarkan data BPS dan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mayoritas anak yang tidak sekolah mengalami masalah ekonomi. "Nah, berdasarkan data BPS yang dihimpun dari 2014-2024 mayoritas anak-anak yang tidak sekolah dan pu-

tus sekolah di jenjang SMP dan SMA karena masalah ekonomi, tidak ada biaya, pekerja anak kemudian perempuan banyak yang terlibat dalam pernikahan usia dini," sambungnya.

Malah kaya Ubaid, ada anak usia sekolah yang menjadi korban kekerasan, hingga mengalami disabilitas. "Apakah kita mau lanjut (wajib belajar) 13 tahun? Apa makna 13 tahun kalau kita punya 12 tahun, sembilan tahun saja belum tercapai," tambah Ubaid.

Dengan kondisi seperti ini, Ubaid juga menilai upaya pemerintah yang tengah berencana program wajib belajar 13 tahun ini butuh kerja keras agar bisa tercapai. "Kita ini kalau baca peta jalan itu mau ke 13 tahun, pemerintah sebelumnya wajib belajar 12 tahun. Tapi kalau kita lihat sepuluh tahun ini, tidak mencapai 12 tahun. Kita masih di angka delapan sekian. Mencapai sem-



• INFO UTAMA

bilan tahun aja belum,” ungkapnya.

Selain itu, Ubaid juga menanggapi perihal keinginan pemerintah dalam menerapkan pendidikan Matematika yang akan ada di taman Kanak-kanak (TK).

Bagaimana bisa, kata Ubaid untuk pemerintah mewujudkan hal tersebut. Pasalnya, sejauh ini masih banyak murid yang belum dapat membaca dengan baik.

“Enggak usah jauh-jauh soal MTK, dan sains, soal membaca aja kita ini masih jauh, Kemarin aja banyak ditemukan bahwa anak SMP membaca saja tidak bisa,” tanggapan Ubaid.

“Di tempat saya saja ketika saya

dari keluarga miskin. “Anak-anak dari keluarga miskin akan merasa terkucilkan dan dipandang sebagai warga kelas tiga,” ujar Ubaid.

Keberadaan Sekolah Rakyat yang memisahkan anak-anak kelompok miskin juga bisa memperburuk ketimpangan kualitas pendidikan. Siswa yang bersekolah di sekolah rakyat, menurut Ubaid, berpotensi memperoleh pendidikan dengan fasilitas dan sumber daya yang jauh dari standar pendidikan berkualitas yang ujungnya akan mengurangi daya saing. Jika terjadi, kondisi ini malah akan menjauhkan tujuan mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan.

ungan Anak Indonesia mengingatkan supaya Sekolah Rakyat tidak tumpang tindih dengan layanan pendidikan yang sudah ada selama ini. Anggota KPAI, Aris Adi Leksono, mengatakan, Sekolah Rakyat jangan sampai mengadakan layanan pendidikan seperti jalur afirmasi dalam SPMB, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), sampai madrasah di bawah Kementerian Agama.

“Pemerintah harus memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak menggantikan atau menonaktifkan layanan pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru harus memperkuatnya,” ungkapnya dalam keterangan resmi Rabu, 26



mendampingi beberapa sekolah SMP di Tangerang dan Banten, banyak yang tidak bisa membaca. Buat yang membaca untuk memahami teks aja nggak bisa,” tambahnya.

Toh Ubaid pula yang menjadi salah satu pengkritik gagasan Sekolah Rakyat. Menurut dia, Sekolah Rakyat berpotensi membawa Indonesia mundur ke era kolonial. Sebab, konsep Sekolah Rakyat memisahkan siswa berdasarkan status sosial dan ekonomi. Hal ini bisa menciptakan jurang pemisah antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin.

Ubaid berpendapat, keberadaan Sekolah Rakyat akan memunculkan stigma yang merugikan bagi anak-anak

Di samping itu, ada tantangan besar yang perlu diwaspadai adalah kerentanan ekonomi dan potensi pemaksaan pada anak. “Banyak anak dari keluarga miskin, selain sekolah, mereka juga harus membantu orang tua di sawah atau kebun. Kalau mereka harus tinggal di asrama, bisa muncul masalah baru,” ungkapnya.

Tambahan pula, banyak keluarga miskin lebih memilih menyekolahkan anak mereka di pesantren atau sekolah berbasis agama. “Pemerintah harus memastikan tidak ada paksaan dan harus memfasilitasi hak anak untuk memilih sekolah yang mereka kehendaki,” ujarnya.

Senada dengan itu, Komisi Perlind-

Maret 2025.

Mengutip Statistik Pendidikan 2024, KPAI menyebutkan terdapat 148.758 SD, 42.548 SMP, 14.445 SMA dan 14.445 SMK, serta ribuan madrasah di bawah Kemenag yang juga dapat dioptimalkan untuk memenuhi hak pendidikan anak dari keluarga kurang mampu. Terkait itu, KPAI menegaskan Sekolah Rakyat hendaknya menjadi sekolah pendidikan yang inklusif, bebas stigma, dan berkelanjutan.

Jadi, dalam pandangan KPAI, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dan perencanaan komprehensif sebelum mengimplementasikan Sekolah Rakyat. Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa program

ini memiliki konsep yang matang dan mekanisme yang jelas.

Aris mengatakan, KPAI menekankan, pengasuhan keluarga tetap menjadi faktor penting dalam mendukung pendidikan anak. "Oleh sebab itu, Sekolah Rakyat sebaiknya dapat memperkuat keterlibatan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak secara holistik," katanya.

Selain itu, KPAI menyebut ketersediaan tenaga pendidik juga perlu diperhatikan pemerintah. Guru dan tenaga kependidikan yang kompeten, dalam pandangan lembaga ini, menjadi penting saat menangani anak-anak dari situasi rentan.

Dari kalangan wakil rakyat di Komisi VIII DPR yang membidangi urusan Agama dan Sosial, sejak awal menghendaki adanya koordinasi yang jelas antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kemendikbudristek agar program ini tidak mengalami tumpang tindih kebijakan. "Pihak yang bertanggung jawab dalam menyediakan akses pendidikan harus jelas, apakah Kemensos atau Kementerian Pendidikan. Jangan sampai ada tumpang tindih kewenangan," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya, Sabtu, 8 Februari 2025.

Sedangkan Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, yang mengingatkan bahwa Kemendikbudristek sudah memiliki beberapa program beasiswa untuk mengatasi putus sekolah. "Jangan sampai ada tumpang tindih dengan Kementerian

Pendidikan, karena di sana juga ada program beasiswa untuk mengatasi putus sekolah. Selain itu, perlu diperjelas lokasi pembangunan sekolah ini,



Enggak usah jauh-jauh soal MTK, dan sains, soal membaca aja kita ini masih jauh, Kemarin aja banyak ditemukan bahwa anak SMP membaca saja tidak bisa.

apakah akan tersebar merata. Ini penting, mengingat program ini menyangkut anggaran negara," ujarnya.

Tentu saja kritik itu terkait dengan anggaran penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang per unitnya dapat mencapai Rp100 miliar sebagaimana pernah dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Abdul Muhaimin Iskandar. "Anggaran (Sekolah Rakyat) tergantung perkembangan. Tergantung kebutuhan masing-masing lokasi, rata-rata ya Rp 100 miliar untuk satu sekolah," kata Menko PM di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat,

Senin, 10 Maret 2025.

"DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar dapat berjalan optimal tanpa tumpang tindih dengan program kementerian lainnya," ujar Atalia.

Toh menyangkut anggaran penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Kementerian Keuangan menyatakan pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah masih mematangkan rencana pelaksanaan sekolah rakyat. Menurutnya, pelaksanaan sekolah rakyat tersebut bertujuan memberikan pendidikan untuk siswa miskin.

"Kita bahkan membuat sekolah rakyat untuk masyarakat miskin. Ini yang sekarang sedang digodok dan akan ditingkatkan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Sedangkan Wakil Menteri Suahasil Nazara dalam acara yang sama memaparkan anggaran pendidikan APBN 2025 telah terealisasi Rp76,4 triliun hingga Februari 2025. Realisasi ini setara dengan 10,6 persen dari pagu APBN senilai Rp665 triliun.

Menurut dia, kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dilaksanakan dengan tetap menjaga 20 persen anggaran pendidikan. Sebab, pemerintah telah merancang berbagai kebijakan di bidang pendidikan pada tahun ini.

Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui program unggulan, kata Wamenkeu, pemerintah antara lain bakal melaksanakan renovasi dan revitalisasi sekolah; pelaksanaan sekolah unggulan, sekolah taruna Indonesia, dan sekolah rakyat; serta makan bergizi dan digitalisasi pembelajaran. Sedangkan output strategis anggaran pendidikan 2025, salah satunya pelaksanaan sekolah rakyat.

Nah, tampak negara sudah berupaya hadir merintis pemerataan kesempatan untuk meraih masa depan lebih baik bagi anak-anak putus sekolah dan rentan dari keluarga di desil 1 dan 2 DTSEN melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Kritik dan saran sejauh ini agaknya tak akan menghalanginya. • Editor: GE



SIKLUS OTORITARIANISME

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sudah disetujui Sidang Paripurna DPR pada Kamis, 20 Maret 2025. Pengesahan itu sontak menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait prosesnya yang begitu cepat (14 hari sejak diusulkan) sehingga dinilai cacat formal. Substansinya juga ditakutkan menghidupkan kembali dwifungsi militer.

Penempatan serdadu aktif di 14 kementerian atau lembaga, serta keberadaan mantan personel militer di institusi lainnya, bersifat indikatif terhadap adanya siklus otoritarianisme dalam politik dan pemerintahan Indonesia.

Walaupun tidak persis setiap 25 tahunan atau 30 tahunan, kecenderungan siklus otoritarianisme itu layak dicermati dan menjadi pembelajaran.

Dalam pencarian bentuk politik dan pemerintahan dari negara yang baru merdeka dan di tengah revolusi mempertahankan kemerdekaan, masa 1945-1959 sering dianggap sebagai masa demokrasi. Puncaknya adalah Pemilu 1955 yang sering disebut sebagai paling liberal.

Namun, Presiden Soekarno menolak politik liberal semacam itu karena dinilai tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia dan selanjutnya mendeklarasikan Demokrasi Terpimpin pada 1959.

TNI saat itu menjadi penopang utama kekuasaan Soekarno, di samping Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan kemudian Partai Komunis Indonesia (PKI), walau kedua kekuatan politik tersebut berkontribusi terhadap kejatuhannya (1966).

Meski awalnya disambut antusias oleh kekuatan prodemokrasi, termasuk mahasiswa, rezim Orde Baru Soeharto bertumpu pada

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bersama ABRI, birokrasi, dan Golkar, yang lalu memunculkan tiga pilar A-B-G, Soeharto menjalankan trilogi pembangunan bertajuk Demokrasi Pancasila.

Lewat dwifungsi ABRI—di mana para perwira tentara menduduki berbagai jabatan politik dan pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, di pusat ataupun di daerah—Soeharto mampu mempertahankan kekuasaan selama 32 tahun.

Masa setelah Soeharto, yang dikenal sebagai masa Reformasi (sejak 1998), juga diawali dengan semangat demokratisasi.

Euforia demokratisasi ini menuntut dwifungsi ABRI dihapuskan. Intinya, TNI harus berada di bawah kontrol pemerintahan sipil. Wujudnya, tentara tidak boleh terlibat dalam lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, kecuali sudah pensiun atau mengundurkan diri sebagai tentara aktif, sebelum memasuki dunia politik dan pemerintahan.

Semuanya diatur melalui Tap MPR Nomor VI/2000 dan VII/2000 dan selanjutnya dituangkan dalam UU TNI Nomor 34/2004. Sekitar 25 tahun kemudian, kecenderungan militer terlibat dalam kekuasaan pembuatan keputusan-keputusan politik dan pemerintahan tampaknya tak lagi terbandung.

Kelemahan Pemerintahan Sipil

Kecenderungan sebuah negara ke arah otoritarianisme sering disebut sebagai akibat dari kelemahan dan kegagalan pemerintahan sipil. Jika itu benar, kegagalan pemerintahan sipil tampaknya juga mengalami siklus tertentu.

Siklus kegagalan pemerintahan sipil, walau tak selalu sama dengan pemerintahan demokratis, ditandai dua hal.

Pertama, pemerintahan sipil tidak mampu menjaga soliditas yang kuat dan berkelanjutan. Keberagaman identitas, nilai, dan kepentingan memang menjadi bahan baku utama dan basis demokrasi, tetapi kemampuan mengelolanya sering kali digerogeti oleh kepentingan atas argumentasi tertentu, misalnya asas mayoritas.

Kepemimpinan sipil atas hikmat kebijaksanaan yang menekankan kepentingan bersama tidak selalu sejalan dengan hikmat perwakilan yang lebih mengindikasikan kepentingan mayoritas-minoritas.

Reformasi yang mengusung supremasi sipil dan supremasi hukum hanya berlangsung sesaat. Reformasi ini kemudian meredup dan dibunuh oleh politik pragmatisme dan transaksionalisme dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan berbasis kepentingan jangka pendek, sebagaimana ditampilkan oleh koalisi-koalisi politik yang cair dan mudah berubah.

Hal kedua adalah mudahnya unsur-unsur sipil melirik dan menarik dukungan dari unsur-unsur nonsipil, baik karena kekuatan kelembagaan, jaringan, maupun besaran massanya.

Kekuatan nonsipil ini bisa berupa militer atau kepolisian. Memasukkan militer ke dalam pemerintahan sudah dipraktikkan oleh Soekarno dan Soeharto pada zamannya.

Kekuatan kepolisian sering disebut menjadi kekuatan yang dimanfaatkan oleh Joko Widodo (Jokowi), yang memunculkan fenomena partai coklat (parcok).

Pemanfaatan kekuatan di luar militer dan kepolisian juga pernah terjadi, yaitu berupa kelompok-kelompok radikal dan premanisme, yang dalam karya Verena Beittinger-Lee (2010) dikategorikan sebagai uncivil society organizations.

Otoritarianisme: Bukan Sebatas TNI

Siklus mudarnya daya tahan pemerintahan sipil, dengan demikian, sejalan dengan siklus masuknya militer ke dalam urusan-urusan sipil, meskipun hal itu tidak dengan sendirinya melahirkan pemerintahan militeristis.

Pengesahan revisi UU TNI membuka pintu lebar-lebar ke arah otoritarianisme dengan varian yang mungkin berbeda.

Tentang varian tersebut, sejarah politik Indonesia mendokumentasikannya. Harry Benda (1966), misalnya, menyebut beambtenstaat yang mengartikan administrasi pemerintahan yang bersifat apolitik.

Harold Crouch (1979) menamai patrimonial cum military regime dan Dwight King (1982) mengajukan istilah bureaucratic authoritarian regime. Istilah-istilah tersebut menarasikan kekua-

OLEH: MANGADAR SITUMORANG
Pengajar Politik Indonesia Universitas
Parahiangan

saan pemerintahan yang ditopang oleh kekuatan pemaksa, bercorak patron-client, dan terpisah dari rakyat.

Ruth McVey (1982) menyebut praktik post-colonial state, sementara Benedict Anderson (1983) menyebut old state, new society, untuk menggambarkan nihilnya perubahan sistem pemerintahan (walau sudah merdeka) di tengah masyarakat yang berubah dan menggantikan istilah Clifford Geertz (1969) old societies, new states.

Seiring dengan masuknya kekuatan kapital, Richard Robison (1986) memunculkan konsep authoritarian-bureaucratic-capitalism dan Hal Hill (1996) mengungkapkan adanya apa yang disebut authoritarian interventionist development state.

Varian otoritarianisme di atas dengan jelas menunjukkan keberadaan dan peranan kekuatan lain selain tentara. Birokrasi

erja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 terbatas hanya beredar di kalangan pemerintah, termasuk untuk pembelanjannya.

Berkolaborasi dengan lembaga legislatif sudah semakin nyata. Hal itu diawali dengan terbangunnya Koalisi Indonesia Merah Putih plus (KIM plus) yang telah mengisi jajaran kabinet dan lembaga nonkementerian. Koalisi ini tentunya berlanjut di Senayan, bahkan digadang-gadang menjadi koalisi yang permanen.

Penerimaan oleh Komisi I DPR yang dipimpin anggota DPR dari PDI Perjuangan dan pengesahan oleh Ketua DPR yang juga dari PDIP atas revisi UU TNI jelas mengikis harapan sebagian warga akan adanya kekuatan oposisi di DPR yang memiliki pandangan kritis dan mampu membendung kembalinya otoritarianisme.



atau administrasi pemerintahan menjadi mitra potensial. Kecenderungan mensterilkan birokrasi dari pengaruh (partai) politik sejatinya merupakan praktik universal di banyak negara.

Perintah Presiden Prabowo Subianto agar para menteri dan kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) mengutamakan kepentingan rakyat dapat dibaca sebagai upaya menjauhkan pimpinan pemerintahan di pusat dan daerah dari campur tangan dan kepentingan partai-partai politik (pengusung).

Para kapitalis atau pemilik modal, baik nasional maupun internasional, merupakan partner potensial kedua. Menggandeng mereka merupakan langkah strategis dalam rangka mendukung pembiayaan program-program pembangunan pemerintahan Prabowo.

Keterbatasan penerimaan pajak dan ketidakpastian perolehan nonpajak, termasuk pinjaman luar negeri di tengah ketidakpastian perekonomian global, membuat profil dan kin-

Menaruh harapan pada lembaga yudikatif untuk menjaga prinsip demokrasi, setidaknya-tidaknya dalam hal mengawasi kekuasaan eksekutif dan legislatif, tampaknya juga akan sia-sia. Secara normatif lembaga ini adalah independen, tetapi para pejabatnya jauh dari kriteria tersebut.

Kecenderungan ke arah otoritarianisme boleh jadi memiliki siklus tertentu atas argumentasi dan godaan menghadirkan pemerintahan yang efektif, seperti halnya dalam sistem komando yang berlaku di militer. Namun, pada saat yang sama, hal itu akan menutup ruang-ruang partisipasi politik demokratis.

Apakah itu akan dikompensasi oleh keberhasilan pemberantasan korupsi, pembangunan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat dan menjadi pelipur terhadap hilangnya kebebasan dan partisipasi politik? Walau layak ditunggu, itu mungkin harus dibayar dengan biaya besar yang harus ditanggung dalam lima tahun ke depan. ●



PERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH

Upaya pemerataan pembangunan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya di daerah. Percepatan pembangunan infrastruktur ini dilakukan agar pemerataan berjalan dan dirasakan hingga ke pelosok daerah.

Seperti yang dilakukan Gubernur Sumsel H Herman Deru saat meresmikan 4 unit jembatan beton di ruas jalan 106 KM yang melintasi lahan hutan produksi PT MHP menghubungkan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) dan Kabupaten Musi Rawas (Mura).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemecahan kendi di atas jembatan Air Keruh Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas.

Adapun keempat jembatan yang diresmikan Gubernur Herman Deru tersebut masing-masing Jembatan Air Teras, Air Keruh, Jembatan TPI 1 Sungsang, TPI 2 Sungsang yang mas-

uk dalam Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu Kabupaten Musi Rawas.

Adapun anggaran APBD Provinsi Sumsel yang digelontorkan untuk pembangunan keempat jembatan tersebut diantaranya untuk Jembatan Air Teras dengan Anggaran Rp 10 miliar, Jembatan Air Keruh Rp 33,5 miliar. Jembatan TPI 1 kurang lebih senilai Rp 4,5 miliar dan TPI 2 kurang lebih senilai Rp 4,5 miliar.

"Alhamdulillah hari ini kita meresmikan jembatan yang memang diharapkan masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Sumsel khususnya pengguna ruas jalan ini," kata Gubernur Herman Deru.

Herman Deru menegaskan, beberapa tahun yang lalu dirinya juga

telah datang ke titik yang sama saat meresmikan jalan sepanjang 106 KM. Di mana jalan alternatif penghubung Kabupaten Mura dan Kabupaten PALI ini sangat dinantikan masyarakat utamanya warga Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Muratara untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh menuju Kota Palembang.

"Ini masih butuh penyempurnaan tapi secara fungsi sudah dapat difungsikan. Apalagi sebentar lagi harus pergi dan balik menyambut Lebaran Idul Fitri," katanya.

Untuk memper lancar mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah Gubernur Herman Deru juga memerintahkan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang

(PU BM-TR) Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas PU Kabupaten Musi Rawas untuk dapat menempatkan alat beratnya agar bisa membantu ketika saat dibutuhkan.

“Nah mudah-mudahan adanya jembatan ini akan mempermudah guna beraktifitas sosial dan ekonomi,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Musi Rawas, H Suprayitno menyampaikan ucapan terimakasih kepada Gubernur Sumsel Herman Deru yang telah datang ke Musi Rawas meresmikan jembatan yang menjadi kebutuhan prioritas utama masyarakat.

“Hari ini kita sama-sama menyaksikan sebuah bentuk kepedulian dan kecintaan Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru kepada masyarakat dalam peresmian jembatan,” ucap Suprayitno.

Dia mengajak masyarakat Mura untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun ini, agar tidak cepat rusak dan ini tanggungjawab bersama. Karena jembatan dan jalan merupakan infrastruktur dasar di mana roda perekonomian dapat berjalan baik.

“Kami harap kepada masyarakat dengan diresmikannya jembatan ini dapat menggerakkan ekonomi lokal, menatap masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.

Respon Keinginan Warga

Gubernur Herman Deru juga merespon keinginan masyarakat yang membutuhkan akses pembangunan dalam upaya peningkatan ekonomi. Seperti saat melakukan kunjungan ke

Kabupaten Banyuasin. Di mana Herman Deru langsung memberikan respon saat warga minta pembangunan infrastruktur berupa Jembatan Tanah Kering Pulau Rimau dan Jembatan Rantau Bayur.

“Jembatan tanah kering ini kita respon. Ajukanlah usulannya,” kata Gubernur Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD di kediaman pribadi Bupati Askolani di Sukajadi Banyuasin beberapa waktu lalu.

Herman Deru mengatakan, Jembatan Rantau Bayur sudah berapa kali mendapatkan bantuan dari Gubernur

rangka bajanya dari Kementerian PU.

“Disana ada persoalan pengukuran bajanya jaraknya 105 meter sehingga harus custom atau ditempa, nah ini yang harus dipertajam,” tambah Herman Deru.

Namun demikian Herman Deru memastikan akan tetap membantu dan merespon keinginan masyarakat penyelesaian pembangunan kedua jembatan tersebut.

riode kedua pak gubernur hadir, memang pak Gubernur ini kesayangan kami,” katanya.

Askolani menyampaikan Kabupaten Banyuasin pada musim penghujan sekarang ini rawan terdampak banjir terutama di beberapa titik seperti di Talang Kelapa.

“Ada 1700 rumah yang terdampak sehingga kami ambil tindakan, berikan antisipasi dan memberikan bantuan,”



“Intinya kita bantu, bawa saja suratnya saya tunggu, jangan lama-lama ya,” kata Herman Deru kepada Askolani.

Sementara itu, Bupati Banyuasin Askolani atas nama Pemkab dan masyarakat Banyuasin mengucapkan terima kasih pada Gubernur Sumsel Herman Deru.

“Pak Gubernur ini luar biasa, di pe-

ujarnya.

Bupati Askolani berharap kepada Gubernur Herman Deru tetap terus memberikan dukungan dan bantuan infrastruktur kepada Banyuasin.

“Ada dua Jembatan yang diharapkan dan ditunggu-tunggu masyarakat pertama Jembatan Tanah Kering Pulau Rimau dan Jembatan Rantau Bayur,” pungkasnya. ●ADV

PERJUANGKAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN TIGA DIHAJI KE PRESIDEN

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru memang tak pernah setengah-setengah dalam memajukan sektor pertanian di Sumsel. Demi mendorong peningkatan produksi pertanian di Sumsel, HD tanpa sungkan memperjuangkan penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Gubernur HD secara langsung meminta kepada Presiden Prabowo membantu mempercepat pemangunan Bendungan Tiga Dihaji yang saat ini terkendala penjadwalan ulang.

Di mana Herman Deru berkesempatan menyampaikan hal tersebut saat diskusi langsung dengan Presiden Prabowo pada acara Panen Serentak di 14 Provinsi secara Virtual dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

HD menjadi Gubernur pertama yang mengajukan usulan kepada Presiden demi percepatan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji.

Menurut Herman Deru keberadaan Bendungan Tiga Dihaji yang telah dibangun sejak akhir tahun 2018 tersebut sangat dibutuhkan bagi pening-

katan produksi pertanian di Sumsel. Pembangunan ini sedianya akan selesai pada tahun 2023.

"Bendungan ini sangat kami butuhkan karena dengan adanya bendungan ini debit air akan ikut meningkat. Untuk itu kami mohon dengan sangat agar Pak Presiden untuk membantu menyelesaikan pembangunan Bendungan Tiga Dihaji ini," tegas Herman Deru.

Lebih jauh, HD mengatakan Bendungan Tiga Dihaji yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) ini merupakan hadiah bagi Sumsel. Pasalnya saat itu Sumsel menjadi Provinsi ke-5 tertinggi produksi beras nasional dari sebelumnya di peringkat ke-8.

"Untuk mencapai capai musim tanam 2 dan tiga itu kita butuh irigasi tidak bisa hanya mengandalkan tadah hujan. Kita

punya potensi tambahan debit air, makanya tadi Saya sampaikan ke Presiden agar inj dapat diselesaikan Kementerian PUPR," jelasnya.

Selain meminta percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji, dalam kesempatan itu HD juga menyampaikan apresiasinya atas kebijakan pemerintah menetapkan HPP Rp 6500/Kg. Hal itu diakuinya membuat produksi padi di Sumsel meningkat.

"Semangat petani juga semakin meningkat dan produksi meningkat. Kami harap juga Balai yang mengurus irigasi lebih memperhatikan," tambahnya.

Sementara itu secara umum Presiden Prabowo menanggapi beberapa usulan para Gubernur dan juga petani terkait alat pertanian dan juga irigasi, agar Kementerian terkait untuk segera menin-



dakanjuti semua kebutuhan yang dibutuhkan di daerah.

Dalam kesempatan itu Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaannya kepada para petani. Menurutnya petani merupakan tulang punggung bagi bangsa dan negara. Tanpa petani tidak ada urusan pangan.

"Saya katakan berkali-kali dan bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada NKRI," tegas Prabowo.

Segera Kirim Surat ke Presiden

Upaya Gubernur Herman Deru mempercepat penyelesaian pembangunan Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) terus dilakukannya. Terbaru, Herman Deru berencana bersurat kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkapkannya saat menerima audiensi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Feriyanto Pawenrusi dalam rangka silaturahmi di Ruang Tamu Gubernur.

Dalam kesempatan itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII, Feriyanto mengatakan bahwa usulan HD terkait penyelesaian Bendungan tersebut saat Panen Serentak di 14 Provinsi secara virtual, Selasa (7/4/2025) mendapat atensi khusus dari Presiden. Hal itu menurut Feriyanto disampaikan langsung Menteri PUPR saat mereka rapat virtual.

"Menteri mengatakan Sumsel harus jadi perhatian karena mereka sudah sampaikan Presiden langsung," ujar Feriyanto.

Dalam kesempatan itu kata Feriyanto, Menteri menyarankan agar Pemprov Sumsel segera berkiriman surat ke Presiden dengan tembusan Menteri Pertanian dan Menteri PUPR.

"Tadi Pak Menteri mempersilahkan Gubernur bersurat ke Presiden. Ini seperti di NTB, nanti tembusannya ke Menteri PU dan Pertanian. Kita harap selesai 2026 untuk peningkatan debit Komerling," jelasnya.

Feriyanto menjelaskan Bendungan Tiga Dihaji semula ditargetkan selesai awal tahun 2024. Namun karena ada permasalahan lahan dan perubahan desain bendungan ini ditargetkan selesai tahun 2026.

Padaحال bendungan ini sangat dibu-

tuhkan untuk meningkatkan debit air yang dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian di Sumsel.

Terkait hal itu, Gubernur Herman Deru segera meminta Asisten II Pemprov Sumsel Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sumsel Ir. Basyaruddin Akhmad untuk segera membuat surat yang dimaksud.

Menurut HD kehadiran Bendungan Tiga Dihaji ini dapat membantu pen-

pesan agar BBWS Sumatera VIII aktif melakukan pemeliharaan irigasi. Hal ini penting karena sangat mempengaruhi perkembangan pertanian di daerah.

Optimis Sumsel Peringkat 1 Produksi Beras

Luasnya lahan pertanian yang dimiliki Sumatera Selatan menjadi modal utama untuk peningkatan produksi pangan nasional. Bahkan Menteri Pertanian



gairan pertanian di sejumlah daerah di Sumsel. Sehingga dapat meningkatkan produksi serta memperkokoh Sumsel sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia.

"Langsung aja buat surat permohonan secepatnya. Kita sampaikan alasannya dan tembuskan ke Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian. Ini akan segera kita lakukan karena mendukung ketahanan pangan sesuai Asta Cita Bapak Presiden," jelas HD.

Selain membahas soal bendungan dalam kesempatan itu HD juga ber-

(Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman menyebut Provinsi Sumatera Selatan dapat menempati posisi teratas sebagai provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia, bahkan melampaui pulau Jawa.

Menurut Mentan, selain Provinsi Sumsel memiliki potensi luas panen yang cukup besar pada tahun 2025, kemudian hasil kerja keras para petani dan insan pertanian, daerah ini juga dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang berkomitmen penuh dalam meningkatkan produktivitas padi. ● ADV

DUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI BANGUBSUS

Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Cik Ujang atau HDCU mendukung penuh pembangunan di Sumatera Selatan yang telah diprogramkan para bupati / walikota sebelumnya. Dukungan ini melalui program Bantuan Gubernur Bersifat Khusus atau Bangubsus.

Menurut Herman Deru penyaluran Bangubsus omo terdapat beberapa kluster, mulai dari direktif atau menerima usul karena kunjungan Gubernur, bisa juga diusulkan kepala daerah melalui DPRD Provinsi Sumsel melalui reses dan kunjungan daplil, yang

bersifat khusus tahun anggaran 2025,

Herman Deru menegaskan, Bangubsus digunakan untuk mengakomodir pembangunan yang bersifat pembangunan infrastruktur.

"Di dalam kelompok ini bukan yang berarti kita mengabaikan usulan lain, kita fokuskan di infrastruktur terutama

menentukan berapa nilai bantuan sangat tergantung pada apa yang dipaparkan. Jadi masing-masing kepala daerah memang harus melakukan paparan tentang apa-apa saja yang menjadi prioritas di daerah itu. Kemudian akan ditelaah dalam tim verifikasi. Kita fokus saja bantuan keuangan ini menjurus ke in-



kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

"Tiga alasan utama Gubernur dapat memberikan Bangubsus antara lain, program yang bersifat super prioritas bagi daerah, misalnya program yang sangat baik tapi sempat terhenti karena berganti pemimpin sehingga mangkrak. Kemudian, program yang merupakan janji kepala daerah terpilih, termasuk misalnya janji perbaikan infrastruktur dari Bupati saat mencalonkan diri, dan ketiga adalah program reguler," ungkapnya usai menyimak paparan Walikota Palembang Ratu Dewa, mengenai usulan program dan kegiatan prioritas Kota Palembang melalui bantuan keuangan

jalan, jembatan juga infrastruktur yang mengena di masyarakat contohnya instalasi untuk air minum, prioritas itu yang berkaitan dengan RPJMD yang diperkirakan pemkot atau pemkab kurang pendanaanya, tapi dinilai provinsi itu bermanfaat untuk masyarakat, kita akan backup juga," tegasnya.

Herman Deru menerangkan, Bangubsus harus dilaksanakan dengan akuntabel, efisien, efektif dan yang paling penting tepat sasaran, kemudian untuk besaran nilai bangubsus tergantung dari apa yang dipaparkan, untuk selanjutnya ditelaah dari tim verifikasi khusus penyaluran bangubsus.

"Pak Bupati dan Pak Walikota, dalam

infrastruktur khususnya untuk pelayanan masyarakat," tandasnya.

Sementara Walikota Palembang Ratu Dewa menyampaikan terimakasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel beserta jajaran, yang sudah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Palembang untuk memaparkan usulan program dan kegiatan prioritas Kota Palembang melalui bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2025.

Dukung Program Super Prioritas di Muba

Dukungan yang sama juga diberikan kepada Pemkab Musi Banyuasin. Di-

mana HDCU siap mendukung pembangunan di Kabupaten Muba yang masuk program super prioritas.

“Mau itu program Bupati/Walikota sebelumnya dan pekerjaannya mangkrak karena tidak ada pendanaan atau terabaikan namun dampaknya sangat baik bagi masyarakat Pemprov siap back up,” tegas HD.

Selain mendesak, kategori program yang masuk super prioritas adalah janji-janji kepala daerah kepada warga yang sejalan dengan program Pemprov Sumsel dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

Dalam pertemuan tersebut HD sempat menyoroti masalah minimnya sinyal di beberapa desa di Kabupaten Muba. Terkait hal itu, Ia mendorong Kominfo Kabupaten Muba untuk berkoordinasi dengan Kominfo Provinsi Sumsel agar dapat melakukan langkah-langkah strategis dengan provider.

“Selain itu saya juga minta daerah Muba yang bersinggungan dengan Banyuasin yakni Paldas untuk lebih diperhatikan khususnya Desa Purwosari karena banyak aspirasi masuk dari daerah tersebut,” jelasnya.

Sementara Bupati Muba HM Toha menjelaskan bahwa usulan alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus pada APBD Prov Sumsel Tahun Anggaran 2025, senilai Rp 591.543.089.035.

Usulan tersebut mencakup bantuan pendanaan pada empat bidang yakni, Infrastruktur, Bidang Pendidikan, Bidang Energi dan Bidang Olahraga.

“Selain pembangunan jalan, ada untuk perbaikan sekolah, sambungan listrik dan persiapan Porprov nanti,” tuturnya

Siap Tunjang Pembangunan Pariwisata Pagaralam

HDCU juga menegaskan, penyaluran Bangubsus untuk Kota Pagaralam. Gubernur Herman Deru menegaskan, Pemprov Sumsel akan terus mendukung pengembangan pariwisata di Kota Pagaralam. Karena itu perlu dibuatkan infrastruktur penunjang.

“Kota Pagaralam merupakan kota tujuan destinasi wisata, maka segenap unsur pembangunan harus kesana karena wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata akan mendapat kemudahan dan kenyamanan aksesibilitas,” katanya.

Lebih jauh Herman Deru menerang-

kan, Bangubsus harus dilaksanakan dengan akuntabel, efisien, efektif dan yang paling penting tepat sasaran, kemudian untuk besaran nilai bangubsus tergantung dari apa yang dipaparkan, untuk selanjutnya ditelaah dari tim verifikasi khusus penyaluran bangubsus.

Sementara itu Walikota Pagaralam Ludi Oriansyah menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel beserta jajaran, yang sudah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Pagaralam untuk memaparkan usulan program dan kegiatan prioritas Kota Palembang melalui bantuan keuangan bersifat khusus

ini harus dilaksanakan dengan akuntabel, efisien, efektif dan yang paling penting tepat sasaran.

“Jika nanti mendapat stimulus ini saya minta Bupati dan Walikota dilaksanakan dengan akuntabel, efisien, efektif dan tepat sasaran, jadi harus kena di masyarakat,” tegasnya saat menerima Walikota Lubuklinggau Rachmat Hidayat dan Bupati Banyuasin Askolani Jasi.

Menurut Herman Deru besaran nilai Bangubsus tergantung dari apa yang dipaparkan, untuk selanjutnya ditelaah dari tim verifikasi khusus penyaluran bangubsus.

“Pak Bupati dan Pak Walikota, didalam



tahun anggaran 2025.

“Tujuan kita sama bapak Gubernur, semua berdasarkan asas kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Terimakasih banyak semoga apa yang disampaikan tadi, Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Pagar Alam dapat bersinergi, berkolaborasi untuk pembangunan kota Pagaralam lebih menggeliat lagi,” tandasnya.

Manfaatkan Dana Bangubsus Tepat Sasaran

Herman Deru menegaskan bantuan yang diberikan kepada kabupaten/ kota

menentukan berapa nilai bantuan sangat tergantung pada apa yang dipaparkan. Jadi masing-masing kepala daerah memang harus melakukan paparan tentang apa-apa saja yang menjadi prioritas di daerah itu, Kemudian akan ditelaah dalam tim verifikasi,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Walikota Lubuklinggau, Rachmat Hidayat memaparkan tentang usulan program kegiatan melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). Diungkapkannya, BKBK yang diajukan ini terutama ditujukan untuk pembangunan infrastruktur Lubuk Linggau. ●ADV



ERATKAN SILATURAHMI, HDCU GELAR OPEN HOUSE HARI RAYA

Usai menunaikan salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang, Gubernur H Herman Deru dan Wakil Gubernur (Wagub) H Cik Ujang (HDCU) menggelar open house di rumah dinas masing-masing.

Puluhan pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel berbaur dengan warga yang telah mengantri sejak dari pagi hari. Mereka mendatangi Griya Agung rumah dinas Gubernur untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri sekaligus bermaaf-maafan dalam rangka menguatkan jalinan tali silaturahmi.

Di kesempatan itu Wagub Cik Ujang bersama istri Lidyawati dan keluarga juga bersalaman dengan Gubernur Herman Deru dan Ketua TP PKK Sumsel Hj Febrita Lustia HD dan keluarga. Selain itu juga ada Sekda Sumsel Edward Candra dan istri yang juga diikuti pejabat dan masyarakat yang datang secara bergelombang ke Griya Agung.

Wagub Cik Ujang berharap, dapat menjadi ajang mempererat silaturahmi dengan masyarakat Sumsel. Ia menekankan pentingnya menjaga silaturahmi di momen Idul Fitri, sebagai wujud kebersamaan dan persatuan dalam membangun daerah.

"Semoga silaturahmi ini semakin mempererat hubungan antarumat beragama dan semua elemen masyarakat.

Kami berharap kedepan kita bisa terus bekerja sama untuk memajukan Provinsi Sumsel yang lebih baik," katanya.

Berbagai lapisan masyarakat terus berdatangan untuk halal bihalal pada open house yang digelar Gubernur Herman Deru dan keluarga dipenuhi warga sejak pagi hingga petang, mulai dari masyarakat umum, driver ojek online, penyapu jalan, bahkan masyarakat lintas agama.

Senyum bahagia tampak terpancar dari wajah masyarakat yang disambut hangat dan penuh kekeluargaan oleh Gubernur Herman Deru.

Rangkaian open house diisi dengan ber-salam-salaman, foto bersama, dan menci-cipi makanan yang telah disediakan.

Masyarakat begitu bahagia dapat bertemu dengan orang nomor satu di Sumsel tersebut. Kedekatan Gubernur Sumsel Herman Deru dengan wong cilik memang bukan hal baru.

Selain petugas kebersihan sejumlah organisasi kemasyarakatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumsel juga tampak hadir. Termasuk Ketua FKUB Sumsel, Mal'An Abdullah

Drs. H. Mal'an Abdullah, Uskup Agung Palembang, Mgr Yohanes Harun Yuwono,

Gubernur Herman Deru didampingi Ketua TP PKK Sumsel Hj. Feby Deru mengatakan bersyukur sekali karena masyarakat Sumsel dapat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan begitu meriah. Terlebih keamanan dan kenyamanan masyarakat selama ibadah puasa Ramadhan dan shalat Idul Fitri tetap terjaga dengan baik.

Ia mengaku gembira karena masyarakat banyak yang hadir baik penduduk tetap maupun pendatang yang antusias datang ke Griya Agung untuk bersilaturahmi. Semua kalangan hadir bersilaturahmi dari penyapu jalan hingga masyarakat umum lainnya.

"Terimakasih banyak yang hadir, semua umat dari semua agama datang mengucapkan selamat Lebaran. Bersilaturahmi dengan suasana yang hangat, ini tradisi yang wajib kita pertahankan," ujarnya.

Halal Bihalal di Kampung Halaman
Gubernur Herman Deru sekeluarga

besar juga melakukan silaturahmi dan halal bihalal dalam rangka hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di tanah kelahirannya Desa Sidomulyo Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT).

Dalam silaturahmi yang dihadiri ribuan warga dari berbagai lapisan masyarakat tersebut penuh dengan nuansa kekeluargaan. Gubernur Herman Deru dalam arahan singkatnya menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1446 hijriah.

"Alhamdulillah silaturahmi kita tidak putus, untuk mempererat silaturahmi Saya ajak semua keluarga anak cucu teman-teman untuk berkumpul di kesempatan yang baik ini dalam perayaan idul fitri ini. Saya secara pribadi atas nama pribadi, pemerintah dan keluarga besar menyampaikan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin," ucapnya.

Dikatakan, dirinya bersyukur bisa bertemu dengan warga OKU Timur di suasana penuh keakraban, dirinya terus berupaya menjaga tali silaturahmi dengan kondisi apapun dan dimanapun.

"Saya tetap mohon doa dukungan, agar pemerintahan ini berjalan dengan baik. Saya akan berupaya menjalankan pembangunan dan melayani masyarakat Sumatera Selatan," imbuhnya.

Herman Deru juga mengingatkan seluruh masyarakat yang hadir untuk senantiasa bersyukur. Terlebih di momen hari raya ini dimanfaatkan untuk saling memaafkan guna mengeratkan silaturahmi.

"Kita dituntut untuk menjadi manusia yang bersyukur. Apalagi momen bahagia seperti ini.

Tali silaturahmi harus kita jaga," harapnya.

Dalam kesempatan ini Herman Deru mengingatkan masyarakat untuk bersikap empati dan peduli dengan orang lain

"Kita jangan terjebak sikap individualisme, mengabaikan silaturahmi. Kita bisa seperti ini karena ada peran orang lain," imbuhnya.

Masyarakat OKU Timur diinginkannya untuk lebih bersyukur dengan segala prestasi yang telah didapatkan selama ini. OKU Timur sebagai daerah pemekaran

bisa menjadi kabupaten yang dikenal dengan segala prestasinya.

Halal Bihalal dengan Warga Lahat

Wagub Cik Ujang bersama keluarga juga pulang kampung ke Desa Bandar Jaya Kabupaten Lahat. Momen tersebut dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dan halal bihalal dengan warga Lahat di kediamannya di Gang. Sidodadi, Bandar Jaya, Kecamatan Lahat.

Dalam kesempatan Wagub Cik Ujang didampingi sang istri Lidyawati Cik Ujang terlihat antusias menyambut kedatangan masyarakat. Mereka disambut dan disalami satu persatu, bahkan Wagub juga melayani masyarakat untuk berfoto bersama.

Cik Ujang berharap kegiatan halal bi halal ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Pemprov Sumsel dengan masyarakat.

Mengingat, open house ini menjadi momen penuh berkah untuk saling ber-

tukar doa dan harapan agar Provinsi Sumsel semakin maju dan sejahtera.

"Kami mohon doa untuk Herman Deru dan keluarga serta Cik Ujang dan keluarga dapat memimpin Provinsi Sumsel yang kita cintai ini bisa berjalan lancar tidak ada halangan, kita kompak semua pembangunan berjalan lancar dan semua masyarakat sejahtera," tuturnya.

Cik Ujang menilai silaturahmi banyak mendatangkan manfaat. Salah satunya menguatkan hubungan antar satu manusia dengan yang lain atau hablumminannas, memperpanjang umur, dan memperlancar rezeki.

"Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat dan sekitarnya, Alhamdulillah kita diberikan kesehatan untuk bersilaturahmi halal bi halal dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kita manfaatkan untuk bersalaman, bermaafan. Atas nama Cik Ujang dan keluarga kami mengucapkan minal aidin wal faidzin mohon maaf lahir dan batin," tandasnya. ●



HDCU AJAK SATUKAN TEKAD SUKSESkan SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru dan Wakil Gubernur H Cik Ujang atau HDCU mengajak semua kalangan, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersama-sama satu tekad menyukseskan Sumsel Maju Terus Untuk Semua.

Penyatuan tekad ini dilakukan saat HDCU bersama Sekretaris Daerah H Edward Candra memberikan pengarahan bagi kalangan Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III, seluruh Pejabat Eselon IV dipusatkan di Griya Agung Palembang.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Herman Deru mengajak kalangan pejabat eselon dan seluruh ASN dilingkungan Pemprov Sumsel untuk menyatukan tekad dalam mensukseskan visi misi Sumsel Maju Terus Untuk Semua.

Herman Deru mengungkapkan di periode kedua (2025-2030) kepemimpinannya sebagai Gubernur Sumsel, dirinya ingin meninggalkan Legacy yang berdampak yang berkelanjutan bagi kemajuan Provinsi Sumsel ke depan. Untuk itu dia butuh kerjasama yang baik dengan berbagai jajaran.

"Saya butuh legacy terbaik bagi Sumsel yang tidak mungkin saya lakukan sendiri. Saya membutuhkan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan legacy ini bagi Sumsel," tegasnya.

Menurut Herman Deru hal itu sesuai

dengan visi Sumsel Terus Maju Untuk Semua, di mana salah satu visi tersebut adalah Pemerataan Pembangunan, dalam hal ini infrastruktur. Namun pembangunan infrastruktur ini bukan terkait masalah pembangunan jalan saja.

"Saya nantinya akan melakukan evaluasi per semester. Segera nanti saya juga akan kumpulkan instansi vertikal untuk sinkronisasi dengan OPD Sumsel," terangnya.

Herman Deru menginstruksikan OPD segera mempelajari kembali peta (data) tentang permasalahan dari nomenklatur dan tupoksi yang diaman oleh OPD masing-masing.

Diungkapkan Herman Deru, dia sudah merasakan memimpin Sumsel dalam masa 5 tahun lalu. Dia juga tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing OPD.

"Bahkan, saya juga sempat melakukan penilaian dalam kapasitas saya sebagai masyarakat, karena dalam kurun waktu 1,5 tahun saya berada di luar pemerintahan. Saya memantau secara obyektif, melihat kinerja masing-masing OPD.



Tentang kebijakan pemprov terhadap laju pembangunan, lajunya sistem dan lajunya pelayanan kepada masyarakat," imbuhnya.

Apel Gabungan dan Halal Bihalal

Sebelumnya Wakil Gubernur (Wagub) H Cik Ujang memimpin apel gabungan dan halal bihalal bersama ratusan ASN dan Non ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel di hari pertama masuk kerja pasca libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sumsel Jalan A. Rivai Palembang.

Apel gabungan ini juga dihadiri langsung dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, para Asisten, dan Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta seluruh ASN di lingkup Pemprov Sumsel.

Wagub Cik Ujang mengapresiasi seluruh ASN yang tetap bertugas, melayani masyarakat saat libur hari raya Idul Fitri. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti apel gabungan.

"Atas nama Wakil Gubernur, pribadi dan keluarga, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amalan ibadah kita selama Ramadhan diterima oleh Allah SWT, dan semoga semangat Idul Fitri membawa kita kembali kepada hati yang jernih, semangat yang baru, serta komitmen yang kuat untuk memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," katanya

Menurut Cik Ujang, Idul Fitri adalah momentum kembali ke kesucian, ke ketulusan niat, dan ke semangat awal pengabdian.

Untuk itu ia mengajak seluruh OPD dan jajaran menjadikan momen ini sebagai titik tolak untuk memulai kembali perjalanan tugas dengan semangat yang lebih besar, niat yang lebih lurus, dan dengan komitmen yang lebih kuat untuk memajukan daerah ini.

"Kita harus terus memperkuat sinergi dan kolaborasi, baik di internal pemerintahan maupun dengan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Saya himbau juga OPD terkait untuk siap sia-

ga bilamana di beberapa daerah terjadi banjir bandang maupun longdong, supaya kita cepat beraksi menyelesaikan permasalahan, sehingga masyarakat aman dan damai, karena Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur ini sudah dinantikan oleh masyarakat untuk kegiatan pembangunan di provinsi Sumsel," tegas.

Cik Ujang juga menghimbau para ASN tetap disiplin dan menjalankan tugas melayani masyarakat secara optimal pasca libur lebaran ini.

"Hari ini kita kembali melaksanakan tugas, berikan pelayanan terbaik kepada

apel pagi bersama di Kantor Gubernur.

"Di hari pertama masuk kerja ASN Pemprov Sumsel dilakukan Apel bersama di Kantor Gubernur Sumsel yang diikuti oleh jajaran Pemprov Sumsel. Apel tadi juga bagian dari pengecekan karena absensi sekaligus sidak di cek lapangan," ungkap Sekda.

Sekda Edward Candra juga mengatakan, selain apel bersama yang dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) H Cik Ujang, juga dilakukan pengarahan Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wagub Cik Ujang kepada para pejabat eselon di lingkup Pemprov Sumsel.



masyarakat dan tetap menjaga disiplin," tandasnya.

Sementara Sekda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra memastikan di hari pertama masuk kerja pasca libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 hijriah, para Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel sudah aktif bekerja seperti biasa diawali dengan

"Tadi apel pagi juga penuh serta ada juga pengarahan pak Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Eselon II, III dan IV, semuanya hadir," ucapnya.

Edward menyebutkan di hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran Idul Fitri para ASN sudah mulai bekerja 99 persen aktif seperti biasa dengan melayani masyarakat. Bahkan para ASN ini semuanya semangat bekerja. ●



KOMPENSASI SOPIR ANGKOT DIDUGA DISUNAT TAK WAJAR

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyalurkan dana kompensasi kepada 1.322 sopir angkot di kawasan Puncak, Bogor, sebesar Rp 1,5 juta. Bantuan tersebut terdiri dari Rp 1 juta dalam bentuk uang tunai dan Rp 500 ribu berupa paket sembako.

Selain itu, kompensasi juga diberikan kepada 463 pengemudi becak di Garut, Cirebon, dan Subang, serta 782 pengemudi delman di Garut, Tasikmalaya, dan Bandung Barat.

Program ini bertujuan untuk membatasi operasional angkutan selama masa Idul Fitri dan libur Lebaran demi mengurangi kemacetan, khususnya di jalur wisata Puncak.

Namun, muncul dugaan bahwa dana kompensasi untuk sopir angkot di Puncak dipotong sebesar Rp 200 ribu oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Sejumlah sopir mengaku terpaksa tetap beroperasi karena uang kompensasi yang mereka terima harus dibagi dengan pemilik angkot serta "diwajibkan" menyektor ke KKSU, Organda, dan Dinas Perhubungan setempat.

Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan mengusut tuntas dugaan pemotongan dana tersebut. Ia menyebut pemotongan Rp 200 ribu sangat merugikan sopir dan keluarganya, apalagi jika dihitung bisa mencukupi kebutuhan makan selama empat hari.

"Alasan sumbangan sukarela tidak bisa diterima. Uangnya sudah dikembalikan pun, proses hukum tetap berjalan. Saya tidak suka praktik premanisme berkedok pungutan," tegas Dedi, Minggu, 6 April 2025.

Dedi Mulyadi menyatakan sikap tegas terkait insiden p e - mo-

tongan dana kompensasi untuk sopir angkot di Kabupaten Bogor. Dalam pernyataan yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, pada Sabtu 5 April 2025, Dedi menilai tindakan pemotongan tersebut sebagai bentuk premanisme yang tidak dapat dibenarkan.

Meski dana yang sebelumnya dipotong sebesar Rp200 ribu dari total kompensasi Rp1 juta per sopir telah dikembalikan, Dedi menegaskan bahwa hal itu tidak menghapus pelangga-

ran moral dan etika yang telah terjadi.

"Ini bentuk premanisme, bahkan jika dilakukan oleh orang berseragam atau yang mengatasnamakan organisasi resmi," ujar pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, KDM mengambil inisiatif untuk langsung mengganti uang yang sempat dipotong kepada para sopir. Ia juga menolak keras dalih "sumbangan sukarela" yang digunakan sebagai pembenaran atas pemotongan dana tersebut.

"Saya tidak suka uang kecil dipotong. Saya tidak suka segala bentuk yang menyerupai premanisme," tegasnya.

Dedi pun menyoroti bahwa nominal Rp200 ribu bukanlah jumlah kecil bagi sopir angkot, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca-Lebaran. Dengan estimasi pengeluaran makan sekitar Rp50 ribu per hari, uang tersebut setidaknya bisa mencukupi kebutuhan keluarga selama empat hari.

Langkah yang diambil Dedi ini mencerminkan empati dan keberpihakan kepada masyarakat kelas pekerja, yang menurutnya merupakan elemen vital dalam sistem transportasi daerah.



Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor akhirnya angkat bicara soal dua kasus pungutan liar (pungli) yang viral di media sosial. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut.

"Terkait pungutan hari raya dari oknum kepala desa, maupun pemotongan insentif sopir angkot, kami Pemkab Bogor mohon maaf atas ketidaknyamanan ini," ujar Rudy.

Rudy Susmanto juga menegaskan akan bertindak tegas terhadap pegawai pemerintah daerah yang terlibat.

"Kalau ada oknum pegawai terlibat,



Ini bentuk premanisme, bahkan jika dilakukan oleh orang berseragam atau yang mengatasnamakan organisasi resmi.

saya akan copot dan pecat. Ini mencoreng nama baik Pemkab Bogor," kata Rudy.

Menanggapi kasus ini, Pemkab Bogor bersama kepolisian dan kejaksaan langsung membentuk tim siber pungli yang saat ini sudah mulai bekerja sejak Kamis 3 April 2025. Tim ini terdiri dari aparat pemda, Polres Bogor, dan pihak Kejaksaan.

"Kami sudah membentuk tim yang bekerja dalam satu minggu ini. Hasil investigasi akan segera kami sampaikan secara terbuka," tegas Rudy.

Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro menyebut tim telah memeriksa sembilan saksi terkait pemotongan dana kompensasi sopir angkot di kawasan Puncak dan permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh oknum kepala desa.

Mereka yang diperiksa termasuk empat oknum kepala desa, seorang pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, serta beberapa pengurus organisasi angkot.

"Saksi-saksi sudah kami periksa leng-

kap dengan barang bukti. Kami mohon dukungan publik untuk terus mengawasi," ujar Rio.

Di sisi lain, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor membantah adanya pemotongan dana. Menurut Kabid Lalu Lintas Dishub Bogor, Dadang Kosasih, yang terjadi hanyalah pemberian sukarela dari sopir kepada koperasi, dan uang tersebut telah dikembalikan selu-

paksaan dalam pemberian uang tersebut.

Para sopir awalnya secara sukarela menyerahkan uang kepada KKSU.

"Tadinya sopir memberikan seikhlasnya ke KKSU, tetapi kemudian berkembang, ada pemotongan Rp 200.000," kata Dadang.

"Terkait informasi yang di luar yang simpang siur dalam artian dari mulai



ruhnya.

"Ini hanya miskomunikasi. Sopir memberi dengan sukarela, mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu. Tapi karena muncul tuduhan pemotongan, seluruh uang itu senilai Rp 11,2 juta sudah kami kembalikan," ujar Dadang.

Sebelumnya kepada awak media, Dadang juga menjelaskan bahwa tidak ada pemotongan uang kompensasi sopir angkot, melainkan bentuk keikhlasan dari para sopir sendiri. Dadang menyebut bahwa tidak ada

Organda, Dishub, dengan KKSU, dan pemilik kendaraan kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin di sampaikan ke Gubernur itu sama sekali tidak benar. Hal ini karena mis komunikasi," ujarnya.

Dishub mengklaim telah menuntaskan persoalan tersebut dengan membantu proses pengembalian uang yang sempat dipotong. Total dana sebesar Rp 11,2 juta yang sebelumnya dikumpulkan dari para sopir telah dikembalikan sepenuhnya. ●

GEBRAKAN BARU! DEDI MULYADI SIAPKAN ANGKOT WISATA KHAS DAERAH DI JAWA BARAT

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menyiapkan inovasi baru dalam sektor transportasi daerah. Dalam waktu dekat, angkot-angkot yang selama ini jadi andalan mobilitas warga akan dirombak menjadi angkutan wisata yang unik dan mencerminkan kekhasan tiap wilayah di Jawa Barat.

“**P**emprov Jabar sedang merancang konsep angkutan yang disesuaikan dengan karakter wilayah dan nuansa wisatanya,” ungkap Dedi dalam unggahan di media sosial, dikutip Sabtu 5 April 2025.

Dedi menuturkan bahwa konsep ini bukan sekadar moda transportasi, melainkan sebuah pengalaman baru bagi masyarakat dan wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan Jawa Barat.

Rancangannya akan menonjolkan kenyamanan, keamanan, sekaligus menggali potensi budaya dan alam lokal.

“Nantinya, setiap daerah akan memiliki angkutan yang merepresentasikan kekayaan wisata dan lingkungan setempat,” ujarnya.

Program ini juga diharapkan bisa mendongkrak perekonomian daerah dan menghidupkan kembali peran angkot, yang dalam beberapa tahun terakhir mulai tersisih oleh kehadiran transportasi berbasis aplikasi.

Peluncuran resmi program angkutan wisata ini direncanakan dalam waktu dekat.

“Tunggu saja, sebentar lagi bisa langsung dinikmati masyarakat,” tutup Dedi penuh optimisme.

Sedangkan Pada musim libur Lebaran 2025, kemacetan panjang kembali terjadi di sejumlah kawasan wisata populer di Jawa Barat, khususnya di Ciwidey, Kabupaten Bandung, dan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dedi Mulyadi, mengakui bahwa arus lalu lintas di dua kawasan tersebut belum bisa sepenuhnya dikendalikan, meski upaya pengendalian sudah mulai dilakukan di daerah lain.

Dedi menyebutkan bahwa pihaknya belum mengambil kebijakan untuk meliburkan angkutan umum di wilayah

Ciwidey dan Lembang, berbeda dengan kawasan Puncak dan Cipanas yang sudah menerapkan kebijakan serupa.

“Memang masih terjadi di Ciwidey

(macet), karena memang di daerah itu saya tidak membuat kebijakan (meliburkan angkot),” ujar Dedi.

Menurutnya, langkah peliburan angkutan umum seperti angkot, becak,



ojek, dan delman pada momen libur panjang terbukti efektif mengurangi kemacetan, terutama di kawasan Puncak dan Cipanas.

Oleh karena itu, ia kini mempertimbangkan kebijakan serupa untuk diterapkan di Ciwidey dan Lembang pada libur-libur besar mendatang.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Dedi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak kemacetan selama musim mudik dan libur tahun ini. Ia berjanji akan segera mengevaluasi situasi dan menyiapkan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Mohon maaf atas kekurangan kami sebagai pimpinan masyarakat Jabar, seluruh wisatawan dan para pemudik yang melewati jalur di Jabar," ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk memberikan kompensasi kepada para pengemudi angkot, tukang becak, ojek, dan kusir delman yang akan diliburkan.

Dedi menegaskan bahwa kompensasi itu penting agar kebijakan peliburan dapat dijalankan tanpa memberatkan para pelaku transportasi informal.

Dedi juga membuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, termasuk perbankan, untuk mendukung program ini.

"Mungkin Bank Jabar Peduli bisa memberikan supporting. Kita sedang menghitung berapa pembiayaan setiap tahun, dan pasti juga banyak pihak yang akan membantu," jelasnya.

Keberhasilan menekan kemacetan di kawasan Puncak dan Cipanas dijadikan sebagai model awal. Dedi mengapresiasi para sopir angkot dan pengemudi lainnya yang sudah patuh pada kebijakan yang diterapkan.

"Terima kasih pada ketaatan sopir angkot di jalur Puncak dan Cipanas yang berani tinggal di rumah saat libur. Itu sangat membantu," katanya.

Meski demikian, Dedi menyadari bahwa penanganan kemacetan di wilayah Bandung Raya memerlukan waktu dan pendekatan yang menyeluruh. Ia menyebut masa kerjanya sebagai gubernur baru efektif berjalan 20 hari, sehingga dibutuhkan waktu dan sinergi antar lembaga untuk mencipta-

kan perubahan yang signifikan.

Sementara Polda Jawa Barat mengungkapkan bahwa kunjungan wisatawan ke sejumlah kawasan wisata di Jawa Barat pada libur Lebaran tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan.

Penurunan ini terlihat dari pantauan arus lalu lintas di tiga lokasi wisata utama, yakni Lembang, Puncak Bogor, dan Pantai Pangandaran. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Kombes Dodi

serupa juga terjadi di kawasan wisata pantai selatan Jawa Barat, seperti Pangandaran dan Sukabumi.

"Kunjungan ke Pangandaran dan Palabuhan Ratu memang sempat padat, tapi hari ini sudah terurai," ucap Dodi.

Dodi memprediksi bahwa puncak kunjungan wisatawan telah terjadi pada H+2, sehingga pada H+3 ini angka kunjungan cenderung lebih landai dan perlahan menurun hingga arus ba-



Darjanto, menyatakan bahwa kepadatan kunjungan wisata pada tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tren kunjungan di libur Lebaran itu justru padat tahun lalu. Misalnya di Puncak, kemarin saya cek itu cuma 30 ribuan kendaraan. Tahun sebelumnya, itu sekitar 100 ribu sampai 120 ribuan kendaraan," ujar Dodi.

Di kawasan Lembang, katanya, penurunan kunjungan juga terlihat jelas.

Dodi menjelaskan bahwa jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan wisata Lembang lebih sedikit dibandingkan libur Lebaran tahun lalu. Kondisi

lik selesai.

"Puncak kunjungan wisatawan terjadi dari kemarin, ya. Diprediksi sampai lusa itu akan masih banyak yang liburan," kata Dodi.

Untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan kunjungan wisata yang tidak terduga di titik-titik kawasan wisata, pihak kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan.

"Manajemen rekayasa bisa dengan oneway lalu kanalisasi. Diterapkan secara situasional kalau terjadi peningkatan kunjungan, seperti di Lembang ini," tandasnya. ●

Tingkatkan Kesehatan Ibu Hamil PEMROV JATIM DORONG PEMANFAATAN APLIKASI E-DETIK DAN BUAIAN

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia yang jatuh pada 7 April, Gubernur Jawa Timur Khoffah Indar Parawansa mengajak masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk memanfaatkan dua aplikasi inovatif milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yakni elektronik Deteksi Risiko Tinggi Ibu Hamil (e-Detik) dan Bunda Anak Impian (BUAIAN).

“Melalui aplikasi e-Detik dan BUAIAN, ibu hamil kini bisa melakukan deteksi dini terhadap risiko kehamilan secara mandiri. Ini sangat penting, mengingat data WHO menunjukkan hampir 300 ribu ibu meninggal setiap tahun akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan,” ujar Khoffah di Surabaya, Senin 7 April 2025.

Aplikasi e-Detik merupakan terobosan yang dirancang untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) di Jawa Timur.

Dengan e-Detik, ibu hamil dapat memantau kondisi kehamilannya secara mandiri, mengisi data terkait gejala yang dialami, dan mendapatkan pemantauan dari tenaga kesehatan maupun kader

pendamping.

“Hingga saat ini, sebanyak 1.026 ibu hamil telah menggunakan e-Detik. Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen teridentifikasi memiliki risiko tinggi. Keluhan yang paling umum adalah batuk, nyeri dada, dan kecemasan,” jelas Khoffah.

Sementara itu, aplikasi BUAIAN ditujukan untuk skrining awal bagi ibu hamil serta pasangan usia subur yang sedang merencanakan kehamilan. Aplikasi ini berguna untuk mendeteksi potensi risiko sejak dini agar dapat segera ditindaklanjuti oleh fasilitas kesehatan.

“Pengguna aplikasi BUAIAN telah mencapai 6.713 orang, dan 26,5 persen dari mereka terdeteksi berisiko tinggi. Risiko paling dominan adalah berat badan yang kurang ideal,” tambahnya.

Khoffah menegaskan bahwa penurunan AKI tetap menjadi prioritas penting di Jawa Timur. Pada tahun 2024, AKI tercatat sebesar 82,56 per 100.000 kelahiran hidup, menurun dari angka tahun sebelumnya sebesar 93,73 dan telah berada di bawah target provinsi yang ditetapkan pada 93,34.

“Meski sudah menurun, kita tidak boleh lengah. Inovasi seperti e-Detik dan BUAIAN merupakan bagian dari strategi Pemrov Jatim untuk terus memperkuat sistem layanan kesehatan ibu dan anak,” tegasnya.

Ibu hamil juga berhak mendapatkan layanan pemeriksaan kehamilan minimal enam kali, termasuk dua kali pemeriksaan USG oleh dokter, yang seluruhnya ditanggung oleh BPJS Kes-



ehatan.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menyediakan fasilitas rujukan ke rumah sakit untuk kehamilan berisiko tinggi, serta layanan kunjungan pascapersalinan (nifas) yang juga ditanggung oleh BPJS.

“Inovasi-inovasi ini kami harapkan dapat meningkatkan deteksi dini dan penanganan tepat terhadap kehamilan berisiko, sehingga komplikasi bisa dicegah sejak awal,” jelas Khofifah.

Lebih jauh, Khofifah menekankan pentingnya dukungan penuh terhadap ibu hamil, baik secara fisik maupun emosional. Menurutnya, ibu merupakan fondasi utama dalam membentuk keluarga dan masyarakat yang sehat.

“Al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka menjaga kesehatan ibu adalah fondasi untuk menciptakan generasi masa depan yang tangguh,” ujarnya.

Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Jawa Timur yang sehat dan mendukung para ibu dalam menjalani kehamilan dan persalinan yang aman.

“Semoga langkah ini menjadi bagian dari terwujudnya Jatim Sehat, salah satu prioritas utama dalam Nawa Bhakti Satya. Mari kita doakan semua ibu di dunia menjalani kehamilan yang sehat dan

selamat,” pungkasnya.

Diketahui, aplikasi e-Detik diluncurkan pada 2024 sebagai salah satu inovasi terbaru dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi di Jawa Timur.

Peluncuran ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, mengingat tingginya angka kematian ibu dan bayi masih menjadi perhatian serius di Indonesia.

Kepala Dinkes Jatim, Erwin Astha Triyono menerangkan, aplikasi e-Detik dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu hamil, dalam memantau perkembangan kondisi kehamilannya, terutama bagi mereka yang masuk dalam kategori risiko tinggi.

Dengan menggunakan aplikasi ini, ibu hamil dapat secara mandiri mengetahui kondisi kesehatannya setiap minggu, tanpa harus sering bolak-balik ke fasilitas

kesehatan.

Mekanisme Kerja Aplikasi e-Detik

Aplikasi e-Detik bekerja dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada pengguna terkait kondisi kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian diolah oleh sistem untuk menghasilkan penilaian risiko kehamilan.

Hasil penilaian akan ditampilkan dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pengguna, lengkap dengan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan.

Dengan adanya inovasi aplikasi e-Detik, diharapkan angka kematian ibu dan bayi di Jawa Timur dapat terus menurun.

Selain itu, aplikasi ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk mengembangkan inovasi serupa dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. ●





TARIF BARU AS, TANTANGAN EKONOMI BAGI SUMATERA UTARA

Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk kembali menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk asing bukan sekadar urusan dagang antara Washington dan Beijing. Langkah proteksionis ini, yang diklaim demi melindungi industri dalam negeri dan memperkecil defisit perdagangan, telah memicu efek domino ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia.

Salah satu wilayah yang harus bersiap menghadapi dampaknya adalah Sumatera Utara, provinsi andalan ekspor nonmigas yang ekonominya sangat bergantung pada komoditas seperti kelapa sawit, karet, dan kopi.

Di tengah proses hilirisasi yang belum sepenuhnya matang, gelombang proteksionisme global ini bisa menguncang stabilitas ekonomi daerah.

Dr Aryanto Tinambunan MSI, dosen tidak tetap FEB Unika Santo Thomas mengatakan, tarif baru yang diberlakukan AS menyasar berbagai sektor, dari logam dan komponen kendaraan hingga produk pertanian.

"Negara-negara Asia seperti Tiongkok, Vietnam, dan Thailand menjadi sasaran utama. Namun, di era rantai pasok global yang saling terhubung, kebijakan semacam ini tak berhenti pada negara target. Imbasnya bisa menjalar ke negara lain yang tak masuk daftar sasaran langsung, termasuk Indonesia," jelasnya.

Ketika produk dari negara terdampak dialihkan ke pasar alternatif, persaingan global pun semakin ketat. Indonesia, yang selama ini menikmati akses relatif stabil ke pasar Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan, kini harus menghadapi tekanan tambahan dari membanjirnya produk-produk pesaing.

Dijelaskan Aryanto yang juga Pengurus ISKA Sumut, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor nonmigas Sumatera Utara pada 2024 mencapai lebih dari USD 7 miliar.

"Kontributor utamanya adalah kelapa sawit dan turunannya, disusul karet, kopi, teh, gambir, dan hasil olahan perikanan. Negara tujuan ekspor utama meliputi India, Tiongkok, Belanda, Malaysia, dan Amerika Serikat," katanya.

Namun sejak pertengahan 2024, para pelaku usaha terutama di sektor agribisnis dan industri pengolahan sudah mulai merasakan tekanan. Kompetisi kian ketat, harga produk cenderung menurun, dan fluktuasi nilai tukar mempersempit margin keuntungan.

Ketika produk dari negara pesaing membanjiri pasar global karena ditolak oleh AS, harga komoditas turun. Petani sawit di Labuhanbatu, Asahan, dan Simalungun kini mulai merasakan dampaknya lewat turunnya harga beli pabrik.

“Menurunnya ekspor dan harga komoditas memengaruhi pendapatan petani dan industri, yang pada gilirannya memperlambat konsumsi rumah tangga komponen utama penggerak ekonomi lokal. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” bebernya.

Selain itu, pelemahan ekspor turut menekan neraca perdagangan nasional. Ketika defisit berjalan melebar, tekanan terhadap nilai tukar rupiah meningkat.

Dengan dolar AS yang kini sudah menembus angka Rp17.000, harga barang impor mulai dari pupuk, BBM, hingga alat pertanian ikut naik. Di Sumatera Utara, yang masih sangat tergantung pada impor barang penunjang industri, risiko inflasi pun membayangi.

Inflasi yang tinggi akan menjadi beban ganda, bukan hanya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah.

Sementara, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut mengungkapkan sejumlah dampak serius dari kebijakan tarif perdagangan AS terhadap ekspor karet alam dari wilayah tersebut.

Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, menyatakan bahwa efek paling nyata akan dirasakan karena AS merupakan tujuan ekspor karet terbesar kedua bagi Sumut setelah Jepang pada tahun 2024, dengan kontribusi sebesar 20,11% terhadap total ekspor.

“Dengan pangsa ekspor ke AS mencapai 20,11%, kebijakan tarif yang diberlakukan dapat memicu penurunan volume ekspor secara signifikan dan memengaruhi kelangsungan industri karet di Sumatera Utara,” ujar Edy pada Sabtu, 5 April 2025.

Edy memaparkan sedikitnya lima dampak utama dari kebijakan tarif dagang AS terhadap ekspor karet dari

Sumut yakni, penurunan volume ekspor. Pengenaan tarif impor membuat harga karet asal Sumut menjadi kurang kompetitif di pasar AS dibandingkan produk dari negara lain yang menikmati tarif lebih rendah.

Akibatnya, importir di AS kemungkinan besar akan beralih ke pemasok alternatif, sehingga volume ekspor dari Sumut terancam menyusut.

“Selanjutnya, ketidakpastian strategi ekspor. Perubahan tarif yang kerap terjadi menciptakan ketidakpastian bagi eksportir. Hal ini menyulitkan pelaku usaha untuk menyusun strategi ekspor jangka panjang, sekaligus mem-

Gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya produksi. Kebijakan terbaru dari pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan mengacaukan rantai pasokan global, termasuk bahan baku dan logistik.

Edy menambahkan bahwa hal ini dapat meningkatkan biaya produksi serta memperketat persaingan akibat melimpahnya produk dari negara lain yang juga mencari pasar alternatif.

Fluktuasi nilai tukar rupiah. Pergeseran nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS turut memengaruhi biaya produksi dan ekspor.

“Pelemahan Rupiah meningkatkan



buat mereka lebih rentan terhadap kerugian akibat fluktuasi harga dan permintaan,” jelasnya.

Dampak langsung ke petani dan industri lokal. Sebagai salah satu produsen karet terbesar di Indonesia, penurunan ekspor berpotensi menekan harga karet di tingkat petani. Ini tentu berdampak pada kesejahteraan petani serta kelangsungan industri pengolahan karet di Sumut.

biaya produksi domestik, sementara penguatan Rupiah membuat ekspor menjadi lebih mahal dan mengurangi daya saing karet Sumut di pasar internasional,” sambungnya.

Gapkindo berharap pemerintah dapat mengambil langkah strategis guna mengantisipasi dampak jangka panjang dari kebijakan dagang AS ini terhadap industri karet nasional, khususnya di Sumatera Utara. ●

LULUSAN SD DI JAKARTA BISA MENDAFTAR JADI PETUGAS PASUKAN ORANYE

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi mengubah sejumlah ketentuan dalam rekrutmen dan evaluasi kerja petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau yang lebih dikenal dengan pasukan oranye.

Salah satu perubahan besar adalah dibukanya peluang bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk mendaftar sebagai petugas PPSU.

“Saya sudah tanda tangani Peraturan Gubernur (Pergub)-nya. Evaluasi kerja PPSU sekarang dilakukan setiap tiga tahun, bukan lagi setiap tahun,” ujar Pram dalam keterangannya di Jakarta, Senin 31 Maret 2025.

Pram menegaskan, kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian kerja yang lebih baik bagi para petugas PPSU yang rajin dan berdedikasi. Dengan masa evaluasi yang lebih panjang, mereka tak perlu lagi cemas

menghadapi penilaian kontrak tiap tahun.

Tak hanya itu, Pram juga membuka wacana untuk merevisi batas usia maksimal petugas PPSU yang saat ini ditetapkan 56 tahun. Namun, perubahan tersebut masih dalam tahap kajian karena terkait dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Kalau saya, yang penting bisa bacatulis, mau kerja, dan mampu kerja. Usia bukan soal besar. Saya sendiri umur 62 masih rutin sepedaan,” seloroh Pram.

Terkait perlindungan jaminan sosial bagi PPSU setelah pensiun, Pram mengakui belum ada sistem yang mengaturnya secara khusus. Menurutnya, perlu ada revisi Perda dan kajian lebih lanjut untuk mewujudkan perlindungan tersebut.

Di sisi lain, perubahan syarat rekrutmen PPSU mendapat sorotan dari anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan. Ia mengkhawatirkan bahwa pembukaan lowongan bagi lulusan SD bisa menurunkan semangat masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

“Bisa saja warga merasa cukup lulus SD karena sudah ada peluang kerja, ini bisa mengancam semangat wajib belajar 12 tahun,” ujarnya pada Minggu 6 April 2025.

August, yang berasal dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk bersaing dalam ekonomi global.

Ia juga menyoroti data BPS tahun 2024 yang menunjukkan masih tingginya angka pengangguran, terutama pada kelompok usia 15-19 tahun, serta warga lanjut usia di atas 60 tahun.

Sebagai solusi, August mendorong Pemprov DKI untuk menyediakan pelatihan kerja yang menjangkau semua kelompok usia, agar seluruh warga Jakarta, baik muda maupun senior, memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan



yang layak.

"Jakarta ke depan butuh tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing," tutupnya.

Sementara, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang memperbolehkan lulusan sekolah dasar (SD) melamar sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) menyimpan pesan yang bertentangan dan berpotensi menimbulkan kontroversi.

Menurut Ubaid, kebijakan tersebut seolah mengesahkan fenomena putus sekolah, dengan menawarkan jaminan pekerjaan bergaji upah minimum regional (UMR) hanya dengan ijazah SD.

"Hal ini bisa mengurangi motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga jenjang SMA atau SMK," ujarnya pada Senin 7 April 2025.

Ubaid menyarankan agar kebijakan ini tetap sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun. Salah satu caranya adalah dengan menyeimbangkan kebijakan tersebut melalui penguatan pendidikan nonformal, seperti lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), guna meningkatkan keterampilan dan literasi para pekerja.

"Saat ini masih ada jutaan anak di Indonesia yang tidak melanjutkan se-

kolah karena alasan ekonomi. Tanpa intervensi kebijakan yang menyeluruh, kebijakan ini justru bisa menjadi jalan pintas yang melemahkan semangat peningkatan kualitas sumber daya manusia," tegasnya.

Pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah menilai aturan Gubernur Jakarta

set warga soal pentingnya pendidikan, salah satunya menurunnya gairah untuk mengejar pendidikan lebih tinggi dengan adanya aturan tersebut.

"Jika hal pertama yang terjadi maka DKI harus evaluasi program wajib belajar 12 tahun mereka. Artinya mereka harus bekerja keras untuk mewujudkannya," ujar Jejen.



Pramono Anung memperbolehkan lulusan sekolah dasar (SD) melamar menjadi petugas PPSU menunjukkan tingginya lulusan SD di Jakarta.

"Mungkin kebijakan ini didasari fakta data lapangan bahwa angka lulusan SD cukup tinggi di DKI," kata Jejen, Senin 7 April 2025.

la turut menyoroti kemungkinan dampak kebijakan ini terhadap mind-

la mengatakan bahwa harus ada sosialisasi lebih jauh untuk aturan ini agar tidak terjadi kemunduran dalam tingkat kemauan warga untuk belajar.

"Betul (harus sosialisasi) aturan ini untuk menjawab kondisi saat ini. Di masa depan pendidikan minimal warga Jakarta harus SMA bahkan S1. Karena kemajuan bangsa dinilai dari pendidikannya," ujarnya. ●



KERJA CEPAT BUPATI TOHA DAN WABUP ROHMAN SUKSES SEJAHTERAKAN WARGA

Tanpa menunda waktu, Bupati Musi Banyuasin H Muhammad Toha langsung bergerak cepat pasca libur Idul Fitri dengan memaksimalkan pelayanan publik. Salah satunya melakukan pengalihan jaringan listrik dari PT MEP ke PLN di Kabupaten Musi Banyuasin terus berjalan. Kini, giliran ribuan pelanggan PT Muba Electric Power (MEP) yang ada di Kecamatan Keluang beralih ke Perusahaan Listrik Negara (PT PLN).

Peresmian peralihan pelanggan PT MEP ke PLN (Persero) ditandai dengan penyalaan sambungan listrik untuk 5 desa di Kecamatan Keluang tersebut oleh Bupati Muba HM Toha didampingi Wakil Bupati Rohman bersama Gubernur Sumsel H Herman Deru dan GM PLN Unit Induk Distribusi Sumsel Jambi-Bengkulu (UID S2JB) Adhi Herlambang.

Penyalaan perdana listrik PLN dari listrik PT MEP dilaksanakan di Desa Tegalmulyo Kecamatan Keluang.

Bupati Muba HM Toha menyampaikan, listrik memegang peranan vital bagi kehidupan manusia, hampir seluruh kegiatan produktif mengandalkan listrik. Bukan hanya menerangi kehidupan pada saat malam hari saja, melainkan listrik menjadi sumber daya utama dalam beragam alat dan mesin yang berperan penting dalam bergulirnya roda ekonomi.

"Hal inilah yang menjadi motif utama Pemkab Muba untuk memperjuangkan seluruh Kecamatan di Muba agar bisa beralih ke PLN. Penyalaan daya listrik untuk pengalihan pelanggan PT MEP kepada PT PLN sebagai bentuk realisasi rencana dari pemerintah kepada masyarakat," bebernya.

Bupati HM Toha juga mengungkapkan, sebagai awal proses pengalihan sebanyak 56.112 pelanggan PT MEP yang berada di 14 kecamatan dalam Kabupaten Muba.

Untuk tahap sekarang ini pengalihan pelanggan PT MEP ke PT PLN dilakukan di lima Desa di Kecamatan yang sudah selesai pembangunan jaringan listriknya, yaitu Desa Karya Maju, Desa Tegalmulyo, Desa Sri Damai.

Kemudian di Desa Mulyo Asih dan Desa Tenggaro. Dengan total pelanggan PT MEP yang akan beralih ke PT PLN sebanyak 2.813 pelanggan.

"Alhamdulillah, setelah berbagai upaya dan dalam waktu yang tidak sebentar, akhirnya tercapai. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari Gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada manajemen PT PLN Pusat dan PT PLN UID S2JB, Anggota DPR-RI, Kementerian ESDM, dan semua pihak yang telah membantu terealisasinya rencana pengalihan ini," kata Bupati HM Toha.

"Kepada masyarakat, khususnya pelanggan PT MEP yang dialihkan saya mohon dukungan dan kerjasamanya



agar proses pengalihan pelanggan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar,” lanjut Bupati.

Raih Apresiasi Tinggi

Kerja cepat yang dilakukan Bupati HM Toha dan Wabup Rohman dalam meningkatkan kesejahteraan warga mendapat apresiasi tinggi dari Gubernur Herman Deru.

“Saya ucapkan kalian hebat. Karena baru 56 hari kerja kalian sudah melakukan yang terbaik dengan Switch On PT MEP ke PLN. Peralihan ini juga merupakan bagian dari proses panjang sejak PLN belum mampu melayani tujuh kecamatan di Muba, hingga PT MEP hadir sebagai solusi sementara melalui BUMD. Upaya percepatan kemudian dimulai sejak masa jabatannya di periode pertama bersama Pj Bupati Muba Apriyadi, dan kini dilanjutkan oleh Bupati terpilih HM Toha,” ungkap Gubernur Herman Deru.

Gubernur menjelaskan, jika memakai listrik masyarakat sudah dialihkan dari MEP ke PLN. Maka pembayarannya pun bisa berkurang menjadi 40% - 50%.

“Untuk itu, masyarakat Muba wajib mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan jajarannya beserta MEP dan PLN,” ulasnya.

GM PLN Unit Induk Distribusi Sumsel Jambi-Bengkulu (UID S2JB) Adhi Herlambang juga mengatakan, pengalihan wilayah usaha ini sebenarnya bukan hanya urusan administratif tetapi merupakan upaya bagaimana untuk melayani masyarakat sebagai pelanggan dengan baik.

Itulah yang sangat penting dari visi dan misi PLM yang sejalan dengan komitmen Bupati Muba untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya.

“Proses peralihan Pelanggan PT. MEP ke PT. PLN di kecamatan yang ada di Kabupaten Muba akan dilakukan secara bertahap hingga 56.112 pelanggan. Semoga apa yang kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar,” tandasnya.

Pelayanan Listrik di Muba Wajib Maksimal

Setelah berhasil melakukan peralihan pengelolaan kelistrikan dari PT MEP ke PLN, Bupati Muba M Toha bersama Wakil Bupati Rohman menegaskan

kepada jajaran PLN dan PT MEP untuk serius dan total dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dalam pertemuan bersama jajaran PT PLN Cabang Sekayu dan PT MEP, Bupati Toha menekankan pentingnya dedikasi dan kerja nyata kedua institusi tersebut demi memenuhi kebutuhan listrik warga secara maksimal.

“Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang telah ditempuh PLN dan MEP sejauh ini. Namun, harapan kami je-

atau janji,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Bupati meminta kepada seluruh Camat di Kabupaten Muba untuk ikut menjaga stabilitas jaringan listrik dengan langkah konkret di lapangan.

“Gotong royong adalah kunci. Kami minta kepada seluruh camat dan masyarakat bersama-sama menjaga infrastruktur kelistrikan, salah satunya dengan memangkas ranting pohon yang berpotensi mengganggu jaringan,” tandasnya.



las ke depan, pelayanan harus lebih optimal, merata, dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat,” tegas Bupati Toha di Ruang Audiensi Bupati Muba.

Bersama Wakil Bupati Rohman, ia juga mengingatkan bahwa pelayanan kelistrikan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

“Transisi dan tantangan dalam sektor kelistrikan ini harus dijawab dengan aksi nyata, bukan hanya sekadar wacana

Menanggapi arahan tersebut, Manager PLN ULP Sekayu Agus Ibnu Tsani, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dan memperkuat layanan.

“Kami sangat menghargai sambutan dan dukungan dari Pak Bupati dan Pak Wabup. PLN siap bergerak cepat, bekerja sama, dan mendukung penuh agenda strategis Muba, termasuk pelaksanaan Porprov,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Direktur PT MEP, Agus Raflen, yang memastikan pihaknya siap berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas layanan. •Adv



MUBA 'GASPOL', PASTIKAN SEMUA LAYANAN PUBLIK OPTIMAL

Tanpa menunda waktu dan mengenal lelah, Bupati Musi Banyuasin H. Muhammad Toha langsung bergerak cepat dengan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RSUD Sekayu yang belum sempat ia datangi sebelumnya, seperti BP-PRD, DLH, dan BKD dalam rangka memastikan roda pelayanan publik kembali berjalan maksimal.

Dalam kunjungan yang dibalut suasana silaturahmi itu, Bupati Toha menyampaikan pesan strategis yang menggarisbawahi pentingnya empat nilai utama bagi seluruh jajaran ASN dan tenaga kerja kontrak (TKK) yakni soliditas, kecerdasan, disiplin, dan loyalitas.

"Empat nilai ini bukan sekadar jargon, tetapi fondasi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat dan pelayanan publik yang berkualitas. Kita butuh tim yang kompak, cerdas mengambil langkah, disiplin dalam bekerja, dan loyal terhadap tujuan besar pembangunan Muba," tegas Bupati.

Ia juga menegaskan bahwa percepatan pembangunan hanya bisa dicapai jika seluruh OPD bekerja secara terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Kerja lintas sektor harus diperkuat. Kita tidak bisa membangun Muba dengan pola pikir sektoral. Semua OPD harus

bergerak sebagai satu kesatuan, saling mendukung dan berinovasi," ujarnya di hadapan jajaran pegawai.

Kehadiran Bupati HM Toha yang penuh semangat juga disambut antusias oleh para pegawai, yang merasa termotivasi dengan arahan dan perhatian langsung dari kepala daerah.

Kunjungan ini juga dinilai sebagai bentuk komitmen Bupati dalam menjaga kedekatan dengan aparatur sipil negara serta memastikan bahwa semangat kerja pasca libur tetap terjaga tinggi.

Dengan gaya kepemimpinan yang energik dan mengedepankan kedisiplinan, Bupati Toha berharap birokrasi Pemkab Muba menjadi mesin pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan profesional.

"Mari kita tunjukkan, ASN Muba bisa jadi teladan bukan hanya bekerja, tapi bekerja dengan integritas dan dedikasi," pungkasnya.

Dorong Percepatan Pembangunan

Bupati Muba H M Toha menunjukkan sikap tegas sekaligus visioner. Kepada jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bupati Toha didampingi Wakil Bupati Rohman memberikan ultimatum tegas namun membangun kepada seluruh pimpinan perusahaan yakni kinerja harus ditingkatkan, perubahan harus nyata.

“Saya beri waktu enam bulan. Setiap perusahaan harus menunjukkan perubahan signifikan. Jangan hanya jalan di tempat, kita harus kerja nyata, bangun budaya kerja unggul, dan buktikan bahwa kita mampu bersaing,” tegas Bupati Toha.

Direktur Utama Petro Muba, Khadafi menyambut baik arahan Bupati dan menyampaikan kesiapan penuh untuk mendukung langkah besar yang sedang dibangun Pemkab Muba.

Ia juga memperkenalkan empat anak perusahaan di bawah Petro Muba, yaitu PT Musi Banyuasin Electronic Power, PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari, PT Muba Link, dan PT Muba Sarana.

Masing-masing pimpinan perusahaan turut menyampaikan pemaparan visi, misi, serta program kerja mereka untuk mempercepat kontribusi terhadap kemajuan daerah.

Salah satunya, Direktur PT Muba Link, Sumadi menyatakan bahwa dirinya bertekad terus melakukan Perbaikan mulai dari SDM, operasional dan keuangan untuk membawa perusahaan yang ia pimpin semakin baik lagi kedepannya.

“Kami fokus pada pembenahan SDM, efisiensi operasional, dan penguatan keuangan. Target kami jelas, menjadikan PT Muba Link sebagai entitas bisnis yang profesional dan memberi manfaat nyata bagi daerah,” tandasnya.

Wajib Jadi Contoh Teladan

Selain meningkatkan pelayanan publik, pembenahan dan peningkatan kinerja juga terus dilakukan Bupati HM Toha dan Wabup Rohman. Salah satunya peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Dengan mengajak para camat serta seluruh kepala perangkat daerah Bupati Muba HM Toha meminta fokus pada peningkatan PAD dan memaksimalkan realisasi yang telah diperoleh berdasar-

kan UU Nomor 1 tahun 2022.

“Pentingnya mencapai target PAD yang telah ditetapkan guna memastikan berjalannya program pemerintah dan sehatnya pengelolaan anggaran. Terutama pajak-pajak yang ada perusahaan. Setelah kegiatan rakor ini, kami akan memanggil secara personal pihak perusahaan agar bisa bekerjasama dengan Pemkab,” bebarnya.

Lanjutnya, bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting guna mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan sosial dasar bagi masyarakat Muba.

Dimana pajak yang dibayarkan digunakan untuk membiayai program-program pemerintah, untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

“Maka nya setelah ini juga akan dilakukan evaluasi. Dengan melakukan pengecekan ulang terhadap mobil-mobil dinas yang ada di Muba, dengan memastikan di mana posisinya dan apakah kendaraan tersebut taat membayar pajak atau tidak. Kita wajib jadi contoh

teladan. Hal-hal semacam ini harus kita ingatkan untuk meminimalisir akan terjadinya kerugian,” ungkap Bupati Toha.

Sementara, Kepala Bapenda Provinsi Sumsel H Achmad Rizwan menyampaikan, dalam mengimplementasi dan strategi peningkatan PAD berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan dilakukannya, pendataan ulang wajib pajak. Menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan BUMN. Memanfaatkan teknologi digital dalam pemungutan pajak.

Meningkatkan kapasitas SDM Meningkatkan infrastruktur teknologi. Melakukan kolaborasi antar pemerintah. Melakukan monitoring dan evaluasi rutin.

“Dalam hal ini tentunya kami Bapenda Sumsel siap melakukan berbagai bentuk komunikasi dan koordinasi agar mengimplementasi dan strategi peningkatan PAD berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik di Muba,” terangnya. ●



KUKAR IDAMAN BERBUAH POSITIF UMKM BERKEMBANG PESAT

Program unggulan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar Idaman (Inovatif, Berdaya Saing, dan Mandiri), membuah-kan hasil positif. Bupati Kukar Edi Damansyah pun angkat topi atas capaian di sektor ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang disebutnya berjalan cukup baik.

Menurut Edi, salah satu indikator keberhasilannya adalah UMKM di Kukar yang kini tumbuh dan berkembang pesat. Bahkan, banyak di antaranya yang naik kelas.

"Ini semua hasil komitmen bersama. Pemkab melalui dinas-dinas terkait terus bergerak, tapi yang paling penting adalah peran masyarakat dan komunitas yang menjadi mitra," kata Edi saat silaturahmi dan halal bihalal bersama para pelaku UMKM, wirausaha muda, pegiat ekonomi kreatif, serta organisasi kepemudaan di Pendopo Odah Etam, Selasa, 8 April 2025.

Edi juga menyebutkan, geliat ekonomi dari berbagai titik ikon di Tenggarong sangat terasa. Perputaran uang dan kesadaran membayar pajak dari pelaku usaha pun meningkat. Itu tandanya, kolaborasi antara

pemerintah dan pelaku usaha benar-benar terjalin baik.

"Di kecamatan juga saya minta camatnya kasih ruang untuk UMKM. Tapi ingat, tetap harus tertib, ikuti aturan dan tata kelola yang ada, biar tempat usaha tetap nyaman dan ramai pengunjung," jelasnya.

Menariknya, beberapa ruang publik yang kini jadi ikon Tenggarong sudah mendapat pengakuan wisatawan dari luar daerah. Contohnya kawasan Jalan Kartanegara dan Titik Nol Tenggarong, yang kini aktif dimanfaatkan masyarakat dan pelaku UMKM.

"Dari situ kita bisa lihat

pengembangannya jalan. Komunitasnya juga punya komitmen tinggi. Jadi wajar kalau ikon-ikon ini makin hidup," tambahnya.

Edi menambahkan, Pemkab Kukar terus mendukung masyarakat lewat pelatihan, infrastruktur, hingga pembiayaan lewat program Kredit Kukar Idaman, pinjaman tanpa bunga dan tanpa agunan.

Edi juga berpesan kepada para pemuda dan komunitas untuk terus jadi penggerak perubahan. "Jangan cuma jadi penonton. Kukar butuh anak muda yang berani bermimpi, berani mencoba, dan siap tanggung jawab. Jadi mitra kritis tapi tetap kolaboratif," tegasnya.

Perubahan BUMD

Bupati Kukar, Edi Damansyah, selalu menyerukan dan mengajak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melakukan perubahan. Dengan jargon "Perubahan Itu Sulit Tapi Bisa",



hal itu kini berhasil dibuktikan oleh keluarga besar Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

“Dengan adanya kemauan keras melakukan perubahan. Kini Perumda Air Minum Tirta Mahakam telah berhasil melakukan tujuh perubahan yang saya arahkan kepada jajaran Direksi dan Keluarga Besar Perumda Air Minum Tirta Mahakam saat itu,” kata Edi Damansyah melalui Asisten II Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, pada acara Halal Bihalal Keluarga Besar Perumda Air Minum Tirta Mahakam, Rabu, 9 April 2025.

Tujuh perubahan tersebut di antaranya pemanfaatan teknologi yang menunjang operasional dan pengembangan SPAM, peningkatan pendapatan perusahaan, transformasi organisasi sesuai

yang tidak bisa dilupakan, yaitu peran serta masyarakat yang selama ini diberikan kepada Perumda Air Minum Tirta Mahakam sudah sangat tinggi.

Aspirasi yang disampaikan baik melalui Forum Pelanggan Air Minum maupun secara langsung kepada jajaran manajemen seluruhnya sudah ditindaklanjuti dengan baik oleh Pihak Perumda Air Minum Tirta Mahakam.

Kemudian secara khusus memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja sama yang baik kepada forum pelanggan maupun masyarakat pelanggan.

“Tentunya saya selalu berharap adanya kesatuan dan kebersamaan kita semua dan seluruh pemangku

han, 20 kecamatan sudah terlayani dan menikmati air bersih/air minum.

Berdasarkan laporan, hingga akhir 2024, layanan air bersih baru mencapai 76,53 persen, di mana sisanya harus tuntas 100 persen pada akhir 2026.

Dia meminta hal tersebut harus ditindaklanjuti dan disikapi dengan serius oleh Perumda Air Minum Tirta Mahakam dan Dewan Pengawas dapat mengawal dengan baik.

Ahyani berpesan agar keberhasilan-keberhasilan yang sudah dicapai hendaknya terus dipertahankan ditingkatkan agar lebih baik dimasa-masa mendatang, terus lakukan kolaborasi, dan kerja sama dengan pihak-pihak lain.

“Sentuhlah pelanggan dengan hati,



Ini semua hasil komitmen bersama. Pemkab melalui dinas-dinas terkait terus bergerak, tapi yang paling penting adalah peran masyarakat dan komunitas yang menjadi mitra.

prinsip Good Corporate Governance (GCG), revaluasi aset hibah pemerintah baik pusat dan pemerintah daerah, alternatif pendanaan untuk penyelenggaraan SPAM pada wilayah yang tidak ekonomis, penurunan tingkat kehilangan air, dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan SPAM.

“Hal inilah yang menurut saya perlu ditiru dan dilakukan oleh BUMD-BUMD lain di Kabupaten Kukar. Dan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas hal ini dilakukan dengan baik oleh jajaran Direksi dan Manajemen Perumda Air Minum Tirta Mahakam. Hasilnya bisa dilihat dan dirasakan oleh kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” kata Ahyani.

Di balik keberhasilan tersebut, semua tentunya ada hal yang sangat penting

kepentingan untuk senantiasa membuat masyarakat kita selalu tersenyum, karena pelayanan air bersih diberikan dengan lancar,” imbuh Ahyani.

Ahyani mengingatkan dan meminta jajaran direksi melakukan penandatanganan kontrak kerja sama antara Perumda Air Minum Tirta Mahakam dengan salah satu perusahaan swasta yang mengelola air minum, yaitu PT Tiara Cipta Nirwana dengan teknologi membran.

Menurutnya, laporan yang diterima dari BPKP sudah selesai dan tinggal menunggu satu tahapan yang belum selesai yaitu review yang dikeluarkan oleh Kejari Kukar.

Adapun target jangkauan layanan air minum dalam dokumen RPJMD 2021-2026, di mana pada akhir 2026 seluruh masyarakat pada 193 desa, 44 kelura-

hangan pernah kecewakan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik,” tutur Ahyani.

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Mahakam, Suparno, mengatakan, saat ini harus bisa mengikuti berbagai perubahan serta berinovasi untuk menuju pemenuhan kebutuhan air bersih di 20 kecamatan dengan pelayanan mencakup 193 desa dan 44 kelurahan.

“Tentunya ini semua tidak mudah dilakukan jika kita tidak bersama dalam menyatukan tekad untuk mencapai visi dan misi. Dukungan Pemkab Kukar yang cukup besar dalam peningkatan infrastruktur kesejahteraan, merupakan simbol implementasi dari program Kukar Idaman yang sangat mendukung hal ini,” ungkap Suparno. ●



SEMANGAT DAN ENERGI BARU MEMBANGUN KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur telah menjadi etalase Indonesia, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Untuk itu, diperlukan semangat baru dan energi besar untuk membangun Kaltim lebih baik.

Hal itu ditegaskan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, saat memimpin Apel Pagi rutin di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 8 April 2025.

Sebagai etalase Indonesia, kata Rudy, Kaltim sangat memerlukan energi, semangat, terobosan dan inovasi-inovasi yang besar. Dia menekankan beberapa hal, terutama bagaimana melaksanakan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan yang luar biasa, serta tidak terpa-

ku pada rutinitas yang biasa-biasa saja, yang menghasilkan output yang biasa juga.

"Hari ini kita harus bekerja terukur. Hari ini target-target kinerja kita harus berada di atas ekspektasi daripada masyarakat Kaltim. Maka kita perlu terobosan-terobosan, ide-ide, gagasan-gagasan. Tidak kalah pentingnya kita harus mengubah mekanisme mindset kita. Kalau kita datangnya saja tidak disiplin, kalau kita tidak memiliki target dalam program kerja kita, yakinlah hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Bekerja yang standar, yakinlah hasilnya akan jauh daripada standar. Maka kita perlu terobosan-terobosan yang luar biasa," jelasnya.

Pada 2028, ujar Rudy, sesuai dengan ekspektasi Presiden Prabowo Subianto, jika tidak ada halangan melintang, seluruh pusat pemerintahan Indonesia akan beralih ke kaltim, tepatnya di Ibu Kota Nusantara (IKN). Maka, Kaltim harus ber-

benah, tidak hanya sumber daya manusia (SDM) yang harus diperbaiki, tetapi juga ada kesehatan dan paling mendasar adalah infrastruktur dasar.

"Infrastruktur dasar kita saat ini belum menggambarkan bahwa kita jadi etalase Indonesia. Kita masih jauh tertinggal. Jangankan dari Pulau Jawa maupun Pulau Sumatera, tapi di regional Kalimantan sendiri, Kaltim berkaitan dengan infrastruktur dasar masih jauh tertinggal. Ini yang harus segera kita benahi, harus diperbaiki. Harus punya gagasan-gagasan besar, inovasi, ide-ide, kita harus bekerja out of the box, tidak lagi harus bekerja dengan berdasarkan aturan-aturan saja. Tetapi ingat aturan-aturan tetap harus kita taati, tidak boleh kita tabrak, nyerempet-nyerempet pun harus kita hindarkan. Bagaimana semuanya sesuai dengan standar operasional prosedur. Jangan keluar daripada aturan yang telah ditetapkan. Tetapi sekali lagi jangan terkungkung dengan



seluruh aturan-aturan itu, mengakibatkan kita lambat mengambil keputusan-keputusan," urainya.

Terkait kinerja, Rudy meminta kepada pegawai ASN dan non ASN untuk banyak-banyak bersyukur. Besaran gaji sudah luar biasa diberikan oleh negara, khususnya masyarakat Kaltim. Pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat, sehingga sebagai abdi negara harus bekerja luar biasa melampaui ekspektasi masyarakat.

Kinerja ini benar-benar dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada seluruh masyarakat Kaltim, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Oleh sebab itu, tidak alasan kita bekerja santai-santai, apalagi malas-malasan. Apalagi tidak ada hal yang mendasar yang mendesak kita untuk berbuat tindak pidana korupsi. Saya ingin sekali mengajak kepada seluruh ASN dan non ASN di lingkungan Pemprov Kaltim, bekerja luar biasa, tidak hanya bekerja keras dan bekerja cerdas, tetapi bekerja tuntas dan bekerja ikhlas. Insyaallah jika kita sudah mencapai pekerjaan sampai tahap ikhlas, yakinlah hasilnya akan tiada batas," tambahnya.

Tidak lupa, Rudy juga mengingatkan bahaya narkoba dan menekankan bahwa dirinya tidak ingin di lingkungan sekretariat Kaltim ada pegawai yang terpapar narkoba.

"Kita akan melaksanakan secara berkala, rutin dan random berkaitan tes narkoba dengan seluruh ASN dan non ASN. Bekerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini BNN Kaltim. Jangan sampai ada ASN maupun non ASN yang terlibat dengan peredaran dan penyalahgunaan narkoba," pesannya.

Benahi Pelayanan

Usai apel perdana, Rudy Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji melakukan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan RSUD AW Sjahranie Samarinda untuk melaksanakan pengontrolan dan melihat langsung kegiatan proses penerimaan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus bertemu masyarakat yang akan melaksanakan pengobatan maupun perawatan.

"Banyak sekali hal-hal yang harus kita benahi. Pertama, RSUD AWS sudah hampir tidak mampu lagi menampung

kapasitas pasien. Kapasitasnya hanya delapan ratus pasien setiap hari, kenyataannya sudah lebih seribu pasien setiap harinya yang dilayani," kata Rudy.

Kedua, ada beberapa fasilitas-fasilitas yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada pasien maupun keluarga pasien yang akan berobat di RSUD AWS Samarinda.

"Salah satunya adalah pembenahan dan penambahan AC (air conditioner) untuk ruang tunggu pasien. Akan segera kita benahi agar masyarakat tidak panas saat menunggu antrian, dan ruang klinik poli yang ada juga sudah over kapasitas. Ini akan menjadi PR kita untuk segera kita benahi," tegasnya.

Menurut Rudy, pelayanan kesehatan



akan menjadi perhatian khusus bagi Pemprov Kaltim. Oleh karena itu, ke depan akan memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat Kaltim dengan mempersiapkan fasilitas-fasilitas ruang tunggu maupun ruang klinik poli-poli yang ada di rumah sakit.

"Melihat kinerja para dokter di RSUD AWS Samarinda, termasuk pelayanan-pelayanan tenaga kesehatan sudah sangat baik. Apalagi di RSUD AWS ini sudah mampu melakukan pengobatan-pengobatan seperti pelayanan ganti lutut dan penanganan lainnya, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengobatan di luar Kaltim," ujarnya.

Saat ini, lanjut Rudy, tinggal pembenahan fasilitas-fasilitasnya agar dapat melayani masyarakat yang ingin berobat.

"Intinya kita harus berbenah agar pe-

layanannya di RSUD AWS tidak regional Kalimantan saja, tetapi juga nasional, bahkan ke depannya kita memiliki rumah sakit bertaraf internasional," imbuhnya.

Rudy dan Seno Aji melanjutkan sidak ke Kantor Samsat Bapenda Kaltim di Jalan M Yamin Samarinda untuk melihat situasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh masyarakat.

Menurut Rudy, pajak yang masyarakat bayarkan adalah untuk membangun Benua Etam dan akan dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat.

"Gunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang pertama membebaskan semua tunggakan-tunggakannya, semua diputihkan. Yang berkaitan dengan

tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ataupun 1 dan 2 tahun yang lalu, jadi yang ada tinggal hari ini saja, untuk yang ke depan," terangnya.

Rudy meminta kepada seluruh masyarakat Kaltim dapat memanfaatkan semuanya, baik itu balik nama dan pajak kendaraan bermotornya. Semua masyarakat dipersilahkan memanfaatkan program pemutihan ini yang berlaku hanya tiga bulan, yakni sejak 8 April sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

"Jadi mohon digunakan fasilitas yang ada, sekali lagi masyarakat Kaltim dapat mempergunakan fasilitas ini dengan baik. Dan tahun ini akan kembali dilakukan gebyar pajak dengan total hadiah Rp5 miliar, rencananya akan diundi pada Agustus 2025," pesan Rudy. ●



EINSTEIN ENDGAME: TERJEBAK DI LORONG WAKTU

Wahana Bertema Sains dan Petualangan di TMII

Indonesia Science Center (ISC) di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, memperkenalkan sejumlah wahana dan film edukatif terbaru yang dirancang untuk menyuguhkan pengalaman seru sekaligus sarat pengetahuan.

Sebagai destinasi wisata berbasis sains, ISC terus berinovasi dengan menghadirkan hiburan interaktif yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Tiga atraksi utama menyambut pengunjung adalah wahana The Mummies, Theatre 4XD, dan film edukatif berjudul "Einstein Endgame: Terjebak di Lorong Waktu".

Staf Marketing dan Promosi ISC, Delia Fitri Sarah mengungkapkan wahana baru yang dihadirkan oleh ISC di TMII bertujuan untuk menjadikan liburan keluarga lebih bermakna dengan menambah wawasan pengetahuan.

"Kami ingin menjadikan liburan keluarga lebih bermakna, bukan hanya menyenangkan tapi juga menambah wawasan," ujar Delia Fitri Sarah, dalam keterangan resminya, Sabtu 5 April 2025.

Menjelajahi Peradaban Mesir Kuno di Wahana The Mummies

Salah satu daya tarik terbaru adalah The Mummies, sebuah wahana edukatif

yang mengajak pengunjung menelusuri jejak sejarah Mesir Kuno. Dibagi dalam empat zona tematik yakni Area Mesir, Area Mumi, Area Nabi Musa, dan Hall of the King.

Wahana ini menghadirkan pengala-

momen seru di berbagai spot foto tematik," tambahnya.

Sensasi Nonton Film 4D di Theatre 4XD

Pengalaman menonton yang lebih



man imersif melalui pameran artefak kuno, narasi sejarah, dan misteri peradaban Firaun.

Untuk menambah keseruan, pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam mini games Treasure Hunt dan mengabadikan momen seru di berbagai spot foto tematik yang telah disiapkan.

"Kami sudah menyiapkan mini games Treasure Hunt dan mengabadikan

hidup dapat dinikmati di wahana Theatre 4XD, di mana pengunjung bisa menyaksikan film animasi dengan teknologi 4D yang menggabungkan visual tiga dimensi dengan efek fisik seperti getaran dan hembusan angin.

"Film animasi ini dilengkapi dengan teknologi 4D yang menggabungkan visual tiga dimensi dengan efek fisik seperti getaran dan hembusan angin, sehingga

sensasi menonton menjadi lebih seru," jelasnya.

Dengan bantuan kacamata khusus, sensasi menonton terasa lebih nyata dan mendalam, cocok untuk dinikmati seluruh anggota keluarga.

Petualangan Waktu dalam "Einstein Endgame"

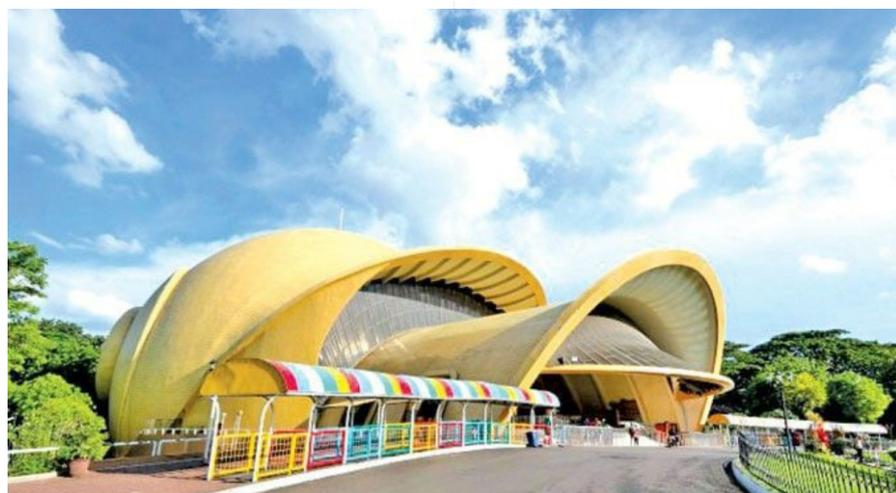
Film "Einstein Endgame: Terjebak di Lorong Waktu" menjadi sajian unggulan lainnya. Film ini menceritakan petualangan dua anak, Al Kindi dan Vera, yang terjebak dalam lorong waktu.

Mereka harus memecahkan berba-

dan film terbaru, ISC juga tetap setia menyuguhkan lebih dari 450 alat peraga sains interaktif yang tersebar dalam 29 wahana.

Seluruh alat peraga dirancang agar pengunjung dapat belajar lewat praktik langsung, mulai dari prinsip fisika, biologi, kimia, hingga teknologi modern.

Selama periode libur Lebaran, ISC juga menyiapkan program sains tematik dan kompetisi edukatif yang melibatkan anak-anak dan remaja. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi wadah eksplorasi kreativitas sekaligus meningkatkan minat generasi muda terhadap ilmu



gai teka-teki sains untuk bisa kembali ke masa kini. Latar cerita yang berlangsung di dalam galeri ISC menjadikan film ini sebagai sarana edukasi yang menyenangkan sekaligus memperkenalkan konsep-konsep ilmiah secara menarik dan mudah dipahami.

Lebih dari 450 Alat Peraga Sains dan Program Khusus Lebaran

Tak hanya menghadirkan wahana

pengetahuan.

Dengan berbagai pilihan wahana dan program yang edukatif dan menghibur, Indonesia Science Center menjadi destinasi yang ideal untuk mengisi liburan Lebaran bersama keluarga. Orang tua diajak untuk memanfaatkan momen ini dengan mengajak anak-anak bermain sambil belajar, membuka wawasan baru, dan menumbuhkan rasa ingin

tahu terhadap dunia sains.

Sementara pada Minggu siang 6 April 2025, menjelang berakhirnya masa liburan, tercatat hampir 8.000 orang mengunjungi kawasan wisata tersebut.

"Sudah lebih dari delapan ribu pengunjung hari ini," ujar Novera Mayang Sari, Humas TMII.

Selama periode libur lebaran yang berlangsung dari 31 Maret hingga 6 April 2025, TMII sukses mencapai target dengan total kunjungan mencapai 120.000 orang.

Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman, menyatakan komitmennya untuk terus memberikan layanan terbaik bagi para wisatawan.

"TMII selalu siap menyambut pengunjung dengan meningkatkan kualitas fasilitas, pelayanan, atraksi, serta menyelenggarakan berbagai aktivasi menarik," kata Herdy.

Sejak mengalami transformasi besar dan meresmikan "wajah barunya" pada 1 September 2023, TMII terus berinovasi menghadirkan pengalaman baru yang edukatif dan menghibur, sekaligus mengembangkan diri sebagai pusat kegiatan masyarakat di bidang olahraga dan budaya.

Direktur Utama TMII, Intan Ayu Kartika, menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan total kunjungan sebanyak 120 ribu orang selama pekan libur Lebaran. TMII juga memberikan akses masuk gratis bagi masyarakat yang melaksanakan Sholat Idulfitri di Plaza Keong Emas pada 31 Maret 2025 lalu.

Untuk menunjang kenyamanan dan keamanan selama masa liburan, TMII telah menyiapkan dua pos kesehatan untuk mengantisipasi keadaan darurat medis. Fasilitas transportasi dalam kawasan juga ditingkatkan dengan penambahan unit angling dari 30 menjadi 42 serta satu unit bus listrik. Selain itu, tersedia empat unit shuttle gratis dari dan menuju Stasiun LRT TMII.

Guna menjaga ketertiban, TMII juga menempatkan Posko Terpadu, Pos Lalu Lintas, dan Pos Pengamanan di dua titik strategis. Dari sisi kuliner, pengunjung dapat menikmati 36 menu khas Nusantara di Foodcourt Nusantara dan menjelajahi lebih dari 100 tenant bazaar kuliner yang tersebar di tiga lokasi utama di dalam kawasan TMII. ●

KULINER LEBARAN KHAS PALEMBANG, MENGGUGAH SELERA

Ragam makanan khas Idul Fitri menjadi menu wajib setiap daerah, mulai dari makanan utama hingga kue-kue ringan.

Momentum Idul Fitri tidak hanya menjadi ajang silaturahmi atau berkumpul bersama dengan keluarga, tradisi santap makanan khas juga tidak bisa ditinggalkan.

Seperti di Palembang, tidak hanya terkenal dengan kuliner khas pempek dan kuah cuko yang asam dan sedap. Namun, Palembang juga punya banyak kuliner yang tak kalah enak. Karena dilalui banyak sungai besar dan berada dekat laut, kuliner dari daerah ini didominasi oleh makanan berbahan dasar ikan dan seafood.

Hampir 90% kuliner Palembang

lah makanan khas Palembang yang terbuat dari olahan daging ikan dan tepung sagu.

Menurut sejarah, pempek muncul sejak abad ke-16, ketika para perantau dari Tiongkok datang di masa Kesultanan Palembang Darussalam yang saat itu dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Namanya sendiri berasal dari nama apek atau panggilan paman/laki-laki tua yang menjadi penjaja makanan ini.

Awalnya, pempek dibuat menggunakan ikan belida, tetapi karena semakin langka, kini pempek umumnya

rasanya asam, manis, dan pedas. Tambahkan topping potongan mentimun dan mie kuning. Kamu bisa menemukan penjual pempek dengan mudah mulai dari di pedagang kaki lima, hingga restoran, yang kini umum juga ditemui di kota-kota dan provinsi lain di seluruh Indonesia.

2. Tekwan

Pada dasarnya, tekwan tak jauh beda dari pempek karena dibuat dari campuran ikan dan tepung tapioka. Yang membedakan adalah bentuknya yang kecil-kecil menyerupai bakso, dan cara



mengandung ikan atau hasil laut lainnya. Untuk yang kurang suka olahan seafood, kamu bisa mengecek kue-kue khas Palembang, yang tak kalah enak.

Berikut ini makanan khas Lebaran di Palembang:

1. Pempek

Pempek atau empek-empek ada-

dibuat dari ikan tenggiri atau ikan gabus giling yang dicampur dengan tepung kanji atau tepung sagu, telur, dan aneka bumbu. Adonan yang sudah tercampur biasanya akan dibentuk atau diisi telur, kemudian direbus.

Setelah direbus, pempek ada yang digoreng, dibakar, atau disajikan begitu saja bersama dengan cuko atau saus cuka encer berwarna hitam yang

penyajianya. Tekwan disajikan dalam kuah kaldu udang berwarna bening yang hangat, layaknya sup kaldu, dengan rasa yang sangat gurih.

Dalam semangkuk tekwan, kamu akan menemukan isian seperti sohon, irisan bengkoang, dan jamur, serta ditaburi irisan daun bawang, seledri, bawang goreng, dan sambal.

Kata 'tekwan' sendiri merupakan

kepanjangan dari “berkotek samo kawan” yang artinya “mengobrol bersama kawan”. Di Palembang, makanan ini memang dibuat untuk dinikmati bersama orang terdekat, sambil mengobrol.

3. Model

Model adalah kuliner khas Palembang lain yang juga terbuat dari ikan. Kuliner ini bisa dibilang adalah tipe lain dari persilangan pempek dan tekwan, karena sama-sama disajikan dalam kuah udang bening. Bedanya, adonan model ada yang diisi dengan tahu atau telur rebus. Meskipun ada pula yang tidak.

Adonan ikan dibentuk bulat-bulat besar kemudian diiris kecil-kecil lalu digoreng. Model disajikan dengan kuah, sohun, irisan timun, sambal, dan bawang goreng.

4. Nasi Minyak

Salah satu hidangan yang selalu hadir adalah nasi minyak. Makanan ini konon diperkenalkan oleh pedagang Arab yang singgah di Palembang pada abad ke-17. Nasi ini memiliki cita rasa yang dibuat dengan campuran rempah-rempah seperti kapulaga,

5. Kue Maksuba

Kue maksuba merupakan kue basah tradisional yang terbuat dari campuran telur, gula pasir, mentega, vanilla, dan susu kental manis putih. Sekilas bentuk kue maksuba mengingatkan akan kue lapis legit. Yang unik dari kue ini adalah telur yang dipakai harus telur bebek, tak boleh telur jenis lain. Penggunaan telur bebek menambahkan rasa lebih gurih selain tentu rasa manis.

Zaman dulu, kue maksuba dibuat oleh seorang Panggong, panggilan kepada juru masak tradisional di Palembang. Kue maksuba sangat spesial karena hanya bisa kamu temui di momen-momen tertentu seperti lamaran, pernikahan, dan Lebaran.

6. Kue Delapan Jam

Kue delapan jam atau kue lapan jam adalah kue basah khas Palembang lainnya yang wajib kamu coba saat libur Lebaran ke Palembang. Kue ini biasanya dibuat oleh wanita dewasa atau mereka yang memiliki resep turun temurun.

Karena proses pembuatannya yang bisa sampai 8 jam, kue ini diberi nama kue delapan jam. Kue delapan jam

kini, semua kalangan masyarakat bisa menikmatinya di momen spesial seperti perayaan dan hari Lebaran.

7. Engkak Ketan

Kue engkak ketan adalah kue lapis tradisional yang populer tak hanya di Palembang tapi juga di Lampung. Kue ini bisa dibilang mirip seperti kue lapis legit. Bedanya, kue ini lebih lembut dan tahan lama dari kue lapis legit.

Bedanya, bahan dasar untuk membuat kue engkak ketan ini adalah mentega, telur, tepung ketan, dan santan. Sementara kue lapis legit menggunakan tepung terigu.

Kue ini sering dijadikan sajian di acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau hari raya. Engkak ketan adalah kue yang melambangkan ungkapan syukur dan kebahagiaan.

8. Malbi

Tenang, gak semua makanan khas Palembang terbuat dari ikan, kok. Ada juga menu khas yang terbuat dari daging sapi yaitu malbi. Makanan yang satu ini bisa dikatakan adalah semurnya orang Palembang. Warnanya gelap seperti semur dengan cita rasa yang



cengkeh, dan minyak samin.

Biasanya, nasi minyak ini disajikan dengan lauk seperti malbi yang juga merupakan makanan khas Kesultanan Palembang. Nasi minyak juga bisa disajikan dengan ayam panggang. Nasi minyak ini menjadi pilihan utama saat Lebaran karena aromanya yang menggugah selera dan teksturnya yang lembut.



punya tekstur legit dan sedikit kenyal, dengan rongga-rongga kecil di kue saat dipotong.

Bahan dasar kue delapan jam adalah telur bebek, gula pasir, susu kental, manis, dan mentega. Di zaman dulu, kue ini identik dengan kue orang-orang kaya, karena bahan bakunya memerlukan hingga 20 butir telur dan di masa itu dianggap cukup mahal. Namun

manis dan gurih.

Malbi merupakan hidangan sejenis semur daging yang disajikan dengan kuah yang sangat kental dengan warna coklat yang pekat. Kuahnya yang kental dan pekat diperoleh dari bumbu rempah seperti bawang-bawangan, asam jawa, serai, daun salam, jahe, lengkuas, cengkih, merica, mesoyi, kayu manis, pala, dan kecap. ●



SAAT GARUDA MUDA BERADA DI TANGAN YANG TEPAT

Berada di Grup C Piala Asia U17, Timnas Indonesia sebetulnya tidak berharap muluk karena ketatnya persaingan. Namun situasinya kini berbeda, dua kemenangan atas Korea Selatan (1-0) dan Yaman (4-1) memastikan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia 2025 Qatar sekaligus membangkitkan semangat Garuda Muda Indonesia untuk terbang lebih tinggi lagi.

Target awalnya hanya tembus hingga perempat final kini pasukan Nova Arianto membidik gelar juara di Piala Asia U17.

Kesuksesan ini juga menunjukkan kalau Evandra Florasta dan kawan-kawan berada di orang yang tepat yakni Nova Arianto. Keberhasilan ini juga sekaligus membungkam para pengkritik sang pelatih yang meragukan kemampuannya sebagai seorang pelatih.

Keikutsertaan Timnas Indonesia U17 ini tidak lepas dari hasil di bulan Juli 2024 lalu. Di mana saat Timnas U-16 Indonesia berhasil meraih juara ketiga di Piala AFF setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 5-0. Sementara itu, gelar juara turnamen tersebut diraih oleh Australia usai mengalahkan Thailand di partai final.

Kini, skuad yang sebagian besar terdiri dari pemain yang sama kembali menunjukkan performa gemilang di Timnas U-17 dalam ajang Piala Asia. Berkat penampilan tersebut, Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U-17 yang akan digelar di Qatar.

Hasil ini sangat membanggakan karena peringkat ketiga di Piala AFF hingga melangkah ke Piala Dunia U17. Sementara Thailand sendiri gagal sedangkan Australia berjuang keras agar bisa menyusul Indonesia.

Indonesia menjadi negara ke 43 dari 48 tim

yang akan bertarung di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Untuk saat ini Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara. Vietnam punya peluang untuk menyusul namun mereka harus meraih satu kemenangan lagi.

Fisik Prima Jadi Senjata Rahasia

Ada hal berbeda dari pola latihan yang diterapkan Nova Arianto pada anak asuhnya. Sempat dikritik karena disuruh lari dan angkat beban daripada memantapkan skill permainan namun hasilnya memang terbukti.

Para pemain Timnas Indonesia U-17 menunjukkan kesiapan fisik yang mumpuni. Beberapa momen latihan dan di

luar lapangan memperlihatkan postur tubuh atletis dan kekar para punggawa Garuda Muda, hasil dari program latihan intensif yang mereka jalani yang diterapkan Nova Arianto.

Terlihat para pemain Timnas Indonesia U17 dengan otot-otot yang terbentuk, menandakan dedikasi mereka dalam menjaga kondisi fisik. Latihan beban, conditioning, dan disiplin dalam menjaga pola makan menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan dan daya tahan yang dibutuhkan untuk bersaing di level tinggi.

Penampilan fisik prima ini tentu menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia U17 dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Kekuatan dan kebugaran yang terjaga memungkinkan mereka untuk tampil maksimal sepanjang pertandingan, baik dalam menyerang maupun bertahan.

Kondisi fisik prima memberikan fondasi yang kokoh bagi pemain untuk mengembangkan kemampuan teknis dan taktis mereka. Dengan tubuh yang kuat dan bugar, mereka lebih mampu menjalankan instruksi pelatih, berduel dengan lawan, dan menjaga intensitas permainan sepanjang laga.

Kondisi fisik yang prima ini berbanding lurus dengan performa gemilang Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17. Skuad besutan Nova Arianto ini tidak hanya sukses membuat kejutan dengan mengalahkan raksasa Asia, seperti Korea Selatan saja.

Tapi Timnas Indonesia U-17 juga mampu lolos ke perempat



final Piala Asia U-17 sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U-17 2025. Hasil positif ini diraih usai mengalahkan Yaman dengan skor 4-1.

Garuda Muda Indonesia kini berada di orang yang tepat. Timnas Indonesia yang dipimpin Nova Arianto di Piala Asia U17 sukses lolos Piala Dunia 2025, masuk 8 besar Piala Asia.

Mampu mengalahkan favorit Juara Korea Selatan, sukses mencetak 5 gol, hanya kemasukan satu gol, sukses mendulang 6 poin dari 2 pertandingan.

Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia U17 lolos melalui jalur Kualifikasi untuk tampil di Piala Dunia U17 dua kali berturut-turut. ●



BANGGA JADI ASISTEN SHIN TAE YONG

Pelatih Nova Arianto sukses mengantarkan Timnas Indonesia U17 ke Piala Dunia 2025 di Qatar setelah menekuk Yaman 4-1. Kemenangan kedua ini membuat Timnas Indonesia kembali bermain di kancah dunia sekaligus untuk membuktikan ucapan pengamat sepak yang meragukan kemampuannya

Seperti diketahui pengamat sepakbola, Tommy Welly atau Bung Towel pernah mengatakan kalau Nova Arianto tidak cocok untuk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia karena dianggap terlalu Shintaeyongisme.

Patut diakui Nova Arianto memang selalu menjadi tangan kanan Shin Tae-yong, yang menangani Timnas Indonesia dan U-23 pada 2020-2025 serta timnas U-20 pada 2020-2023. Kemudian ia juga ditugaskan untuk memoles timnas U-17.

"Nova itu ismenya sudah terlalu Shin Tae-yong. Waktu memegang Timnas Indonesia U-17, teman-teman juga suka meliput dia mengeluhkan anak-anak umpan dan fisiknya," ujar Bung Towel.

"Sekarang logikanya, teman-teman, anak-anak usia 16 tahun dituntut kesempurnaan. Kalau dasarnya ada yang kurang, tutup mulutmu kerjakan PR-mu ketimbang umbar ke media," ucap Bung Towel.

Keraguan tersebut tidak membuat

Nova Arianto patah semangat. Sebaliknya dia makin bersemangat untuk membuktikan kalau keraguan salah dan sang pelatih pun sukses membuktikannya.

Coach Nova Arianto bahkan mengaku kalau ilmu yang didapatkannya dari menjadi Asisten Pelatih Shin Tae-

ba menerapkan taktik yang sama yang pernah beliau (Shin Tae-yong) lakukan," ujarnya.

"Saya bersyukur pada para pemain yang sangat bekerja keras, disiplin dalam menerapkan taktik tersebut. Mereka anak-anak benar-benar memahami den-



yong selama di Timnas Indonesia. Semua ilmu itu langsung ia terapkan untuk Timnas Indonesia U17.

Taktik dari Shin Tae Yong itu secara mengejutkan berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0.

"Pastinya saya belajar banyak dari beliau (Shin Tae-yong). Setelah mempelajari permainan Korea Selatan, saya menco-

gan taktik tersebut dan menetapkan ya dengan baik dilapangan," kata Nova Arianto.

Bahkan hubungan Nova Arianto dengan Shin Tae Yong tetap erat hingga kini. Bahkan STY memberikan ucapan selamat kepada Nova atas kesuksesannya membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 Qatar. ●

SUKSES TIMNAS INDONESIA U-17, BUKTI PEMBINAAN USIA DINI BERJALAN

Tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia bisa apa. Demikian cibiran yang diterima skuad Nova Arianto saat menuju ajang Piala Asia U-17. Namun sang pelatih berhasil membuktikan cibiran itu menjadi prestasi dengan lolos ke Piala Dunia U-17 untuk yang kedua kalinya.

Dari 23 pemain yang dipanggil Nova Arianto untuk Piala Asia U-17 hanya ada nama Matthew Baker dari Melbourne/Australia. Selebihnya pemain muda dari Liga Indonesia. Meski tidak semenyerang Timnas Indonesia senior namun

nam, kedua terbawah di Asia,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Dalam ulasannya Soha Vn menilai saat Timnas Indonesia senior mengalahkan Bahrain, rata-rata tinggi pemain mereka mencapai 182,5 centimeter, mengungguli Bahrain (176,6 sentimeter). Kebanyakan pemain naturalisasi Indonesia memiliki tinggi badan 180 sentimeter sehingga fisik tidak menjadi masalah saat tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Soha memprediksi tinggi badan bisa menjadi masalah yang dihadapi Timnas Indonesia U-17 saat mengarungi Piala Asia U-17 2025. Timnas Indonesia U-17 berpotensi menjadi bulan-bulanan tim lawan saat diberikan bola-bola atas.

Faktanya, Timnas Indonesia U-17 menjadi tim Asia Tenggara pertama yang lolos di Piala Dunia U-17 2025 Qatar. Sedangkan Vietnam masih berjuang

ini adalah kontribusi liga, bukan, ini adalah kontribusi bersama, di mana klub mau berkontribusi dan memiliki wadah untuk pemain, sehingga pemain punya latihan fisik bagus karena berkompetisi dengan durasi yang panjang,” kata Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus.

“Musim depan U-20 akan ikut berkompetisi di U-20, kita juga akan menjangkau EPA pemain pemain yang istilahnya bisa dimodifikasi dari anak-anak Liga 2. Ada beberapa (klub) Liga 2 yang berminat ikut berkompetisi di EPA,” ucap Ferry Paulus.

“Kalau partisipasi kompetisi lebih banyak, menit bermain lebih banyak, itu sinkronisasi yang diminta PSSI. Liga 2 wajib U-20, tahun depan wajib U-16 dan U-18, jadi makin banyak yang ikut berkompe-



Tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia U-17 berada di bawah Vietnam, kedua terbawah di Asia.

tisi,” ujarnya.

Persija Jakarta menjadi tim terbanyak yang mengirimkan pemainnya ke Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2025. Macan Kemayoran diwakili enam pesepak bola.

Enam pemain muda Persija yang membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025 di Arab Saudi yaitu Muhamad Zahaby Gholy, Fabio Azka Irawan, Muhammad Al Gazani, Fandi Ahmad Muzaki, Josh Holong, dan Faaris Nurhidayat.

“Kami tentu sangat bangga dengan pencapaian timnas Indonesia di Piala Asia U-17. Mereka berhasil menembus babak 8 besar sekaligus memastikan satu tiket ke Piala Dunia U-17,” ujar Direktur Persija, Mohamad Prapanca. ●



Nova Arianto mampu membuktikan kalau pemain dari liga juga punya kualitas baik asal dibina secara maksimal.

Bahkan media Vietnam, Soha Vn, menyindir Timnas Indonesia U-17 jelang Piala Asia U-17 2025 yang mengatakan tanpa pemain naturalisasi berada di bawah Timnas Vietnam U-17.

“Tanpa pemain naturalisasi, Timnas Indonesia U-17 berada di bawah Viet-

nam, kedua terbawah di Asia,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Sukses Pembinaan Usia Dini

Sementara PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyebut keberhasilan Timnas Indonesia U-17 lolos ke Piala Dunia U-17 2025 sebagai buah dari usaha bersama.

“Tidak semata-mata kami mengklaim

TALENTA MUDA CALON BINTANG MASA DEPAN

Skuad Timnas Indonesia U-17 asuhan Nova Arianto banyak menerbitkan pemain hebat yang akan menjadi bintang sepakbola masa depan. Seperti Matthew Baker pemain Melbourne Australia ini sukses mencuri perhatian karena berhasil mengamankan lini belakang dengan baik. Kemudian ada Zahaby Gholy serta beberapa pemain lainnya.

Namun di ajang Piala Asia U-17 ini, nama Evandra Florasta cukup mencuri perhatian karena memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Asia U17 2025 dengan 3 gol, diikuti Minato Yoshida (Jepang). Pemain muda lainnya yang telah mencetak gol sejauh ini ada Fadly Alberto (1 gol), Zahaby Gholy (1) serta pemain lain pencetak satu gol.

Evandra Florasta, pemuda asal Malang tampil sebagai andalan Timnas U-17 di Piala Asia U-17 2025. Dia juga pernah dipanggil Indra Sjafri untuk memperkuat Timnas U-20 untuk Piala Asia 2025 Februari lalu dan menjadikannya pemain termuda yang tampil saat itu.

Selain Evandra, mayoritas pemain Timnas U-17 saat ini sudah bermain untuk klub Liga 1 dan Liga 2, hal ini menjadi salah satu bukti bahwa pembinaan pemain lokal di klub terus berjalan dan membaik.

Evandra lahir pada tanggal 17 Juni 2008 di Malang, Indonesia. Ia lahir dari pasangan Oktamus Silvester dan Farida Mariana. Ia memiliki darah Maumere NTT dari orang tuanya yang berasal dari Wolowiro Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mereka kini tinggal di Asrama Brigif 18 Jabung, Kabupaten Malang.

Oktamus Silvester ayah Evandra Florasta menceritakan, ketertarikan anaknya pada sepak bola sudah terlihat sejak usia 2 tahun. Namun, baru saat kelas empat SD, orangtua mendaftarkan Evandra ke sekolah sepakbola. Melihat minat anaknya dalam bermain bola, orangtua Evandra memberikan dukungan penuh.

Menurut Oktamus, sebelum bergabung bersama timnas U-17, Evandra sering bermain untuk beberapa tim dalam turnamen sepak bola. Kedisiplinan yang ditanamkan ayahnya sejak kecil terbawa hingga saat ini.

Sukses Angkat Derajat Keluarga

Lain hal dengan Fadly Alberto Hengga. Terlahir dari keluarga sederhana Alberto sukses mengangkat derajat keluarga lewat sepakbola. Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U-17 tanpa jalur tuan rumah. Di tengah kebahagiaan itu, terselip kisah inspiratif yang datang dari sang pencetak gol, Fadly

Alberto.

Demi sampai di titik ini, pemain berdarah Papua-Jawa itu harus melalui petualangan yang penuh kerikil. Perjalanan yang dimulai dari tidur di sebuah rumah sederhana yang berukuran kecil.

Alberto lahir di Papua, tepatnya di Kota Timika, pada 22 Juni 2008. Ia merupakan anak pertama dari pasangan John Cliff Hengga, pria asal Timika, dan Piana, perempuan yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur.

Selama berdomisili di Bojonegoro, Alberto bersama ibu dan satu adik perempuannya tinggal di sebuah rumah kecil. Saking kecilnya, daripada menyebutnya rumah, tempat tinggal Alberto lebih pas disebut gubuk. Bayangkan, ukurannya saja hanya 4X8 meter.

Bangunan itu dibangun dengan papan kayu, beralas tanah, dan atapnya menggunakan seng. Bangunan itu berdiri di atas lahan milik Perhutani. Dilihat dari depan, rumah Alberto tampak seperti warung kopi.

Karena tinggal di lahan milik Perhutani, keluarga Alberto mesti membayar sewa. Dan walau mengeluarkan ongkos sewa, masih harus bersiap andai digusur. Pemilik lahan bisa menggusur bangunan itu kapan saja.

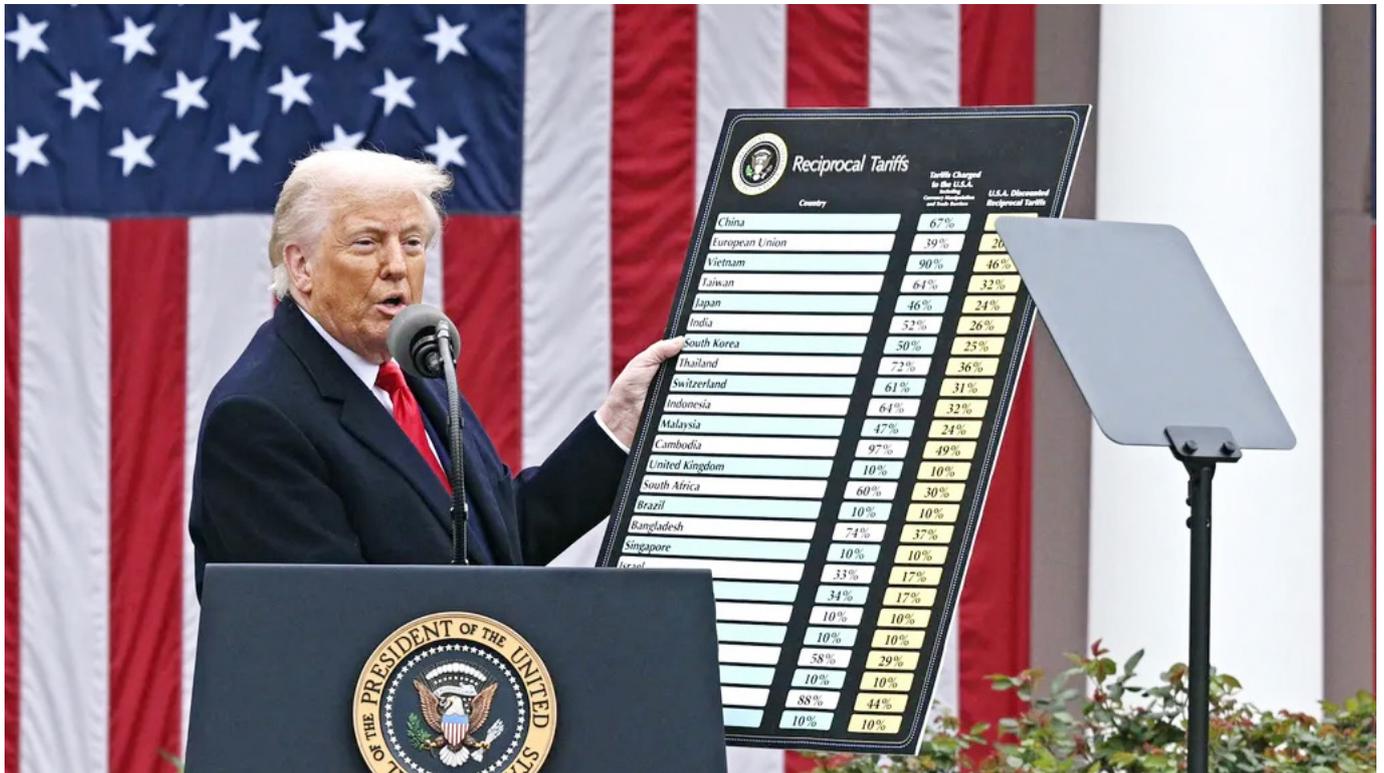
Hidup melarat tak lantas melenyapkan impian, cita-cita, keinginan, hasrat setiap anak. Begitu pula Alberto. Hanya saja, ada anak yang punya privilese, sehingga mungkin tak perlu bekerja terlalu keras. Tapi Alberto jelas mesti bekerja berkali-kali lipat lebih keras.

Asa dan tekad yang bulat wajib dimiliki, dan itu yang menjadi bahan bakar dalam diri Alberto. Bakat sepak bolanya terlihat saat masih berusia delapan tahun. Saat itu Alberto memang memiliki kecintaan pada sepak bola yang teramat dalam. Kecintaan yang pada waktunya nanti, menembus kemiskinan yang menjeratnya. Di usia delapan tahun, Alberto sudah bergabung ke SSB Sukorejo Putra.

Bukan SSB yang besar, namun sering mendulang berbagai prestasi. Tujuh tahun Fadly Alberto menimba ilmu dan pengetahuan sepak bola di SSB tersebut. Pada 2023 lalu, ketika Bhayangkara Presisi FC melatih Alberto mendorongnya ikut berdarah Papua-Jawa ini diterima di Bhayangkara Presisi FC.

Alberto lalu mengalami perkembangan pesat di klub milik Kepolisian Republik Indonesia itu. Performanya yang bagus membawanya naik kelas dari tim B ke tim A. Soal ekonomi, Alberto memang kurang beruntung, tapi nasib baik dari segi karir berada di pundaknya. Belum genap setahun bergabung ke Bhayangkara Presisi FC, karir Alberto melesat ke tim nasional. ●





LANGKAH NEGOSIASI INDONESIA HADAPI KEBIJAKAN TARIF TRUMP

Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, diperkirakan akan berdampak signifikan bagi perekonomian global. Begitu pun bagi kondisi dan kebijakan geopolitik sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia.

Kebijakan tarif impor timbal balik atau reciprocal tariffs itu disebut merupakan kebijakan balasan dari Trump kepada sejumlah negara yang dianggapnya telah menerapkan tarif lebih dahulu atas barang impor asal AS.

"Selama puluhan tahun, negara kita telah dijajah, dirampok, diperkosa, dan dijajah oleh negara-negara di dekat dan jauh, baik kawan maupun lawan," kata Trump di White House Rose Garden, Rabu, 2 April 2025, waktu setempat, dikutip dari Reuters.

Secara teknis, Trump mengenakan tarif dasar baru untuk barang impor yang masuk ke AS, rata-rata sebesar 10 persen. Lalu, sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS dikenakan tarif lebih tinggi. Indonesia termasuk di antaranya.

Indonesia dalam hal ini dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. Tarif ini lebih rendah dari yang dikenakan pada

negara ASEAN lain, seperti Kamboja (49 persen), Laos (48 persen), Vietnam (46 persen), dan Thailand (36 persen). Namun, itu lebih tinggi dari yang dikenakan pada Malaysia dan Brunei (24 persen).

Sejumlah negara dunia, tak terkecuali Indonesia, memberikan beragam reaksi terhadap kebijakan tarif Trump tersebut. Cina, misalnya, merespons dengan berencana mengenakan tarif resiprokal sebesar 34 persen pada semua produk impor dari AS. Tarif balasan itu akan berlaku mulai 10 April 2025.

"Cina mendesak AS untuk segera mencabut tindakan tarif sepihaknya dan bekerja sama dengan mitra dagang untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog yang adil dan konstruktif," kata Kementerian Perdagangan Cina dalam sebuah pernyataan dalam bahasa Mandarin pada Rabu, 2 April 2025 malam, dikutip dari TIME Magazine.



Prancis juga melancarkan reaksi keras dan mengecam kebijakan tarif resiprokal Trump. Juru bicara Pemerintah Prancis, Sophie Primas, menyebut bahwa Trump berperilaku seolah-olah dia adalah “penguasa dunia.”

Primas, sebagaimana dilaporkan CNBC, menegaskan bahwa Uni Eropa kemungkinan akan menerapkan tindakan balasan pada pertengahan dan akhir bulan ini.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengatakan bahwa Uni Eropa tengah menyusun paket tindakan sebagai tanggapan terhadap kebijakan tarif resiprokal AS. Sebagaimana dilansir Reuters, von der Leyen mengatakan bahwa tindakan balasan itu bertujuan melindungi kepentingan dan bisnis negara-negara Eropa jika negosiasi gagal.

Di sisi lain, sejumlah negara merespons kebijakan Trump dengan lebih lunak. Pemerintah Singapura melalui Menteri Perdagangan dan Wakil Perdana Menteri, Gan Kim Yong, mengatakan bahwa Singapura tidak akan memberlakukan tindakan balasan terhadap tarif dasar 10 persen dari AS. Sebab, ada langkah lain yang tersedia di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas AS-Singapura.

“Kami telah memutuskan untuk tidak

melakukannya karena memberlakukan bea masuk pembalasan hanya akan menambah biaya impor kami dari AS,” katanya.

Dosen hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Edwin Martua Bangun Tambunan, menilai, langkah radikal Trump dalam konteks kebijakan tarif resiprokal tersebut semakin menjauhkan hubungan internasional dari kooeksistensi damai.

“Ketegangan yang memuncak di sektor keamanan global akhir-akhir ini, sebenarnya tidak diharapkan semakin meluas ke sektor ekonomi akibat ke-

bijakan seperti yang dilakukan oleh Trump. Reaksi dunia terlihat terbelah, antara agensif dan akomodatif,” ujarnya.

Edwin menjelaskan, negara-negara yang fundamental ekonominya lebih siap, seperti Tiongkok dan negara-negara Uni Eropa, telah mengumandangkan perang tarif dengan mengeluarkan kebijakan retaliasi.

Sementara itu, bagi negara-negara yang menjadikan AS sebagai tujuan utama ekspornya, seperti Indonesia, langkah yang paling aman tentu saja adalah mencoba menegosiasikan kembali tarif yang telah diberlakukan



• INFO EKONOMI

sambil berupaya mendiversifikasi tujuan ekspor.

Strategi pemerintah

Presiden Prabowo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berunding dengan AS.

Pemerintah menjadikan penawaran

kultur yang tidak dimiliki di Indonesia, yakni kedelai dan gandum. Kita juga disiapkan untuk membeli elpiji dan LNG (liquefied natural gas) atau gas alam cair, agar ada peningkatan (impor) dari AS,” ujar Airlangga Hartarto dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Dagang di Menara Mandiri, Jakarta, Se-

nambah (pembelian), tetapi realokasi pembelian, switch. Jadi, tidak mengganggu APBN,” ujarnya.

Hapus kuota impor

Dalam sesi dialog tanya jawab dengan pengusaha, investor, dan buruh, Presiden Prabowo Subianto menyebutkan, pemerintah juga akan menghapus kuota impor. Langkah itu diharapkan lebih menjamin kelancaran arus perdagangan dan mempermudah pelaku usaha.

Menurut Prabowo, penghapusan mekanisme kuota impor itu sudah ia instruksikan langsung kepada jajaran kementerian/lembaga terkait.

“Saya minta, ini ada menteri pertanian, menteri perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota. Siapa mau impor daging, silakan. Siapa saja boleh impor, saudara-saudara. Mau impor apa, silakan, buka saja. Rakyat kita sudah pandai, kok,” kata Prabowo.

Kuota impor adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur jumlah barang yang boleh diimpor ke dalam negeri dalam periode waktu tertentu. Selama ini, kuota impor menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan perdagangan dan melindungi industri dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo tidak mengelaborasi secara detail rencana penghapusan kuota impor itu akan ditujukan untuk komoditas apa saja dan dari negara mana saja.

Namun, dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Pers Media dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, penghapusan kuota impor itu terutama ditujukan untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Reformasi perpajakan

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melakukan reformasi perpajakan secara besar-besaran imbas kebijakan tarif impor AS. Langkah reformasi besar-besaran ini mencakup bidang perpajakan, bea masuk, bea keluar, dan cukai.

“Reformasi ditujukan untuk meringankan beban dunia usaha dan meningkatkan daya saing nasional. Maka, reformasi kali ini dilakukan secara lebih



untuk meningkatkan volume impor dari Amerika Serikat sebagai “upeti” yang diharapkan dapat membuat Presiden Donald Trump merelaksasi tarif impor resiprokal terhadap produk Indonesia sebesar 32 persen. Agar tidak mengganggu neraca perdagangan serta APBN, langkah peningkatan impor produk asal AS akan dilakukan dalam bentuk realokasi dari negara lain.

“Pemerintah akan meningkatkan impor dari AS, utamanya produk agri-

lasa, 8 April 2025. Peluang meningkatkan impor dari AS juga sejalan dengan data neraca perdagangan AS ke Indonesia yang masih defisit mencapai USD18 miliar pada 2024.

Kendati demikian, Airlangga memastikan peningkatan impor dari AS tidak menambah alokasi pembelian secara keseluruhan. Namun, hanya peralihan impor dari produk yang sebelumnya berasal dari negara lain. “Ini tidak me-

ambisius, baik dari sisi administrasi maupun penyesuaian tarif," ujarnya.

Pemerintah mencatat, tarif yang dikenakan terhadap pelaku usaha dapat mencapai 32 persen. Namun, dengan berbagai langkah reformasi yang disiapkan, beban itu dapat ditekan secara signifikan.

Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan perpajakan atas Pajak Penghasilan (PPh) impor akan disesuaikan untuk produk-produk tertentu. Tarif yang semula 2,5 persen akan diturunkan menjadi 0,5 persen. Ini berarti akan ada pengurangan beban pajak sebesar 2 persen.

Selain itu, penyesuaian tarif juga akan dilakukan terhadap produk impor dari AS. Tarif yang semula 5-10 persen akan diturunkan menjadi 0-5 persen.



Dampak terhadap PDB Indonesia akibat tarif resiprokal AS juga diperkirakan akan terbatas.

Kebijakan ini berpotensi menurunkan beban tarif hingga 5 persen.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, kontribusi ekspor Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sekitar 23,8 persen, dan ekspor ke AS hanya mencakup 10 persen dari total ekspor nasional. Dengan begitu, risiko tarif Trump terhadap ekonomi Indonesia tetap terkendali.

"Dampak terhadap PDB Indonesia akibat tarif resiprokal AS juga diperkirakan akan terbatas. Kami melakukan simulasi-simulasi yang sangat intensif selama Lebaran ini," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengingatkan pemerintah agar mengidentifikasi secara tepat produk-produk AS yang volume impornya akan ditambah, sehingga tidak mengganggu industri dalam negeri.

"Jadi, pada prinsipnya kita yang

langsung saja, bagaimana mengidentifikasi produk-produk Amerika yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tentu saja dari segi migas sudah pasti, kemudian kapas, gandum, kedelai, dan jagung," ujar Shinta.

Impor komoditas tersebut dibutuhkan Indonesia karena saat ini tidak bisa memproduksinya sendiri. Namun, Shinta juga menekankan, untuk menjaga kinerja neraca perdagangan, Indonesia juga perlu tetap memiliki ruang ekspor yang besar ke pasar AS.

"Saya contohkan, kita ada misalnya dari tekstil, apparel (pakaian). Kita ekspor besar, tetapi kita juga bisa impor kapas dari Amerika. Nah, ini sedang kita



jajaki," ujar Shinta.

Direktur Utama PT Era Mandiri Cemerlang Tbk, perusahaan pengolah dan pengeksportir beragam produk perikanan, Johan Rose, berharap negosiasi yang diupayakan pemerintah berbuah hasil positif, sehingga ekspor Indonesia semakin tumbuh dan berkembang.

Ia mengatakan, pada 2024, pangsa pasar ekspor perseroan ke AS mencapai 33 persen, meliputi produk tuna, kakap, tenggiri, swordfish, gurita, dan lemadang. Meski dampak pengenaan tarif 32 persen belum bisa dihitung, ia menilai, akan terjadi penurunan permintaan produk pada komoditas primer yang mereka jual di kisaran 10 persen.

"Perseroan berharap tim negosiasi Indonesia yang diwakili Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan

memberikan hasil positif sehingga ekspor Indonesia semakin tumbuh dan berkembang," katanya.

Johan melanjutkan, mereka juga mengharapkan kebijakan lanjutan dari tarif impor yang berupa penurunan tarif Pajak Penghasilan pribadi dan perusahaan AS. Kebijakan tersebut akan memberikan dampak positif dan meningkatkan daya beli masyarakat AS, sehingga kegiatan bisnis dapat kembali berjalan normal.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, menyarankan pemerintah memanfaatkan kekuatan konsumsi domestik sebagai tameng

utama dari kontraksi ekspor akibat pengenaan tarif Trump. Dengan basis penduduk besar, Indonesia punya modal kuat untuk menjaga pertumbuhan melalui belanja rumah tangga.

Menurut dia, perubahan pola konsumsi pasca-pandemi membuat insentif menjadi kunci. Pemerintah bisa mendorong pengeluaran dengan menawarkan potongan harga musiman, diskon listrik, dan stimulus saat hari libur. Ini penting agar average propensity to consume (APC) tetap tinggi dan ekonomi bergerak.

Tentu saja, selain memperkuat konsumsi dalam negeri, upaya negosiasi dan mencari alternatif pasar harus dilakukan secara maksimal. Hal ini penting untuk meredam dampak kebijakan tarif yang diberlakukan Trump terhadap perekonomian Indonesia. •

PRABOWO HAPUS KUOTA IMPOR PETANI RUGI DAN HAMBAT SWASEMBADA

Pemerintah berencana membuka impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk siapa pun, bahkan tanpa kuota impor. Relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri atau TKDN untuk produk AS yang masuk ke Indonesia juga bakal dikaji ulang. Bagaimana pengaruhnya untuk ekonomi dalam negeri?

Jika kebijakan tanpa kuota impor benar-benar dilakukan, hal itu diyakini bakal memicu banjir impor pangan, merugikan petani dan peternak, serta menghambat program swasembada pangan.

Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, 8 April 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ke depan, impor komoditas itu akan lebih terbuka untuk dilakukan siapa saja yang mampu mengimpornya. Salah satu komoditas yang dimaksud adalah daging.

"Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai kok, iya, kan? Bikin kuota-kuota, habis itu hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang ditunjuk boleh impor. Enak saja," katanya.

Penghapusan kuota impor itu merupakan salah satu rencana kebijakan Pemerintah Indonesia untuk merespons pengenaan tarif resiprokal Amerika Serikat sebesar 32 persen atas produk-produk Indonesia.

Dalam Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), RI memang dinilai menghambat perdagangan melalui kebijakan kuota impor, impor berdasarkan neraca komoditas, serta penugasan impor melalui Perum Bulog.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, mengatakan, selama ini, Indonesia telah memberikan bea masuk impor yang cukup ringan untuk 12 komoditas pangan utama, yakni 0-10 persen. Komoditas-komoditas itu adalah beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan



susu.

Dengan tarif ringan tersebut, impor 12 komoditas pangan utama dalam 10 tahun terakhir sudah melonjak 11,79 juta ton. Sebagai gambaran, volume impor ke-12 komoditas itu pada 2014 sebanyak 22,56 juta ton. Pada 2024, volume impornya sudah mencapai 34,35 juta ton.

“Jika impor dibebaskan untuk siapa pun dan kuota impor dihapus, banjir impor pangan akan semakin besar. Ujung-ujungnya, petanilah yang bakal dirugikan,” ujar Dwi, Rabu, 9 April 2025.

Dwi mengatakan, saat ini, petani tengah bergairah meningkatkan produksi pangan seiring bergulirnya program swasembada pangan. Jika jalan yang ditempuh pemerintah berupa pembukaan keran impor secara masif, bahkan tanpa kuota, semangat petani meningkatkan produksi pasti semakin pudar. Program swasembada pangan pun bakal terhambat.

Di era kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia menargetkan swasembada pangan, terutama beras, jagung pakan, garam, dan gula. Bahkan, pemerintah telah menghentikan impor beras pada 2025.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah memiliki cetak biru swasembada daging dan susu sapi 2025-2029 untuk menopang program Makan Bergizi Gratis. Kementan juga telah membuka peluang bagi para investor mendatangkan sapi pedaging dan sapi perah indukan untuk dikembangkan di Indonesia.

Sugianto, Ketua Koperasi Peternakan dan Susu Merapi (KPSM) Seruni, Boyolali, Jawa Tengah, mengaku berminat mengembangkan peternakan sapi perah di daerahnya. Ia bersama gabungan koperasi susu di Indonesia telah mengajukan diri untuk memelihara sapi perah indukan impor.

“Saya khawatir, dengan dibukanya keran impor besar-besaran bagi siapa saja dan tanpa kuota impor, justru membuat impor susu semakin melonjak,” katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah perlu berhati-hati merespons tarif resiprokal dan tudingan AS dalam NTE 2025. Sebelum menderegulasi kebijakan-kebijakan impor, terutama pangan, pemerintah tetap

harus mengedepankan perlindungan terhadap petani dan peternak serta program swasembada pangan.

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan di Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra PG Talattov, berpendapat, pernyataan Prabowo terkait

“Salah satunya adalah impor pangan hanya dapat dilakukan jika produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau belum dapat diproduksi di dalam negeri,” kata Abra.

Kedua, UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pasal 15 UU itu menyebutkan,



kebijakan membuka keran impor dan menghapus kuota impor masih terlalu umum. Presiden belum menyebut secara spesifik komoditas yang dimaksud, kecuali daging.

Kendati begitu, untuk menderegulasi kebijakan impor pangan, pemerintah tetap harus berpijak pada dua undang-undang. Pertama, UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana Pasal 36 meletakkan prinsip dasar kebijakan impor pangan.

pemerintah wajib mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan impor pangan harus melalui mekanisme koordinasi antarkementerian terkait.

“Dari kedua UU itu, pemerintah tidak dapat mengimpor semua komoditas pangan begitu saja demi melindungi petani. Impor pangan hanya bisa dilakukan jika ada kekurangan produksi dan ada komoditas yang tidak dapat diprod-

• INFO EKONOMI

uksi di dalam negeri," katanya.

Untuk itu, Abra merekomendasikan agar pemerintah mengidentifikasi terlebih dahulu komoditas-komoditas pangan impor yang bakal diregulasi. Selain itu, perhitungkan juga tingkat sensitivitas kebijakan deregulasi itu terhadap produsen (petani dan peternak) dan industri dalam negeri.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan deregulasi impor itu tidak menghambat program swasembada pangan dan cadangan pangan pemerintah. Dengan sejumlah pertimbangan itu, Indonesia masih dapat mengimpor

komoditas yang diimpor dengan yang diproduksi di dalam negeri.

Relaksasi TKDN Jangan Kebablasan

Pelaku industri meminta relaksasi TKDN tidak dibuka ke semua negara agar tidak menyebabkan banjir barang impor di pasar domestik. Aturan TKDN adalah salah satu isu nontarif yang disoroti AS dalam menerapkan tarif impor 32 persen terhadap produk-produk asal Indonesia. AS meminta Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan syarat TKDN-nya terhadap sejumlah produk AS.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat

"(Aturan) Yang disederhanakan cukup yang AS minta saja. Kalau semua tata niaga (TKDN) dibuka, kita bisa banjir impor dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Jadi, cukup produk dari AS saja yang dilonggarkan, seperti TKDN alat kesehatan dari AS," kata Gita, Selasa, 8 April 2025.

Gita meyakini, dengan negosiasi peningkatan volume impor kapas dari AS sebanyak 20-50 persen serta relaksasi TKDN khusus beberapa produk AS, Indonesia bisa mendapatkan potongan tarif impor dari Trump.

Menurut dia, masih ada ruang untuk



jagung pakan serta menambah impor gandum dan kedelai dari AS.

"Saat ini, impor jagung pakan memang masih dibutuhkan sembari menunggu realisasi swasembada jagung. Sementara gandum dan kedelai bakal terus dibutuhkan karena Indonesia kesulitan memproduksinya di dalam negeri," katanya.

Abra menambahkan, Indonesia tetap perlu mempertahankan neraca komoditas. Neraca tersebut dapat digunakan sebagai alat menjaga keseimbangan

dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan, untuk menjaga daya saing produk industri dalam negeri agar terserap maksimal di pasar, pemerintah harus jeli dalam mengkaji rencana relaksasi TKDN.

TKDN merupakan instrumen penting untuk melindungi industri Tanah Air. Oleh karena itu, relaksasi syarat TKDN sebaiknya hanya untuk produk AS demi kepentingan negosiasi dengan Trump. TKDN tidak boleh direlaksasi untuk semua negara.

meningkatkan volume impor bahan baku dari AS untuk sektor tekstil dan produk tekstil dalam negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pakaian jadi dan aksesoris pakaian bukan rajutan yang diekspor ke AS mencapai USD2,06 miliar dengan volume 69,97 juta kg pada 2023. Adapun pada 2024, jumlahnya meningkat menjadi USD2,12 miliar dengan volume 72,18 juta kg.

Sementara pada 2024, nilai impor kapas dari AS mencapai USD151 juta den-

gan volume 70,3 juta kg. Angka itu turun dibandingkan impor kapas dari AS pada 2023, yaitu USD195 juta dengan volume 84,8 juta kg.

Adapun total impor kapas dari sejumlah negara sepanjang 2023 mencapai USD1,5 miliar dengan volume 467 juta kg. Angka tersebut menurun tipis pada 2024 dengan nilai impor USD1,49 miliar dan volume 508 juta kg.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI), Yohanes P Widjaja, meyakini, Pemerintah Indonesia akan memikirkan secara matang rencana relaksasi TKDN. Pemerintah pasti akan memikirkan dampak negatif jika TKDN dibuka luas.

Sebab, hal itu akan berdampak pada banjir produk impor dari banyak negara. Apalagi, kini ada ancaman dumping barang impor dari negara lain yang terdampak tarif Trump dan sedang mencari pasar lain. Berbagai hal itu akan membuat industri manufaktur dalam negeri semakin tidak sehat.

APPI bersama asosiasi lain sudah menyuarkan perihal TKDN ini kepada pemerintah. Kepastian bahwa relaksasi TKDN hanya khusus untuk produk AS tentu disambut positif oleh pelaku usaha. Di luar AS, kebijakan TKDN tidak dilonggarkan demi menjaga daya saing produk dalam negeri.

"Kami sudah menyuarkan terkait TKDN ini kepada pemerintah. Jadi, TKDN tetap akan melindungi industri kita dari produk luar," ujar Yohanes.

Namun, meski TKDN hanya dilonggarkan untuk AS pun, pemerintah tetap harus menguatkan regulasi terhadap barang impor murah yang masih bisa masuk ke pasar domestik. Ia mengingatkan, Indonesia sangat berpotensi menjadi pasar besar bagi banyak negara yang kini terimbas tarif AS.

"Indonesia akan menjadi secondary market, serbuan produk-produk asing dari China dan banyak negara yang tidak bisa masuk ke AS akan beralih dan menyerbu Indonesia. Ini harus diantisipasi betul, salah satunya dengan TKDN. Kalau TKDN secara umum dihapus, habis kita," tuturnya.

Penerapan tarif impor dari AS kepada banyak negara harus menjadi momentum pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat ekonomi nasional. Produk-

produk industri manufaktur dalam negeri harus dipastikan semakin banyak terserap di pasar domestik.

Agar industri dalam negeri bisa bertahan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional, pelaku industri harus memperluas ekspansi pasar di luar AS. Untuk produk elektronik/listrik, pasar yang berpotensi untuk diperluas antara lain Timur Tengah, sejumlah negara di

mua elemen. "Iklim usaha hingga stabilitas politik dan sosial harus dijaga betul agar kondusif. Kita sama-sama buat Indonesia maju. Justru peran masyarakat begitu krusial di tengah situasi saat ini," lanjut Yohanes.

Berdasarkan data BPS, nilai ekspor produk mesin dan peralatan listrik serta bagian-bagiannya ke AS mencapai USD3,45 miliar pada 2023 dan mening-



Afrika, Filipina, Singapura, dan Malaysia.

"Pasar kita di AS memang besar, tapi ada pasar-pasar alternatif yang kita kembangkan juga. Ini agar kita tidak kehilangan pasar ekspor. Justru dari krisis ini, kita dan industri lain harus terpecut untuk semakin kuat. Ini jadi peluang untuk berkontribusi lebih demi ekonomi Tanah Air," ujarnya.

Kontribusi itu tidak hanya dari pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga se-

kat menjadi USD4,18 miliar pada 2024.

Produk listrik RI ke AS pada 2023 mencapai 127 juta kg dan meningkat menjadi 391 juta kg pada 2024. Sementara pada Januari 2025, produk listrik yang diekspor ke AS sudah mencapai USD349,75 juta dengan berat 30,4 juta kg. Industri listrik bahkan menjadi komoditas yang dengan kontribusi nilai ekspor tertinggi dari total 15 sektor utama Indonesia. ●



31 DUBES BARU DAN MISI ASTA CITA

Setelah lolos uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Komisi I DPR periode 2019-2024 pada pertengahan September 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik 31 Duta Besar dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk sejumlah negara.

Kabar pelantikan itu mulai beredar pada Maret 2025. Keputusan pun datang dari Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

"Sore ini, Senin, 24 Maret 2025, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Para Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk mewakili negara di berbagai kawasan strategis di dunia, termasuk di beberapa organisasi Internasional," kata Yusuf dalam keterangan resmi.

Sebelumnya, DPR meloloskan 33 nama calon Duta Besar (Dubes) melalui rapat tertutup yang berlangsung pada Selasa dan Rabu, 17-18 September 2024. Ketua Komisi I DPR RI (kala itu) Meutya Hafid mengatakan, lembaga legislatif telah memberikan persetujuan dengan catatan terhadap 33 calon Dubes luar biasa dan berkuasa penuh

(LBBP) RI yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi I DPR RI.

"Ya (disetujui), ada catatan, sifatnya rahasia. Saya enggak mungkin sampaikan," kata Meutya.

Ketika ditanyakan kapan nama-nama tersebut akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk disetujui, dia menyerahkan hal tersebut kepada pimpinan DPR RI. Terkait kemungkinan adanya tambahan calon dubes LBBP RI lainnya yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan selanjutnya oleh Komisi I DPR, Meutya menyebut bahwa kemungkinan besar hanya ada 33 nama itu.

Mengenai kemungkinan tambahan nama, kaitannya adalah daftar 46 nama yang diajukan Presiden untuk mendapatkan pertimbangan dari DPR RI sebagai dubes LBBP RI. Namun Meutya menegaskan, Komisi I DPR periode 2019-2024 hanya menerima 33 nama



itu

“Ya, sepertinya melihat waktunya kan sudah selesai. Minggu depan kita sudah minggu terakhir,” kata dia mengenai masa tugas DPR yang segera berakhir.

Alhasil, dari 33 calon yang lolos fit and proper test dengan catatan tadi, Presiden Prabowo melantik 31 Dubes pada Senin, 24 Maret 2024. Pelantikan para Dubes kali ini bersandar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25/P dan 40/P Tahun 2025 tentang pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan petikan Keppres itu di awal prosesi pelantikan. Selanjutnya Presiden Prabowo mendiktekan sumpah jabatan yang diikuti oleh para Duta Besar.

“Demi Allah saya bersumpah, demi Tuhan saya berjanji,” kata para Duta Besar mengikuti sumpah jabatan.

“Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti

saya kepada bangsa dan negara,” sambung teks sumpah jabatan yang dibacakan Presiden dan diikuti oleh para Dubes yang dilantik.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat, dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Duta Besar Luar Biasa

dan Berkuasa Penuh. Kiranya Tuhan menolong saya,” tutup para duta besar.

Setelah pelantikan, Prabowo memberikan ucapan selamat dengan menyalami para duta besar yang dilantik satu per satu. Hadir dalam pelantikan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Tampak pula Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul





Muhaimin Iskandar, serta Anggota DPR RI Budisatrio Djiwandono.

Usai upacara pelantikan, Dubes Cecep Herawan mewakili rekan-rekannya menyampaikan komitmen penuh untuk menjalankan tugas sebagai perpanjangan tangan negara di negara sahabat. Dalam wawancara singkat, ia menjelaskan pentingnya menjaga visi dan misi yang telah disepakati, khususnya dalam mendukung program pemerintahan Prabowo.

"Saya bersama 31 dubes lainnya baru saja dilantik oleh Presiden RI, di

mana kita sudah mengangkat sumpah dan janji kami untuk terus menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjalankan seluruh perintah UU yang diamanatkan kepada kami sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh di masing-masing negara," ujar Cecep dengan penuh semangat, kepada awak media.

Menurut dia, tugas sebagai duta besar bukan hanya sekadar mewakili Indonesia, tetapi juga menjaga hubungan bilateral yang harmonis dengan negara sahabat, serta memperjuangkan kepent-

ingan nasional. "Menjadi dubes adalah perpanjangan tangan dari negara di negara sahabat. Kami semua telah melalui proses orientasi yang dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan kami memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan program pemerintahan, khususnya yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan astacitanya," lanjut Cecep.

Asta Cita, yang menjadi nilai penting dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, adalah landasan moral yang mencerminkan komitmen dan kejujuran dalam menjalankan tugas negara. Para dubes yang baru dilantik pun bertekad untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam setiap langkah diplomasi mereka.

"Kami yakin dengan dukungan dan arahan yang datang dari pusat, kami sebagai wakil bangsa di negara masing-masing akan mampu berjuang dan berkontribusi positif untuk pembangunan bangsa dan negara," tegasnya.

Selamat bertugas untuk Bapak dan Ibu Para Dubes RI yang dilantik kali ini. Semoga sukses mengemban amanat sebagai diplomat yang bertugas di luar negeri. • Editor: GE





DAFTAR DUBES YANG DILANTIK PRESIDEN PRABOWO

1. Manahan M. P. Sitompul sebagai Duta Besar untuk Bosnia dan Herzegovina.
2. Penny Dewi Herasati sebagai Duta Besar untuk Hungaria.
3. Muhsin Syihab sebagai Duta Besar untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO).
4. Siti Nugraha Mauludiah sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Denmark, merangkap Republik Lithuania.
5. Tyas Baskoro Her Witjaksono Adji sebagai Duta Besar untuk Republik Kenya, merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT).
6. Marsekal TNI (Purn) Yuyu Sutisna sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Maroko merangkap Republik Islam Mauritania.
7. Yayan Ganda Hayat Mulyana sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Swedia, merangkap Republik Latvia.
8. Fikry Cassidy sebagai Duta Besar untuk Bolivarian Venezuela, merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago.
9. Listiana Operananta sebagai Duta Besar untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Macedonia Utara.
10. Rina Prihtyasmiasi sebagai Duta Besar untuk Republik Ceko.
11. Vedi Kurnia Buana sebagai Duta Besar untuk Republik Chile.
12. Faizal Chery Sidharta sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Federal Ethiopia, merangkap Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union.
13. Hersindaru Arwityo Ibnu Wiwoho Wahyutomo sebagai Duta Besar untuk Republik Finlandia, merangkap Republik Estonia.
14. Dicky Komar sebagai Duta Besar untuk Republik Lebanon.
15. Didik Eko Pujiyanto sebagai Duta Besar untuk Republik Irak.
16. Chandra Warsenanto Sukotjo sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Pakistan.
17. Rolliansyah Soemirat sebagai Duta Besar untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan.
18. Junimart Girsang sebagai Duta Besar untuk Republik Italia, merangkap Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT).
19. Agung Cahaya Sumirat sebagai Duta Besar untuk Republik Kamerun, merangkap Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.
20. Cecep Herawan sebagai Duta Besar untuk Republik Korea.
21. Simon Djatmoko Irwantoro Soekarno sebagai Duta Besar untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika.
22. Kartika Candra Negara sebagai Duta Besar untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi.
23. Mirza Nurhidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Namibia, merangkap Republik Angola.
24. Bambang Suharto sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Nigeria merangkap Republik Benin, Republik Burkina Faso, Republik Ghana, Republik Kongo, Republik Liberia, Republik Niger, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, Republik Togo, Gabon, dan ECOWAS.
25. Hendra Halim sebagai Duta Besar untuk Republik Panama, merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua.
26. Susi Marleny Bachsin sebagai Duta Besar untuk Republik Portugal.
27. Ardian Wicaksono sebagai Duta Besar untuk Republik Senegal, merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone.
28. Andreano Erwin sebagai Duta Besar untuk Republik Serbia, merangkap Montenegro.
29. Agus Priyono sebagai Duta Besar untuk Republik Suriname, merangkap Republik Kooperatif Guyana.
30. Siti Ruhaini Dzuhayatin sebagai Duta Besar untuk Republik Uzbekistan, merangkap Republik Kyrgyzstan.
31. Arief Hidayat sebagai Duta Besar untuk Republik Zimbabwe, merangkap Republik Zambesi. ●



MEMPERBAIKI MORAL MEMBANGUN EKONOMI DESA

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kementerian Agama bekerja sama dalam menghadirkan program Pemberantasan Buta Huruf Al Quran dan Satu Desa Satu Majelis Taklim.

Kolaborasi itu ditandai dengan pelaksanaan Kick Off Kerja Sama di Masjid Izzatul Islam Grand Wisata Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Senin, 24 Maret 2025.

"Insya Allah kita akan kick off membangun majelis taklim, TPQ, termasuk juga agama lain, sehingga akhlak atau kehidupan di masyarakat desa lebih

Yandri mengatakan, kerja sama antara Kemendes PDT dan Kemenag tersebut merupakan upaya pengembangan majelis taklim di tingkat desa yang diharapkan bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar-warga, sekaligus sarana meningkatkan pengetahuan keagamaan.

Yandri juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap fenomena anak-anak yang kini tidak lagi mengaji.

Menurutnya, kolaborasi dengan Kementerian Agama itu menjadi sangat bernilai penting karena berkaitan erat juga dengan pembangunan moral.

"Kolaborasi ini penting karena membangun moral manusia adalah tantangan yang lebih besar daripada pembangunan infrastruktur," kata Mendes Yandri.

Untuk itu, Kemendes DPT bersama Kementerian

Selain dengan Kemenag, Kementerian Desa PDT juga mengajak Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI) untuk berkolaborasi membangun desa. Kolaborasi yang dibutuhkan ada pada aspek dakwah untuk memperbaiki moral masyarakat desa agar terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Ayo kita keprungu desa secara bersama-sama karena kita bukan superman, tapi superteam. Jika bersama bergerak, maka Insya Allah ekonomi tumbuh dan dakwah untuk umat pun semakin gencar," kata dia.

Yandri menyinggung mengenai pentingnya gerakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang dapat dilakukan melalui langkah pemberdayaan dan pendampingan.

Pola pikir masyarakat harus dibentuk agar produksi dalam pengelolaan potensi desa bisa dilakukan secara maksimal, begitu pula dengan pemasaran yang sifatnya berkelanjutan.

Apalagi saat ini, diketahui sejumlah program pemerintah memang yang berpihak ke desa, seperti BUMDes, Makan Bergizi Gratis, hingga yang terbaru adalah program Koperasi Desa Merah Putih.

"Program Makan Bergizi Gratis misalnya, desa bisa menyiapkan bahan bakunya seperti telur, ikan hingga ayam. Bayangkan jika nanti penerima manfaat itu 82 juta, berarti setiap hari butuh telur sebanyak 82 juta butir. Untuk itu, desa harus berperan, jangan jadi penonton saja," kata Mantan Wakil Ketua MPR itu.

Sejalan dengan hal itu, Kemendes PDT telah menerbitkan modul untuk desa-desa tematik seperti Desa Telur,



maju, lebih beradab, dan lebih bermanfaat dunia akhirat," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto.

Agama akan terus berupaya menjalankan program itu di seluruh desa di Indonesia yang dimulai pencanangannya di Desa Lambangsari.

Desa Cabai, hingga Desa Ayam, untuk menyuplai bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis.

Koperasi Desa Merah Putih, kata Yandri, membutuhkan sekitar 240.00 orang yang akan mengelola di desa. Dengan demikian, GPII bisa mengambil peran untuk mengembangkan Koperasi Desa itu.

Koperasi Desa itu juga nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti toko sembako hingga klinik yang membutuhkan tenaga terampil. Oleh karena itu, Yandri menantang GPII menunjuk Desa Binaan untuk didampingi dan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Yandri berharap agar GPII bersama Kemendes PDT mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Asta Cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Selanjutnya, Kemendes PDT juga menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna menciptakan desa bebas intoleransi dan radikalisme di Indonesia.

Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, menekankan pentingnya kehadiran negara dalam upaya pencegahan terorisme, sehingga dibutuhkan sinergi seluruh komponen bangsa, termasuk kolaborasi kementerian dan lembaga di dalamnya.

"Kuncinya memang kolaborasi dan kebersamaan menunjukkan negara hadir dan kemudian satu bahasa dalam pencegahan terorisme," ujar Eddy.

Eddy juga memperkenalkan Desa Siap Siaga yang diharapkan menjadi bagian penting dari implementasi kesiapsiagaan nasional sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Desa Siap Siaga merupakan desa atau kelurahan dengan penduduk yang memiliki tingkat kesadaran tinggi sesuai dengan alat ukur yang disiapkan dalam hal mengantisipasi ancaman radikal terorisme di lingkungannya.

Program Desa Siap Siaga bertujuan

untuk memastikan bahwa setiap desa memiliki prosedur operasional standar pencegahan terorisme, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme, serta membangun sistem deteksi dini.

Senada dengan itu, Yandri juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung program tersebut. "Prinsipnya kami siap, ini sangat bagus nanti realisasinya bagaimana, bisa kita melibatkan 40 ribu orang, ada kepala desa, pendamping desa, ada camat. Intinya kami punya jangkauan untuk melakukan sosialisasi bagaimana bahaya terorisme," ungkap Yandri.

Yandri juga mengharapkan kolabo-

kami," ujar Yandri.

Yandri berharap kolaborasi dengan organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah yang memiliki basis hingga ke desa dapat memperkuat kerja sama dan memberikan manfaat bagi desa di seluruh Indonesia.

Yandri menyampaikan alasan pentingnya penguatan dakwah di desa-desa karena narkoba, minuman keras, judi online, dan lain sebagainya sudah sangat mengkhawatirkan dan perlu segera diatasi.

Yandri mengatakan, kontribusi Muhammadiyah dalam membangun dan memajukan bangsa tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, ia akan



rasi dengan BNPT dapat segera terealisasi dan menciptakan desa-desa yang bebas dari intoleransi maupun radikalisme.

"Mudah-mudahan dari pertemuan ini bisa direalisasikan desa bebas radikalisme, sehingga desa toleransi semakin hari semakin banyak dan menorehkan prestasi yang luar biasa," tutur dia.

Kemendes PDT juga menggandeng Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berkolaborasi menguatkan ekonomi dan dakwah di desa-desa di seluruh Tanah Air.

"Dengan jam terbang Muhammadiyah yang luar biasa, kita mohon ada kerja sama yang kuat dan riil di desa-desa. Tentu jam terbang Muhammadiyah yang luar biasa itu akan menjadi modal yang sangat berharga buat

mereplikasi hal yang sudah dilakukan Muhammadiyah untuk kemajuan di desa-desa di Indonesia.

Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengapresiasi langkah-langkah Kemendes PDT dalam menyelesaikan beragam persoalan untuk membangun desa-desa di Indonesia.

Menurut dia, sinergi antara Kemendes PDT dengan Muhammadiyah akan bergerak di sektor penguatan ekonomi dan dakwah keagamaan, peningkatan sumber daya manusia dan lain sebagainya.

PP Muhammadiyah akan melakukan sosialisasi kepada Pimpinan Wilayah sampai ke tingkat ranting agar bisa terus mendampingi dan bekerja sama sesuai dengan peta geospasial yang ada di Kemendes PDT. ●

Cabut Moratorium PMI ke Arab Saudi INCAR DEvisa RP31 TRILIUN

Setelah diberlakukan sekitar satu dekade, moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi akan dicabut. Menurut rencana, pengiriman pekerja migran akan dimulai pada Juni 2025.

Pemerintah meyakini, saat ini sudah ada sistem perlindungan tenaga kerja baik dari segi upah, kesehatan, dan keselamatan jiwa yang diterapkan di negara tersebut.

Rencana pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi disampaikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, 14 Maret 2025.

Menurutnya, Arab Saudi menawarkan kesempatan kerja untuk sekitar 600.000 pekerja migran Indonesia (PMI). Dari total jumlah itu, 400.000 lowongan di antaranya ada di sektor domestik. Sementara 200.000-250.000 lowongan lainnya berasal dari sektor formal.

Namun, kata Karding, pengiriman PMI tidak ditargetkan untuk bisa langsung memenuhi seluruh lowongan kerja itu. Presiden meminta agar Kementerian P2MI terlebih dahulu mempersiapkan skema pelatihan dan penempatan para PMI. Persiapan kompetensi para PMI dinilai penting agar Indonesia bisa mengirim tenaga kerja sekaligus mendapatkan devisa secara op-

timal.

"Devisa yang kemungkinan masuk dari situ Rp 31 triliun. (Itu) devisa remitansi yang akan masuk kemungkinan kalau kita bisa menempatkan 600.000 lebih (PMI)," tutur Karding.

Jaminan perlindungan

Karding mengakui, moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi selama satu dekade terakhir masih dipertahankan karena sistem perlindungan tenaga kerja yang minim. Namun, dalam rentang waktu itu pula ada setidaknya 25.000 warga negara Indonesia yang bekerja di Arab Saudi secara ilegal.

Oleh karena itu, sejak beberapa bulan terakhir, pihaknya berkomunikasi dengan Kementerian Tenaga Kerja Arab Saudi untuk membuka peluang pengiriman PMI secara legal.

Langkah itu didasari oleh kebijakan Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman, yang lebih melindungi pekerja migran. "Mereka (Arab Saudi) menjamin minimal gaji di angka 1.500 real. Lalu ada perlindungan dalam konteks asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi ketenagakerjaan," ujarnya.

Selain itu, ada

pula integrasi data antarkedua negara sehingga para pekerja migran yang datang tanpa prosedur resmi akan lebih terkontrol. Tak hanya itu, penempatan PMI juga akan dikerjasamakan dengan agensi di Arab Saudi, Musaned. Para pihak yang membutuhkan PMI terlebih dulu harus mendaftar ke Musaned dan menyimpan deposit gaji untuk para pekerja.

"Yang menarik lagi, setiap selesai kontrak dua tahun, untuk orang Indonesia dikasih bonus umrah sekali," tutur Karding.

Di internal, Kementerian P2MI juga akan membentuk desk perlindungan pekerja migran. Desk ini ditargetkan bisa memperbaiki tata kelola perlindungan PMI dan meminimalkan kekerasan ataupun perdagangan manusia (human trafficking) di luar negeri.

Caranya dengan memastikan pengirim

an PMI sesuai dengan prosedur. Sebab, 95 persen kejadian kekerasan maupun perdagangan manusia terjadi karena pengiriman PMI ilegal.

"Perlindungan bagus itu kuncinya memastikan negara itu tidak menerima



pekerja yang ilegal," ujar Karding.

Selain itu, penindakan terhadap calo dan sindikat perdagangan orang juga harus digencarkan. Sosialisasi juga harus dilakukan secara masif agar masyarakat memahami prosedur pengiriman PMI yang sesuai dengan aturan. Keterampilan PMI juga perlu ditingkatkan karena selama ini 80 persen dari total PMI yang dikirim merupakan pekerja domestik berpendidikan rendah.

Evaluasi Moratorium

Direktur Eksekutif Migrant Care, Wahyu Susilo, mengatakan, rencana pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi sudah beberapa kali diwacanakan, termasuk di akhir masa jabatan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, atau akhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, hal itu tidak pernah dieksekusi.

"Ini menunjukkan pemerintah tidak serius dalam pembatalan Keputusan Menaker Nomor 260 Tahun 2015 dan menyebabkan daya tawar kita rendah," tuturnya.

Menurut Wahyu, semestinya ada evaluasi apakah implementasi moratorium berjalan efektif atau justru menimbulkan dampak negatif. Pemerintah juga semestinya memiliki exit strategy ketimbang sekadar memfavoritkan negara-negara Timur Tengah sebagai tujuan pengiriman PMI. Sebab, rekam jejak negara-negara ini dalam perlindungan hak asasi para pekerja migran sangat rendah.

"Meskipun kita tidak bisa melarang orang bermigrasi, tugas negara adalah melindungi warga negaranya. Karena itu, lebih baik, pemerintah membuat exit strategy (terkait PMI) ke negara-negara yang lebih ramah PMI. Karena membuat MoU terkait PMI dengan Arab Saudi dan negara-negara lain di Timur Tengah tak pernah berhasil," tuturnya.

Kalaupun pemerintah serius mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, kata Wahyu, perlu ada audit kinerja perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Sebab, banyak pemilik P3MI yang merangkap penyelenggara umrah dan memberangkatkan PMI dengan visa umrah alias secara ilegal.

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per 4 Juni 2024,

jumlah P3MI berizin di Indonesia mencapai 433 perusahaan. Sepanjang 2015-2024, terdapat 221 perusahaan P3MI dicabut izinnya.

Wahyu juga mengingatkan, komitmen perlindungan juga harus dituangkan dalam dokumen nota kesepahaman bilateral kedua negara bila moratorium betul-betul dicabut. Jangan sampai isi dokumen hanya terkait teknis operasional penempatan.

Perlu Hati-hati

Komisi IX DPR RI meminta pemerintah berhati-hati dalam mencabut morato-

Charles mendesak pemerintah untuk menjamin adanya kepastian upah yang layak, perlindungan asuransi kesehatan, serta asuransi kecelakaan kerja bagi PMI yang nantinya bekerja di Arab Saudi. Politikus PDIP itu juga meminta kementerian selain Kementerian P2MI ikut terlibat.

la mengatakan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan di Arab Saudi perlu menyiapkan mekanisme pengadaan yang mudah diakses dan responsif. "Termasuk menyediakan shelter bagi PMI yang mengalami masalah," kata Charles.



rium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, mengatakan pemerintah harus memastikan regulasi perlindungan pekerja migran di Arab Saudi kini lebih baik daripada sebelumnya.

Menurut Charles, Komisi IX akan terus mengawal perlindungan PMI, termasuk mereka yang di Arab Saudi, supaya pelanggaran hak di masa lalu tidak terulang. "Negara wajib hadir untuk melindungi pekerja migran, yang merupakan pahlawan devisa bagi Indonesia," ujarnya. •

TRANSMIGRASI LOKAL WARGA REMPANG SUKARELA ATAU RELOKASI PAKSA

Kementerian Transmigrasi memastikan pelaksanaan program transmigrasi lokal di kawasan Batam-Rempang-Galang atau Bareleng berlangsung dengan sukarela dan tanpa paksaan. Benarkah?

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, menjelaskan, program transmigrasi lokal di kawasan Bareleng tersebut bertujuan un-

Menurut dia, jika pihaknya memaksakan masyarakat setempat untuk mengikuti program transmigrasi lokal tersebut, hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Selain itu, konsep transmigrasi modern yang tengah dikembangkan saat ini berbeda dengan penyelenggaraan transmigrasi pada masa lalu.

Iftitah menekankan, program transmigrasi kini tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi fokus membangun ekosistem perekonomian baru. Kementerian Transmigrasi berkomitmen mengembangkan area transmigrasi untuk menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi (KETT).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) hingga fasilitas cold storage dan packing.

"Di sini luar biasa potensinya, bukan hanya soal pasir silika, melainkan ada wisata bahari dan ada kelautan," ujarnya.

Mentrans berharap pelaksanaan transmigrasi lokal di kawasan Bareleng dapat memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan potensi daerah mereka sendiri. Dia pun menekankan kembali bahwa keputusan untuk mengikuti transmigrasi lokal berada di tangan penduduk.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Batam pada 2023, terdapat total 2.637 kepala keluarga (KK) yang terdampak



tuk menyelesaikan konflik tanah adat terkait pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

"Tidak ada namanya program transmigrasi itu menggusur atau merelokasi, tidak ada, karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 yang namanya transmigrasi itu harus bersifat sukarela," ucap Iftitah di Sembulang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Sabtu, 29 Maret 2025.

Untuk mewujudkan KETT di kawasan Bareleng, Pemerintah tidak hanya membangun rumah tempat tinggal baru bagi warga, tetapi juga fasilitas pendidikan, termasuk pembelajaran jarak jauh untuk tingkat perguruan tinggi.

Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyediakan kapal nelayan serta membangun dermaga ikan tangkap beserta

pembangunan PSN Rempang Eco City dengan 961 KK terdampak pembangunan Tahap I.

Per Maret 2025, Kementrans dan BP Batam mencatat 436 KK sudah mendaftar program transmigrasi, 232 KK telah pindah ke hunian sementara, serta 68 KK telah pindah ke hunian tetap dan telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM).

Sebelumnya, Iftitah menyampaikan, Pulau Rempang dirancang sebagai ka-

wasan transmigrasi karena ada potensi industri pasir silika yang bisa dibangun. Selain itu, sudah ada investor yang siap berkolaborasi, yakni Xinyi Group, dengan estimasi nilai investasi awal Rp 198 triliun.

Iftitah mengklaim penataan Kawasan Transmigrasi Rempang akan bermanfaat untuk masyarakat lokal. Terlebih, ada potensi penciptaan lapangan kerja mulai dari 57 ribu hingga 85 ribu orang dari industri tersebut. Dia memastikan warga Rempang bisa terserap menjadi tenaga kerja.

"Saya sudah bicara dengan perwakilan investor, dari PT MEG (Makmur Elok Graha/pengembang Rempang Eco City), mereka menjamin 100 persen. Nanti akan dilakukan pelatihan untuk mereka (warga Rempang) masuk (jadi tenaga kerja)" kata dia.

Ia juga tidak mempersoalkan warga yang tetap ingin menjadi nelayan. Malah, ia berjanji akan memberi pendampingan dan kapal berukuran 30 GT kepada nelayan yang bersedia mengikuti program ini. Dengan kapal besar, Iftitah berharap nelayan Rempang bisa melaut lebih jauh dan memperoleh hasil lebih banyak. Dengan begitu, pendapatan bisa meningkat berkali lipat.

Saat ini, menurut dia, nelayan Rempang setidaknya memiliki pendapatan Rp200 ribu dari sekali melaut menggunakan kapal kecil. Kegiatan melaut itu pun biasanya dilakukan selang-seling sehingga siklusnya hanya 15 kali dalam sebulan. "Berarti, pendapatan sekitar Rp 3 juta sebulan," ujarnya.

Bila nelayan menggunakan kapal berukuran 30 GT, nelayan bisa melaut lebih jauh, lebih lama, dan berkelompok. Bila ada 10 orang melaut selama sepekan dan menghasilkan Rp30 juta, Iftitah berhitung, nelayan bisa mengantongi Rp3 juta per orang setiap pekan. Bila melaut sebanyak tiga hingga empat kali per bulan, pendapatan pun diperkirakan mencapai minimal Rp9 juta.

"Hitungan saya, akan ada peningkatan tiga sampai empat kali lipat kalau kapalnya besar," ujar Politikus Partai Demokrat itu.

Di sisi lain, ia menyadari rencana ini bukan rencana mudah. Ia tahu, tidak semua nelayan Rempang mau atau tertarik. "Itu yang saya sebut dengan rasa. Ada orang yang dapat sedikit sudah

cukup, ada yang rajin lembur untuk terus meningkatkan kesejahteraan," katanya.

Karena itu, ia tidak mau sesumbar soal dampak ekonomi yang bisa didapat dari program transmigrasi. "Tidak bisa dipukul rata, melalui transmigrasi akan dapat Rp30 juta," kata dia.

Namun hingga kini, mayoritas warga terdampak Rempang Eco City menolak program tersebut. Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB) menyatakan warga sudah sejahtera tanpa PSN maupun transmigrasi. Alih-alih setuju dipindahkan dari kampungnya, warga menuntut pemerintah memberi legalitas kampung tua di Rempang.

Tidak Ada Urgensi



Direktur Hukum Center of Economic and Law Studies (Celios), Mhd Zakiul Fikri, mengatakan, tidak ada urgensi pelaksanaan program transmigrasi lokal warga terdampak proyek Rempang Eco City.

Menurut Fikri, penggunaan istilah transmigrasi lokal juga tidak tepat. Sebab, narasi tersebut digunakan untuk memindahkan penduduk karena ada pembangunan dan investasi. Padahal, perpindahan penduduk dalam suatu wilayah karena lahannya terdampak pembangunan telah mempunyai istilah sendiri dalam peraturan perundang-undangan, yakni relokasi.

Aturannya terdapat dalam berbagai regulasi sektoral, seperti UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres Nomor 62 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tentang

Penangan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Kepentingan Nasional.

"Istilah transmigrasi lokal merupakan upaya mengelabui masyarakat," kata Fikri dikutip dari Tempo, Jumat, 4 April 2025.

Fikri juga mengatakan, transmigrasi—sebagaimana ketentuan asal 1 angka 2 UU Nomor 15 Tahun 1997 juncto UU Nomor 29 Tahun 2009—diartikan sebagai perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, ia mempertanyakan bagaimana pemerintah melihat kondisi warga Pulau Rempang yang akan menjadi subjek program ini.

"Apakah warga kampung tua di Rem-

pang saat ini hidup tidak sejahtera? Pemerintah seolah abai dengan perekonomian dan budaya yang sedang berlangsung di sana," kata Fikri.

Menurut Fikri, warga Pulau Rempang selama ini sejahtera dengan menggantungkan hidup pada laut dan kebun. Mereka pun turut menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Kota Batam. Warga Rempang tidak perlu direlokasi maupun menjadi transmigrasi, sekalipun pemerintah membawa latar belakang persoalan pemerataan pembangunan.

"Justru pemindahan paksa warga kampung tua Rempang berpotensi merusak ekosistem ekonomi yang selama ini telah berjalan," kata Fikri.

Ekonom sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, berpendapat, transmigrasi lokal warga Rempang tak ada bedanya dengan relokasi yang dipaksakan. Ia menyebutnya sebagai wajah kelam pembangunan. ●

REVOLUSI AKSES PUPUK DONGKRAK SEMANGAT PETANI

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efisiensi anggaran. Salah satunya ditempuh melalui pemanngkasan perizinan dan jalur distribusi, seperti telah diterapkan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pemanngkasan perizinan dan jalur distribusi itu sekaligus penting untuk mencegah korupsi.

Dalam acara panen raya nasional di 14 provinsi sentra produksi padi yang seremoninya digelar di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin, 7 April 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa semula jalur perizinan dan distribusi pupuk

bersubsidi bagi para petani berbelit-belit.

Butuh gebrakan untuk memangkas birokrasi yang rumit itu. Situasinya berubah sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

"Sebelumnya ada 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Inpres (Perpres No 6/2025) yang Bapak Presiden tanda tangani, dari Menteri Pertanian langsung ke pabrik, pabrik langsung ke Gapoktan petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian," kata Amran.

Sehubungan dengan laporan itu, Presiden menegaskan akan senantiasa mendorong efisiensi anggaran. Itu dilakukannya melalui pemotongan jalur distribusi yang panjang. Secara bersamaan, praktik korupsi juga berusaha ditekannya melalui mekanisme tersebut.

"Saya akan menghemat anggaran terus-menerus. Saya akan berusaha sekeras tenaga agar setiap anggaran, setiap uang rakyat, uang negara harus

dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang paling membutuhkan," kata Presiden.

Ihwal praktik korupsi, Presiden menentang keras. Lebih-lebih jika praktik-praktik itu malah menghambat layanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti pupuk bersubsidi. Pihaknya mendorong agar petani tidak takut melayangkan laporan penyelewengan jika menemukannya di lapangan.

"Sekarang masanya masa teknologi, semua orang bisa laporkan segera. Kalau ada korupsi langsung Anda video, Anda rekam, langsung kirim. Jadi supaya orang itu jera," kata Presiden.

Sewaktu mendatangi panen raya, Presiden juga berdialog dengan sejumlah petani yang dihadirkan secara daring. Dalam dialog itu, para petani bersyukur atas adanya kebijakan pemangkas jalur distribusi pupuk telah banyak membantu mereka.

Sementara itu, Amran menyampaikan, kebijakan pro-petani yang diterapkan Presiden mendorong keberhasilan



panen tahun ini. Berkat kebijakan itu, serapan beras oleh Bulog melonjak tajam. Alhasil, stok beras nasional mencapai 2,4 juta ton dan akan menembus 3 juta ton di akhir bulan. Angka itu menjadi yang tertinggi dalam 10-20 tahun terakhir.

"Ini betul-betul cerah bagi petani. Se-cerah kebijakan bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia," kata Amran.

Menurut Prabowo, petani memiliki peranan penting bagi bangsa ini. Keberadaan mereka menjamin berlangsungnya ketahanan pangan. Untuk itu, ia menyebut, petani sebagai tulang punggung bangsa dan negara.

"Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan tidak ada NKRI," tegas Prabowo.

Lebih dari itu, Prabowo ingin menjalankan pembangunan pertanian berpihak kepada rakyat. Bahkan, ia ingin menurunkan harga pangan secara nasional. Cita-cita itu ingin diwujudkan untuk membuat masyarakat bahagia. Lantas, segenap pejabat dimintanya ikut bekerja melayani rakyat sepenuh hati.

"Itu keinginan saya dan keinginan semua menteri, semua gubernur, semua bupati. Kita akan bahagia kalau rakyat itu senyum. Kita akan bahagia kalau para petani kita makmur," kata Prabowo.

Tingkatkan Produktivitas

Amran memastikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menambah alokasi pupuk bersubsidi dan mempercepat perbaikan irigasi telah mendorong semangat kerja petani.

Ia mengatakan alokasi pupuk bersubsidi pada 2025 meningkat dari 6,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Kebijakan ini dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas, seiring dengan perbaikan sistem irigasi yang di berbagai daerah.

"Kami kemarin sudah keliling di Majalengka ini, mendengar langsung dari petani, bahwa atas kebijakan Presiden yaitu penambahan pupuk dua kali lipat, dari 6,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton sudah disambut baik oleh petani," kata Amran.

Ia menjelaskan pemerintah juga telah

mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk memperbaiki saluran irigasi di seluruh Indonesia.

Selain itu, penyerapan gabah oleh Perum Bulog pada periode Januari hingga Maret 2025 tercatat meningkat signifikan, bahkan mencapai 2.000 persen dibandingkan rata-rata 5-10 tahun terakhir.

Mentan juga menyebutkan saat ini harga gabah sudah mencapai Rp6.500 per kilogram. Kenaikan ini sangat membahagiakan petani dan menjadi bukti nyata dari hasil kebijakan Presiden yang

Nino yang berkepanjangan.

"Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa produksi gabah nasional periode Januari hingga Maret 2025 telah mencapai 52 persen dari total target tahunan," tambahnya.

Sebelumnya, Amran menyatakan bahwa pihaknya menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada 2025 untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2027.

Prabowo pun menyampaikan apre-



pro terhadap petani.

"Ada 100 juta petani yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden. Mereka juga mengapresiasi kebijakan pupuk yang kini jauh lebih sederhana," tutur Mentan.

Amran mengatakan bahwa program pompanisasi juga terbukti berhasil meningkatkan produksi padi di Pulau Jawa hingga 2,8 juta ton, meskipun dihadapkan dengan tantangan krisis iklim El

nsiasi atas kerja keras jajaran kementerian dan pemerintah daerah, dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan nasional.

"Kita berhasil kendalikan harga pangan dalam waktu singkat. Ini bukti kerja keras semua pihak," kata Presiden.

Ia juga menyinggung keberhasilan Indonesia yang kini mampu mengeksport telur, di saat banyak negara justru mengalami kekurangan. ●

ANCAMAN PHK MASSAL PR BESAR KEMNAKER

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK masih menghantui sejumlah sektor industri di Tanah Air. Penyebabnya ketidakpastian ekonomi nasional. Makro ekonomi dalam negeri juga masih volatile alias tak stabil.

Kementerian Ketenagakerjaan pun dituntut melakukan terobosan agar mencegah terjadinya PHK massal. "Kondisi saat ini sangat volatile (tak stabil), ini tak main-main. Harapan publik kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa berbuat banyak atas berbagai tantangan yang ada sangatlah besar, itu PR (pekerjaan rumah) kita semua," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, saat acara Halalbihalal di Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Selain potensi PHK, Yassierli menyebut daya saing dan produktivitas industri juga masih rendah. Lalu, angka pengangguran yang masih besar, serta keserasian atau link and match antara sistem pendidikan dengan dunia kerja juga menjadi tantangan.

"Kita punya PR menghadirkan regulasi yang lebih berkeadilan, selain itu ada PR outlook (Kemnaker) ke depan, memperkuat riset, memiliki badan, penataan organisasi, reformasi birokrasi, data informasi, siap kerja dan seterusnya," paparnya.

Selama enam bulan di bawah pemerintahan Presiden

Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Yassierli optimistis, masih banyak yang dapat dilakukan untuk membangun sistem dan menata organisasi Kemnaker yang lebih baik lagi.

"Saya dan Wamen jelang 6 bulan mengabdikan, kami bersyukur dapat bekerja sama berkat dukungan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama, rasanya banyak sudah dilakukan bersama, tapi kita tak boleh puas," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan

melaporkan lebih dari 18 ribu tenaga kerja mengalami PHK sepanjang pada dua bulan pertama 2025. Jumlah tersebut tercatat dalam data resmi yang dirilis melalui portal resmi Satu Data Ketenagakerjaan.

Menyitir laporan Kemnaker, Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi pada periode Januari-Februari 2025, yaitu 10.677 orang atau sekitar 57,37 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan.

Hal ini sejalan dengan informasi PHK besar-besaran yang terjadi di perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sri-text). Perusahaan yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah, itu memutuskan hubungan kerja lebih dari 10 ribu pekerjanya akibat putusan pailit.

Sementara itu, pada periode Januari hingga Desember 2024, Kemnaker mencatat terdapat 77.965 tenaga kerja yang mengalami PHK. Tenaga kerja yang mengalami PHK paling banyak terdapat di Jakarta, yaitu sekitar 21,91 persen dari jumlah yang dilaporkan.

Sejumlah perusahaan juga dilaporkan terpaksa menutup operasionalnya dan melakukan PHK terhadap total 3.200 pekerjanya. Beberapa perusahaan itu antara lain PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi International Garut, dan PT Bapintri.



Tumbang Sejak 2022

Tutupnya pabrik-pabrik dan PHK massal di industri manufaktur Indonesia bukan baru terjadi pada awal 2025. Berdasarkan data yang dihimpun Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi), sepanjang 2022–2024 ada 60 industri yang berna-sib sama.

Direktur Eksekutif API, Danang Girin-drawardana, mengatakan, yang terlihat

pekerja yang mengklaim manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menca-pai lebih dari 40.000 orang dengan nilai Rp289 miliar. Jumlah ini naik 14 persen (23.545 orang) dibanding periode yang sama pada tahun 2023.

Badai PHK juga membuat klaim Ja-minan Hari Tua (JHT) pada periode Januari–September 2024 mencapai Rp35,6 triliun yang diberikan kepada lebih dari 2,3 juta pekerja. Dari total kasus klaim JHT itu, sebesar 29 persen atau 693.600 penerima merupakan pekerja

berbeda dengan yang dipublikasikan pada situs Satu Data Kemnaker yang mencatat ada 77.965 pekerja di-PHK pada 2024.

Febri membenarkan ada pula PHK di industri manufaktur yang dibina Kemen-perin. Namun, menurutnya, berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS), masih lebih banyak jumlah pembukaan lapangan kerja di indus-tri yang baru berproduksi pada 2024 dibanding dengan jumlah PHK.

Merujuk data SIINAS, industri manu-



di media biasanya hanya PHK perusa-haan yang memiliki jumlah karyawan di atas seribu orang. Padahal, ada sejumlah industri yang sudah jatuh dengan kar-yawan beberapa ratus orang. Contohn-ya, industri hulu tekstil semacam pro-dusen benang, serat, rayon, dan filamen.

“Jumlahnya masif sekali. Data tera-khir kami, 238.000 (orang di-PHK), itu akumulatif dari 2022 sampai awal 2025, termasuk PHK Sritex yang angkanya 11.000 (karyawan,” kata Danang awal Maret lalu.

Masifnya gelombang PHK—bahkan sebelum kasus Sritex—juga tercermin dari data BPJS Ketenagakerjaan. Sejak Januari hingga September 2024, jumlah

terdampak PHK. Sementara khusus un-tuk eks pekerja Sritex, dana JHT yang disiapkan mencapai Rp125 miliar.

Staf Khusus Menteri Perindustrian, Febri Hendri, menjelaskan, pihaknya tengah mengumpulkan dan memvali-dasi data terkait industri yang berhenti produksi. Yang ia bisa pastikan, ber-dasarkan data yang diberikan Kement-erian Ketenagakerjaan, pada 2024 ada 50.000 orang yang terkena PHK di sek-tor industri secara keseluruhan.

Data itu dihimpun oleh Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan, mencakup in-dustri manufaktur, konstruksi, pertanian, transportasi, pergudangan, dan lain-lain di seluruh sektor ekonomi. Data ini agak

faktur yang mulai beroperasi tahun 2024 berjumlah 14.000 perusahaan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang hanya 6.000-an. Dari 14.000 pe-rusahaan baru itu, ada satu juta tenaga kerja yang disebut bisa terserap.

Kemenperin tengah mengupayakan agar pekerja terdampak PHK dapat be-kerja di industri yang sama dan dekat lokasi pekerjaan sebelumnya. Febri menyebut institusinya bisa memfasilitasi jika pekerja perlu pelatihan skill di industri baru.

Kemenperin juga menyiapkan skema menghubungkan antara industri yang dalam proses membangun pabrik dengan pekerja yang kehilangan pe-kerjaan. ●

KEPALA DAERAH TAK ADA CUTI LIBURAN

Kasus Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang berlibur ke Jepang tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri mendapatkan sorotan publik. Ia terancam sanksi pemberhentian selama tiga bulan. Lantas, bagaimana aturan perjalanan luar negeri kepala daerah?

Perkara ini bermula ketika Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegur Lucky Hakim yang bepergian ke Jepang saat momen libur Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Padahal, kepala daerah pada saat momen libur Lebaran diwajibkan untuk tetap berada di wilayah, memantau situasi dan kondisi bila sewaktu-waktu terjadi kejadian mendadak.

Selain itu, kata Dedi, masih banyak persoalan di Jabar yang mesti diselesaikan dan perlu penanganan langsung

dari kepala daerahnya. "Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika lebaran, arus macet kemudian berbagai peristiwa sering terjadi situasi juga mungkin harus standby. Apalagi ke luar negeri tanpa izin," kata Dedi, 6 April 2025.

Lucky Hakim pun kini sudah dipanggil Kemendagri untuk memberikan klarifikasi atas perjalanannya ke luar negeri tanpa izin pada Selasa, 8 April 2025.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan, menjelaskan, pemeriksaan terhadap Lucky Hakim berlangsung mulai pukul 13.00-16.30 WIB. Sebanyak 43 pertanyaan diajukan kepada Lucky dan semuanya dijawab.

Husin menuturkan, yang bersangkutan memahami perjalanan kepala daerah ke luar negeri harus mengantongi izin Mendagri. Namun, Lucky berasumsi bahwa izin tersebut tidak berlaku pada masa libur atau cuti bersama.

"Jadi itu yang menjadi poin pemeriksaan dan saat ini kami dari Inspektorat masih melakukan pendalaman," ucap Husin.

Ia menambahkan proses pendalaman

pemeriksaan oleh Itjen bakal berlangsung paling lama 14 hari. Itjen Kemendagri akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan Lucky saat proses pemeriksaan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan kepada kepala daerah untuk memahami tugas dan fungsinya dalam sistem pemerintahan.

"Kepala daerah merupakan jabatan yang membutuhkan konsentrasi waktu secara penuh," kata Bima usai menerima kunjungan Lucky Hakim di Kantor Kemendagri.

Selain itu, tugas yang diemban kepala daerah juga bukan hal yang mudah. Dalam konteks polemik yang dialami Bupati Indramayu, Bima menyebut bahwa hal itu terjadi karena kurangnya pemahaman yang baik mengenai mekanisme dan aturan pemerintahan.

"Saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah-kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih me-



mahami lagi," ujarnya.

Dia membeberkan penjelasan tentang aturan pemerintahan daerah sebetulnya telah dengan rinci disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada salah satu sesi Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang beberapa waktu lalu.

Hal tersebut perlu didalami kembali oleh para kepala daerah, termasuk memahami kewenangan dan sanksi yang harus diterima apabila melanggar aturan.

Terkait hasil pemeriksaan atas polemik Bupati Indramayu, kata dia, saat ini Itjen Kemendagri terus melakukan pendalaman dan pengembangan. Hal itu termasuk substansi pemeriksaan yang akan didalami secara menyeluruh.

Kemendagri, jelas Bima, bakal terus mendorong kepala daerah untuk lebih memahami aturan pemerintahan. Bahkan, rencananya akan digelar Rapat Koordinasi (Rakor) khusus bagi daerah-daerah, yang memuat materi tentang aturan serta program yang telah disusun pemerintah pusat.

Dirinya berpesan kepada kepala daerah, khususnya Bupati Indramayu, untuk banyak belajar dari polemik yang terjadi saat ini.

"Bahwa konsekuensi menjadi kepala daerah tidak mudah dan itu harus dipelajari. Saya meminta beliau untuk mendalami lagi, mempelajari lagi semua regulasi terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari kepala daerah," jelas Bima.

Konsekuensi

Bima menjelaskan, tindakan Lucky Hakim melanggar Pasal 76 Ayat (1) Huruf I dan J Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Beleid itu menyatakan kepala dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri.

Pengecualian bisa diberikan kepada kepala daerah maupun wakilnya dari ketentuan jika dilakukan dengan alasan pengobatan yang mendesak.

Undang-undang itu juga mengatur tentang sanksi bagi kepala daerah yang bepergian tanpa mengajukan izin ke menteri. Dalam Pasal 77 ayat (2), kata Bima, bupati dan/atau wakil bupati, serta wali kota dan/atau wakilnya, yang melanggar larangan itu dapat dikenai sanksi

pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh menteri.

Sementara bagi gubernur dan/atau wakil gubernur, sanksi pemberhentian sementara itu akan dikenakan langsung oleh presiden. Bima juga berujar, dalam Pasal 77 ayat (3), presiden maupun menteri dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada kepala daerah yang melanggar.

Bima mengatakan, putusan sanksi yang diberikan kepada Bupati Indramayu terkait liburannya ke luar negeri yang tak mengantongi izin akan keluar dalam 14 hari ke depan usai pemeriksaan. Na-

tauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Herman Suparman, berpendapat, Lucky Hakim pantas mendapat hukuman berat hingga menimbulkan efek jera. Dia menekankan kasus tersebut menjadi pembelajaran.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bepergian ke luar negeri. Bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri adalah pelanggaran.

Lalu, Permendagri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke



mun, Bima tidak memungkirkan keputusan dapat diambil lebih cepat dari yang diperkirakan.

"Kalau teman-teman pelajar, enggak ada itu kepala daerah itu bisa mengajukan cuti untuk berlibur, enggak ada. Yang diatur adalah kepala daerah diizinkan kalau berobat, kalau beribadah, kalau sekolah, kalau liburan, itu bahkan enggak ada. Itu ada konsekuensi," ujar Bima.

Direktur Eksekutif Komite Peman-

Luar Negeri di Lingkungan Kemendagri dan Pemda ada alasan perjalanan dinas atau untuk kepentingan lain.

"Kalau kita lihat alasan penting sebetulnya tidak ada pengaturan soal liburan. Permendagri itu soal perjalanan dinas, melaksanakan ibadah, pengobatan, dan kepentingan keluarga. Apakah Bupati Indramayu itu kepentingan keluarga, kita tidak tahu," kata Herman, Selasa, 8 April 2025. ●



Pemerintah Siapkan 220.000 Rumah Subsidi

WARTAWAN DAPAT KUOTA 1.000 UNIT

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengubah standar kriteria masyarakat berpenghasilan rendah agar berhak menerima program rumah bersubsidi. Salah satu profesi yang akan menikmati program tersebut adalah wartawan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memutuskan mengubah standar kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Awalnya, kriteria MBR adalah pekerja lajang yang pendapatan maksimal bulannya sebesar Rp7 juta. Bagi pekerja yang sudah berkeluarga, pendapatan maksimal bulannya sebesar Rp8 juta.

Kini, standar itu diubah setelah bersepakat dengan Kepala Badan Pu-

sat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Pekerja lajang akan tergolong MBR jika berpenghasilan maksimal Rp12 juta per bulan. Status yang sama disematkan bagi pekerja yang sudah menikah atau berkeluarga dengan penghasilan gabungan bulanan maksimal Rp 13 juta.

Maruarar mengemukakan, keputusan ini untuk sementara berlaku bagi pekerja di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang atau Jabodetabek. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena inflasi yang terus meningkat sekaligus memperbaiki aturan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2023.

"Standar dari (penghitungan) ini, kan, menggunakan desil 8. Standar hidup tiap provinsi itu, kan, berbeda-beda. Kami sudah bantu Kementerian PKP untuk hitung standar desil 8. Hal ini hanya berlaku terkait perumahan," ujar Amalia di Jakarta, Selasa, 8 April 2025.

Ketika ditanya kapan Kepmen akan diterbitkan, Maruarar menargetkan dalam dua pekan aturan baru itu dapat dirilis. Setidaknya, Senin, 21 April 2025,

Kepmen telah tuntas dirumuskan.

Kementerian PKP berencana memberikan rumah bersubsidi bagi setidaknya 13 segmen. Kalangan tersebut telah disepakati akan menerima manfaat dengan alokasi 220.000 unit rumah pada 2025. Selain wartawan, beberapa kelompok yang disasar adalah guru, tenaga kesehatan, pekerja migran Indonesia, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum.

Apresiasi Wartawan

Maruarar menyebut dari 220.000 rumah subsidi yang disediakan, 1.000 unit rumah subsidi dialokasikan bagi wartawan.

Menurutnya, program ini hadir sebagai bentuk apresiasi terhadap wartawan yang menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pada tahap awal, penyerahan 100 unit kunci rumah dijadwalkan pada 6 Mei 2025.

"Profesi wartawan memiliki peran strategis dalam demokrasi dan penyampaian informasi yang kredibel. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa

mereka juga memiliki akses terhadap perumahan yang layak," ujarnya.

Adapun alokasi ini mencakup sektor kesehatan sebanyak 30.000 unit, petani 20.000 unit, buruh 20.000 unit, Polri 14.500 unit, TNI AD 5.000 unit, Mitra Pengemudi Ojek Online 2.000 unit, dan wartawan 1.000 unit.

Rumah subsidi bagi wartawan ini akan mengikuti skema yang telah diterapkan dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Dia mengatakan ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, pemohon merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan belum pernah memiliki rumah. Kedua, pendapatan tidak boleh melebihi batas maksimal Rp 8 juta per bulan untuk umum.

"Tapi khusus Jabodetabek kami naikan jadi Rp 13 juta untuk yang sudah menikah dan Rp 12 juta untuk yang single," ujarnya.

Adapun program KPR subsidi ini menawarkan suku bunga tetap 5 persen dengan uang muka (DP) hanya 1 persen. Namun, harga rumah dipastikan bervariasi per wilayah.

"Misalnya, maksimal Rp 156 juta di Sumatera dengan cicilan sekitar Rp950 ribu per bulan, sementara di Jabodetabek maksimal Rp185 juta dengan cicilan Rp1,1-1,2 juta untuk tenor 15 tahun," katanya.

Luas tanah minimum ditetapkan 60 meter persegi dan maksimum 200 meter persegi. Sedangkan luas bangunan minimal 21 meter persegi dan maksimal 36 meter persegi. Namun, Maruarar belum membeberkan lebih lanjut terkait lokasi dan persebaran wilayah dalam pengadaan rumah subsidi ini.

"Yang jelas, akan ada di berbagai bagian Indonesia, termasuk Jabodetabek," ujarnya.

Kendati mendapatkan program bantuan dalam akses hunian ini, Maruarar menjanjikan wartawan tetap memiliki hak untuk mengkritik pemerintah dan bersikap kritis.

"Tetap boleh (mengkritik), dong. tugas wartawan adalah untuk menyampaikan berita yang benar, bukan enak didengar," katanya.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan kolaborasi akan sangat membantu wartawan yang belum memiliki tempat tinggal sendiri dan

menjadi salah satu bentuk atensi besar pemerintah terhadap profesi yang menjadi pilar keempat demokrasi tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Digital mendukung dan mengapresiasi kolaborasi antara ekosistem sektor perumahan dan permukiman, yakni Kementerian PKP, BP Tapera, BTN, dan BPS yang berkomitmen menyediakan rumah bersubsidi bagi wartawan.

"Kami hari ini keluarga besar Kementerian Komunikasi dan Digital mengapresiasi program penyediaan rumah subsidi untuk wartawan. Karena profesi wartawan itu salah satu yang diperhatikan oleh Pak Menteri Perumahan dan bahkan salah satu yang paling pertama di Indonesia (dalam program ini)," ujar Meutya.

Meutya mengatakan, program rumah wartawan merupakan salah satu

dengan ekosistem perumahan dalam menyiapkan program serah terima kunci 100 rumah subsidi untuk wartawan yang akan digelar pada 6 Mei 2025 mendatang

"Tanggal 6 Mei (2025) ini juga baru diputuskan tadi. Itu insya Allah akan serah terima kunci dan artinya kami juga di Kemkomdigi juga akan punya pekerjaan. Harus bergegas begitu. Dan juga teman-teman wartawan juga bisa mulai saat ini juga mempelajari kriteria-kriteria ini," tuturnya.

Perbaiki Data

Persoalan mendasar mengenai perbaikan dan kelengkapan data perlu dilakukan guna mengeksekusi program rumah subsidi agar tepat sasaran. Skema pembiayaan perlu disesuaikan dengan kemampuan MBR, termasuk



program yang ditunggu-tunggu awak media yang telah mengawal program-program serupa untuk masyarakat dan profesi lain yang menjadi prioritas.

Dia juga mengapresiasi dukungan BPS dan BTN yang telah melonggarkan batas penghasilan penerima bantuan subsidi dari sebelumnya Rp8 juta menjadi Rp12 juta untuk wartawan yang sudah berkeluarga dan Rp11 juta dari sebelumnya Rp7 juta untuk wartawan yang belum berkeluarga di wilayah Jabodetabek.

Menurut Meutya, pihaknya dan Dewan Pers akan segera bergerak cepat menyiapkan dan menverifikasi kriteria wartawan yang berhak mendaftar program rumah subsidi ini dalam waktu sekitar seminggu.

Kemkomdigi juga akan berkolaborasi

mekanisme lain agar masyarakat tidak terdesak untuk berutang.

Menurut Ketua Umum The Housing Urban Development Institute, Zulfi Syarif Koto, skema pembiayaan perlu direncanakan matang, supaya tidak memberatkan para penerima manfaat. Alih-alih rumah tapak, program ini akan lebih baik jika berupa hunian vertikal, terutama di Jabodetabek.

"Program ini bagus, tetapi skema pembiayaan, skema kepemilikannya dikembangkan. Jangan hanya kredit. Jangan mereka (MBR) dipaksa berutang, dipaksa kredit," kata Zulfi.

Guna mengakomodasi program ini, pemerintah harus memiliki lembaga penjamin yang saat ini tengah dibentuk pemerintah, yakni Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). ●

PROYEK TANGGUL LAUT RAKSASA DIKOMANDOI BADAN OTORITA

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk badan otorita baru yang akan mengorkestrasi pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang pesisir pantai utara Jawa.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti, menjelaskan, nantinya badan otorita anyar itu akan berada langsung di bawah Kementerian Koordinator (Kemko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK).

"Tanggul laut raksasa itu sebenarnya Giant Sea Wall presiden sudah menu-

dikarenakan tidak hanya Kementerian PU, namun terdapat beberapa kementerian dan pemangku kepentingan yang nantinya harus bersama-sama untuk menyelesaikan Giant Sea Wall.

"Ini proyek yang besar, dari Tangerang, Banten sampai ke Gresik, Jawa Timur. Jadi harus ada badannya. Kemko IPK sedang merintis hal itu," ujar Diana.

Dalam kabar terbarunya, pembentukan GSW itu saat ini masih dalam tahap perumusan di lingkup Kemko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. "Jadi harus ada badan otoritanya. Nah, ini Kementerian Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan sedang melaksanakan," ujar Diana.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan, pembangu-

hulu hingga hilir. Kami akan memastikan semua pihak terkait mendiskusikan bersama desain, skema pembiayaan, dan kerja sama terbaik agar proyek ini bisa segera direalisasikan," kata AHY dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Maret 2025.

AHY mengatakan, pemerintah akan terus mematangkan konsep pembangunan tanggul laut raksasa untuk mengatasi berbagai persoalan jangka panjang, seperti banjir rob dan penurunan tanah (land subsidence).

Termasuk membahas perencanaan skema pendanaan inovatif yang kemungkinan melibatkan semua pihak, baik swasta dalam maupun luar negeri.

AHY juga sempat mengungkap potensi kerja sama dengan China untuk turut serta menggarap proyek Giant Sea Wall. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bilateral bersama Wakil Perdana Menteri China pada 26 Maret 2025.

"Pertemuan bilateral bersama Wakil Perdana Menteri RRT (China) merupakan mitra dagang penting, dengan nilai kerja sama hingga USD133 miliar pada 2023. Selain itu, kerja sama selama ini sejalan dengan Asta Cita Presiden serta akan mendorong terwujudnya Indonesia Emas 2045," ucap AHY dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Maret 2025.

AHY menjelaskan, kerja sama China untuk menggarap proyek Giant Sea Wall itu bukan tidak mungkin, lantaran Indonesia-China telah berhasil menjalin kerja sama salah satu pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang telah diresmikan pada 2023.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, berkomitmen akan melanjutkan pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Jawa. Tujuannya untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini, Kementerian PU sedang



gaskan kepada Menko Infrastruktur untuk membentuk semacam badan otorita," kata Diana, Selasa, 8 April 2025.

Diana menyebut, nantinya badan otorita pembangunan tanggul laut bakal bertugas menjembatani antarkeementerian yang bakal terlibat dalam pembangunan Giant Sea Wall. Hal ini

nan tanggul laut raksasa (GSW) tengah dalam tahap pendalaman desain.

AHY menegaskan, pembangunan tanggul laut merupakan langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari bencana lingkungan yang semakin kompleks.

"Penanggulangan banjir harus dilakukan secara terintegrasi mulai dari

melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) untuk tahap berikutnya, yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km.

Hal yang juga perlu dipertimbangkan adalah konsep yang akan digunakan, desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada 2020 atau menggunakan Masterplan 2016 dari Bappenas.

Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

Dody juga menjelaskan telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilignon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

Terlebih, tambah Dody, saat ini Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta tahap A sepanjang 12,66 Km. Hal itu diharapkan dapat menjadi bekal pemerintah nantinya mengeksekusi proyek GSW dari Banten hingga Gresik.

Dody juga menyebutkan pembangunan GSW perlu dibarengi dengan pembangunan sarana penyediaan air baku untuk mengurangi masyarakat menggunakan air tanah yang menyebabkan penurunan muka tanah terus berlanjut.

“Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari visi besar giant sea wall,” tegasnya.

Kombinasi Beton-Mangrove

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Lilik Retno

empat daerah utama, yakni Jakarta, Cirebon, Semarang, dan Demak. Sementara, Institut Teknologi Bandung (ITB) terlibat dalam pembuatan desainnya.

“Nah ini kami bekerja sama nantinya, ada beberapa yang sudah mengusulkan beberapa desain. Mungkin hari ini juga kita akan mendengarkan dari ITB, mau paparan mengenai bagaimana desain Giant Sea Wall tersebut,” katanya.



Cahyadiningsih, mengatakan, Giant Sea Wall tidak hanya berupa tanggul dari beton, melainkan juga tanaman mangrove. Sebab, beberapa tempat lebih cocok jika menggunakan mangrove sebagai tanggul laut raksasa.

“Memang di tempat-tempat tertentu non-struktural itu lebih pas, lebih cocok gitu.

Kalau semua ditembok ya malah nanti kayak membendung juga gitu ya,” ujarnya, Selasa, 8 April 2025.

Lilik menjelaskan, Giant Sea Wall akan dibangun di

Adapun, Giant Sea Wall masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) baru yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025.

Di dalam beleid tersebut, Prabowo menetapkan daftar indikasi PSN 2025-2029 dengan jumlah sebanyak 77 PSN. Jumlah itu meliputi 29 PSN baru dan 48 PSN carry over (lanjutan). Dari 29 PSN baru, salah satunya ialah Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang berlokasi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU, Dwi Purwantoro, pernah menyebutkan bahwa angka biayanya bisa mencapai Rp600 triliun. Bahkan, itu baru bangunannya saja dan belum ditambah dengan sanitasi, penyediaan air bersih, dan lainnya. Sehingga, apabila ditotal sekitar Rp800 triliun. ●

WARAS

Gunawan Effendi

Ada nuansa, perbedaan tipis, antara sehat dan waras. Ya, sehat lebih ke tampilan fisik, sedangkan waras jauh di dalam menyangkut jiwa: normal (selaras dengan norma yang seharusnya). Namun, sehat dan waras dapat terkait satu sama lain. Misalnya, apa yang dikemukakan oleh Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti.

Ia mengemukakan kecenderungan peningkatan jumlah penyandang gagal ginjal kronis di kalangan penduduk Indonesia berusia muda. Indikasinya, terjadi lonjakan pembiayaan yang ditanggung BPJS Kesehatan untuk penanga-

Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Jawa Barat, Maluku, DKI Jakarta, Bali, dan Yogyakarta.

O ya, gagal ginjal kronis adalah kondisi ketika organ tubuh itu mengalami kerusakan, baik secara struktural maupun fungsional, yang sudah terjadi lebih dari tiga bulan. Penyakit ini ditandai dengan kondisi yang progresif atau semakin lama semakin memburuk meskipun telah mengkonsumsi obat. Selain menyebabkan penumpukan cairan, elektrolit, dan limbah, penyakit ginjal kronis juga dapat memicu gangguan organ dalam lainnya di dalam tubuh manusia.

Umumnya, gejala penyakit ginjal kronis lebih dipahami



ARE YOUR KIDNEYS OK?
Detect early, protect kidney health



#WorldKidneyDay
#AreYourKidneysOK
worldkidneyday.org

World Kidney Day is a joint initiative of
ISN OKF-WKA
© World Kidney Day 2010 - 2023

nan pasien gagal ginjal kronis hingga mencapai sekitar Rp 11 triliun pada 2024.

Bukan hanya angka Rp 11 triliun itu sebenarnya yang menjadi masalah, melainkan juga lonjakan lebih dari 30 persen, hampir sepertiga dari pembiayaan gagal ginjal kronis pada 2023. Hitung punya hitung, angka pembiayaan gagal ginjal oleh BPJS pada 2023 sudah berada di angka Rp8,5 triliun. Belum lagi yang pembiayaannya di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Masih berdasarkan data BPJS Kesehatan, sepanjang 2024, tercatat 134.057 pasien gagal ginjal kronis menjalani prosedur hemodialisa atau cuci darah. Pada tahun sebelumnya, sepanjang 2023, data dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia (Pernefri) mencatat jumlah kumulatif pasien yang menjalani dialisis mencapai 60.526, dengan total prevalensi pasien sebanyak 127.900.

Sambil menunggu data lebih lengkap pada 2024, statistik Kementerian Kesehatan RI mencatat, 12 provinsi dengan jumlah kasus gagal ginjal kronis tertinggi pada 2023: Kalimantan Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi

ketika fungsi ginjal semakin memburuk. Jika memasuki tahap lanjut dan tidak segera ditangani, seperti dengan cuci darah, penyakit gagal ginjal kronis dapat berakibat fatal. Menurut Kemenkes RI, ada sejumlah faktor yang menyebabkan penyakit ginjal kronis, yakni diabetes tipe 2, hipertensi, radang ginjal, narkoba, konsumsi pereda nyeri. Faktor lain termasuk riwayat keluarga, kelahiran prematur dan trauma di daerah abdomen (perut).

Nah, pada titik inilah sehat dan waras dalam konteks gagal ginjal kronis akan terkait satu sama lain. Gagal ginjal kronis pada awalnya lebih dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan, minuman, termasuk merokok, dan obat-obatan. Apalagi narkotika dan obat-obatan terlarang.

Kewarasan dalam memilih jenis dan porsi zat yang kita konsumsi sehari-hari adalah faktor yang ikut menentukan apakah akan terhindar atau malah terpapar oleh gagal ginjal kronis. Apa yang kita telan di masa muda, akan berdampak lanjutan di kemudian hari, bukan sekadar soal ginjal. Syarat mutlak untuk memilah dan memilihnya tentu saja kewarasan. ●

ALHASIL PRABOWO BERTEMU MEGA

Presiden Prabowo sudah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Pertemuan yang sudah lama menjadi spekulasi. Bagaimana pertemuan bisa terjadi?



• INFO KHUSUS

Bukan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad --dua politisi Partai Gerakan Indonesia Raya yang dekat dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Juga bukan politisi lain yang meluluhkan hati Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri hingga berlangsung pertemuan pertamanya dengan Prabowo terhitung sejak Pilpres 2024. Juga bukan putri Mega sendiri, Ketua DPR Puan Maharani.

Dia adalah Didit, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo nama lengkapnya, putra semata wayang Prabowo Subianto dan Siti Hediati Hariyadi (Titek Soeharto). Banyak kalangan melihat kedatangan Didit ke Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, kediaman Mega, merupakan faktor utama yang mempercepat berlangsungnya pertemuan dua figur utama dalam pentas politik dalam negeri Indonesia.

Memang, ada yang menganggap Sufmi Dasco Ahmad yang lebih berperan dalam terjadinya pertemuan yang selama berbulan-bulan menjadi spekulasi politik itu. Misalnya kelompok relawan Arus Bawah Prabowo (ABP).

ABP mengapresiasi peran sentral Sufmi Dasco selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra mewujudkan pertemuan kedua tokoh bangsa itu. "Pak Dasco luar biasa. Beliau yang merancang pertemuan ini terwujud tepat waktu usai Lebaran," ungkap Ketua Umum ABP, Michael Umbas dalam keterangan resmi, Selasa, 8 April 2025.

Umbas memandang Dasco menjadi tokoh sentral yang membangun komunikasi baik dengan PDIP melalui Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kata Umbas, pada 2 April 2025 lalu, Dasco telah mengkonfirmasi rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati dalam halalbihalal di kediaman Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang dihadiri Puan.

"Ahmad Muzani, Ketua MPR dan Sekjen Gerindra pun memainkan peran signifikan dengan memanfaatkan posisinya untuk menjaga komunikasi





tingkat tinggi dengan elite PDIP,” kata Umbas. Momentum halalbihalal di rumahnya, kata Umbas, menjadi titik penting, saat kesepakatan percepatan pertemuan disepakati bersama Puan,” ungkapnya.

Toh Umbas pun tak menyangkal peran Didit Prabowo membuka silaturahmi dengan Megawati dengan kedatangannya bersama Muzani ke kediaman Mega pada Senin, 31 Maret 2025 bersilaturahmi halal bihalal sekaligus menyampaikan pesan Prabowo.

Puan Maharani sebagai Ketua DPR dan putri Megawati, sambung Umbas, menjadi jembatan utama yang menghubungkan semua pihak. Ia memastikan komunikasi antara Megawati dan

semua pihak untuk tujuan bersama membangun bangsa. Dia menyebut konsistensi Prabowo tidak sekadar retorika tapi diwujudkan.

“Falsafah pak Prabowo, one thousand friend are too few and one enemy is too many dengan konsisten dijalankan. Jiwa kenegawanan seperti ini diwujudkan dan tidak sekadar retorika,” kata Umbas.

Relawan Arus Bawah Prabowo optimistis pertemuan ini akan berlanjut dengan kerja sama lainnya untuk membangun bangsa. Kata Umbas, pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi bukti politik inklusif masih memiliki tempat di Indonesia. “Pak Prabowo dan Bu Mega punya sejarah



Prabowo, tambahnya, tersambung melalui Didit dan Dasco. “Mbak Puan bilang pertemuan harus segera usai Lebaran, dan itu terbukti,” sambungnya.

Umbas mengapresiasi pertemuan empat mata Prabowo dengan Megawati yang telah direncanakan sejak lama. Dia menyebut pertemuan ini memberi pesan sejuak terkait komitmen kepentingan bangsa. “Kami tentu sangat mengapresiasi pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega yang memang telah lama direncanakan. Ini bukti bahwa politik persatuan selalu akan menemukan jalannya. Pertemuan ini memberi pesan sejuak terkait komitmen mendahulukan kepentingan bangsa,” kata Umbas.

Tak hanya itu, Umbas memandang pertemuan tersebut wujud nyata sikap konsistensi Prabowo merangkul

panjang, jadi kami yakin ini langkah maju,” kata Umbas.

Toh Didit bukan hanya berkunjung ke kediaman Mega yang berimplikasi politik. Sebelumnya, Didit pun menunjukkan upaya harmonisasi politik dengan mengundang mengundang putra-putri Presiden RI pertama hingga ke-7 ke acara hari ulang tahunnya. Setelah itu Didit juga sowan, bersilaturahmi, kepada Mega, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo, figur-figur yang pernah menjadi Presiden RI.

Toh Didit berkunjung ke kediaman Mega dan Presiden ke-7 RI Jokowi pada momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah yang jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Usai mendampingi Prabowo saat open house di Istana Kepresidenan Jakarta, ia bergegas ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

• INFO KHUSUS

Tampak mengenakan peci hitam dan baju koko saat berkunjung ke rumah Presiden ke-5 RI itu. Kunjungan Didit ternyata membawa pesan penting ayahnya, Presiden Prabowo, kepada dua presiden terdahulu tersebut.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap hal tersebut. Dia awalnya menyebut kunjungan Didit ke beberapa tokoh di hari Lebaran merupakan hal yang biasa. Menurutnya, itu sekadar silaturahmi. "Jadi begini silaturahmi dalam hari raya Idul Fitri itu kan biasa," kata Dasco setelah menghadiri open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa, 2 April 2025.



Meski begitu Dasco mengakui memang ada pesan yang dibawa Didit untuk Megawati dan Jokowi. Namun, ia tidak mengungkap apa isi pesan tersebut. "Bahwa kemudian Mas Didit sudah ke Bu Mega, sudah ke Pak Jokowi, nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka hari raya Idul Fitri dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri," ujarnya.

Rupanya Didit pun mendapatkan pesan balik dari Megawati dalam silaturahmi. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengemukakan pesan Megawati untuk Prabowo yang disampaikan lewat

Didit.

"Ya ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo semoga sehat selalu, dan semoga setelah lebaran suasana akan semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara," ujar Puan Maharani.

Malah Puan langsung mengungkapkan rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Dia mengatakan pertemuan itu akan dilaksanakan dalam waktu secepatnya setelah Lebaran.

"Tidak ada open house, jadi Pak Prabowo pasti ada kesibukan dan Ibu Mega juga tidak ada open house. Jadi setelah Lebaran ini setelah libur Lebaran pasti ada pertemuan secepatnya," ujarnya.

Nah, di mata Direktur Eksekutif Lembaga Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai, langkah Didit merupakan bentuk replika politik Prabowo untuk merawat komunikasi dengan para presiden-presiden terdahulu. "Prabowo ingin menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya dekat dengan Jokowi, tetapi juga menjaga hubungan baik dengan Megawati dan SBY," ujarnya, Senin 7 April 2025.

Menurut Adi, silaturahmi berimplikasi politik melalui Didit merupakan hal positif bila dilihat dalam konteks persatuan dan konsolidasi politik pemerintahan Prabowo yang ingin merangkul semua pihak dan mengesampingkan perbedaan maupun intrik di masa lalu demi kepentingan

bangsa. Apalagi, wacana pertemuan Prabowo dan Megawati yang masih urung terlaksana padahal pertemuan itu dianggap akan sangat menentukan situasi politik pemerintahan ke depan.

Adi menilai kunjungan tersebut bukan hal biasa, melainkan bagian dari proses politik yang lebih besar. "Ketika Didit ke rumah Mega saat lebaran itu sinyal penguat bahwa pertemuan Prabowo dan Mega bakal terjadi. Buktiinya tadi malam keduanya bertemu," katanya.

Namun, lanjut Adi, kunjungan Prabowo ke rumah Megawati tidak lantas bisa disimpulkan kalau PDIP merapat ke pemerintah. Meski belum bergabung secara formal, Adi menilai posisi PDIP tetap krusial. Alasannya, PDIP merupakan pemenang Pemilu Legislatif 2024. Kemenangan tersebut membuat suara dan sikap politik PDIP tetap diperhitungkan, bahkan kerap berada di garda depan mendukung sejumlah kebijakan penting Prabowo.

"Jadi pengaruh terhadap kebijakan Prabowo tentu tak terdeteksi, karena PDIP masih outsider. Meski begitu posisi PDIP tetaplah penting karena pemenang pileg 2024. Bahkan dalam banyak hal, PDIP paling depan mengawal kebijakan politik Prabowo. Misalnya kenaikan PPN 12 persen, makan bergizi gratis, revisi UU TNI jadi UU, PDIP mendukung total," katanya.

Sedangkan pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensat) mengapresiasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Namun, ia menambahkan, pertemuan itu bukan berarti hubungan antara Megawati dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut mencair. "Ini dua hal yang berbeda," kata Hensat lewat kanal YouTube miliknya, Kamis 10 April 2025.

Selain membahas persoalan kebangsaan, sambung Hensat, pertemuan Prabowo dan Megawati diyakini juga menyentuh ranah hubungan personal antara Megawati dan Jokowi yang sempat merenggang dalam beberapa waktu terakhir. Hensat menyebut mungkin Megawati menyampaikan langsung kepada Prabowo bahwa urusan pribadinya dengan Jokowi biarlah menjadi urusannya sendiri.

Sedangkan urusan politik seperti

jumlah menteri dari PDIP, jabatan strategis, hingga posisi elite lainnya, menjadi bagian dari negosiasi yang masih berjalan. "Tapi yang jelas dealnya ini agak lama, mesti dipikirkan dan mungkin salah satunya adalah bagaimana hubungan antara Pak Prabowo, Ibu Mega dan Pak Jokowi," ungkap Hensat.

Di tengah kondisi sulit hari ini, Hensat menegaskan kesolidan di antara para elite politik menjadi sangat penting. Namun, ia juga mengingatkan bahwa sejarah menunjukkan, kesepakatan elite tidak selalu sejalan dengan keinginan akar rumput. "Di cerita sejarah

dinand (Bongbong) Marcos Jr, Pae-tongtam Shinawatra, bahkan Lee Hsien Loong, yang memiliki peran masing-masing di pentas politik masing-masing negara karena hubungan kekeluargaan antara anak dan ayah. Apakah ini juga cermin budaya politik Asia Tenggara bahkan Asia?

Dalam pandangan yang lebih netral, secara tidak langsung, pendiri Lembaga Survei Indonesia, Denny Januar Ali, menyebutnya sebagai sentuhan manusiawi, membandingkannya dengan politik di Jepang. "Kekuasaan terasa hadir tidak hanya melalui kebijakannya yang bermanfaat dan tegas, tapi juga

Tradisi ini, sambungnya, penting untuk juga dilakoni oleh pemimpin di Indonesia, tak hanya eksekutif, tapi juga legislatif, tak hanya di pusat, tapi juga di daerah. Mencontoh Jepang, Denny menjelaskan, kekuasaan tidak hanya dibangun lewat strategi rasional atau kekuatan partai. Ia juga bertumbuh dari sesuatu yang lebih lembut: perhatian personal.

Tradisi ini, lanjutnya, mengakar dalam budaya Jepang yang menjunjung keharmonisan (wa), rasa hormat (sonkei), dan kewajiban timbal balik (giri). Namun Denny menegaskan sentuhan manusiawi ini perlu mendapat



revolusi yang dilakukan atau dipimpin oleh rakyat, biasanya elite setuju tapi akar rumput nggak setuju," tandasnya.

Ada pula yang melihat peran Didit sebagai cermin budaya politik Jawa yang melibatkan anggota keluarga dalam menjaga harmoni politik secara keseluruhan. Namun, jika melihat lingkup Asia Tenggara (ASEAN) saja, pandangan seperti itu terbantahkan dengan membandingkan putra-putri atau kerabat dekat elite politik di Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Singapura.

Sebut saja nama Marina Mahathir, Nurul Izzah Anwar, Sara Duterte, Fer-

melalui sentuhan manusiawi yang lembut," ungkap Denny JA dalam esainya mengutip seorang Profesor politik Jepang yang pernah menjadi dosennya.

Dalam esai yang muncul di berbagai platform media sosial itu, Denny mengemukakan, di negeri sakura, para politisi rajin mengirimkan kartu ulang tahun, kartu duka cita, bahkan ucapan selamat hari raya kepada para konstituennya. Tradisi ini bukan sekadar formalitas. Ini bagian dari jalinan relasi personal yang memperkuat kepercayaan antara pemimpin dan rakyat.

catatan kritis.

"Politik sentuhan manusiawi, yang menyapa rakyat secara personal, hanya meaningful (bermakna), jika ia berada dalam pemerintahan yang memberikan efek program yang nyata," ungkapnya.

Jika perhatian itu tak berpijak pada kebijakan yang adil dan keberpihakan nyata, kata dia, ia akan jadi sapaan kosong yang mudah terlupa.

Jadi? Ya, politik dalam negeri Indonesia masih akan berdinamika. Tentu saja termasuk mengamati peran Didit selanjutnya. ●



SOAL SEGITIGA PRABOWO-JOKOWI-MEGA

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapat tanggapan positif dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Bagaimana hubungan segitiga tokoh bangsa ini usai silaturahmi Idul Fitri 2025?

Banyak reaksi positif menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Meski begitu, tetap muncul pula pertanyaan mengenai hubungan keduanya dengan Presiden ke-7 Jokowi.

Jokowi sendiri sudah menegaskan, pertemuan silaturahmi Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin, 7 April 2025 malam, di Jakarta, sangat baik. "Pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, untuk kebaikan negara. Kalau bisa berkumpul akan jauh lebih baik dibandingkan tidak berkumpul," kata Jokowi di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 8 April 2024 sebagaimana dikutip Kantor Berita Nasional Antara.

Dia mengatakan silaturahmi antartokoh bangsa sangat baik untuk kedamaian Indonesia. "Ini masih dalam suasana Lebaran, silaturahmi antarpemimpin, antartokoh dengan baik," ujar Jokowi yang kala itu tengah menerima kunjungan silaturahmi Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Sedangkan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengemukakan Indonesia membutuhkan suasana yang harmonis, kondusif, sehingga pertemuan tokoh bangsa penting dilakukan. "Kami semua menghargai, termasuk apa yang telah dilakukan Pak Prabowo, Ibu Mega. Pak Prabowo tidak hanya ke Bu Mega, tapi juga ke Pak Jokowi, Pak SBY, semua diperlakukan sama," kata Bahlil.

Ia berharap keadaan bangsa Indonesia makin baik. "Kita harus kompak membangun negara," kata Bahlil.

Semula sudah ada rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati sebelum pelantikan Presiden RI, Minggu, 20 Oktober 2024. Menanggapi rencana itu, Jokowi juga menanggapi

rencana pertemuan antara Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai komunikasi yang baik antara tokoh bangsa yang bertujuan untuk kemajuan negara dan bangsa.

"Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antartokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa," kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di sela peninjauan RSUD Kefamenu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu, 2 Oktober 2024.

Dalam kesempatan sebelumnya usai pelantikan anggota DPR periode



2024-2029, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tinggal menghitung hari. "Insyaallah sebagaimana saya sampaikan tadi pagi, menghitung hari pertemuan Bapak Prabowo dengan Ibu Mega," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024

la tidak menutup kemungkinan pertemuan antara Megawati dengan Prabowo akan digelar dalam pekan ini. "Insyaallah," ujarnya singkat.

Di acara yang sama, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berharap rencana pertemuan dirinya dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dapat terlaksana sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. "Mudah-mudahan sebelum pelantikan," tambah Prabowo.

Prabowo pun mengamini agar rencana pertemuannya dengan Megawati itu bisa terwujud. "Insyaallah, insyaallah," ucapnya.

Toh rencana pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden tak pernah terwujud.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui rencana pertemuan mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebelum pelantikan batal diselenggarakan.

"Sepertinya begitu (batal, red.). Sampai dengan saat acara pelantikan, pertemuan itu masih tertunda," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Menurut Muzani, pertemuan tersebut belum bisa terselenggara karena kondisi Megawati yang kurang sehat. "Kami berdoa mudah-mudahan Ibu segera pulih kesehatannya, dan bisa segera menjalankan aktivitasnya dengan baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa akan ada waktunya pertemuan dengan Megawati dapat terwujud. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa Prabowo yang akan mengatur pertemuan tersebut.

Alhasil, baru pada April 2025 akhirnya Prabowo-Mega bertemu tatap muka. Pertemuan antara Prabowo dan Megawati mulai diketahui publik antara lain melalui unggahan foto pertemuan kedua tokoh nasional itu oleh akun Instagram Dasco, @sufmi_dasco, pada Senin malam, 7 April 2025 pukul 20.19 WIB. "7-4-2025, Alhamdulillah.. Merajut Kebersa-

maan Untuk Indonesia Kita," tulis Dasco dalam unggahan Instagram-nya.

Dalam foto tersebut, terlihat Megawati dan Prabowo duduk di sofa. Megawati mengenakan kemeja hitam bercorak bunga mawar merah muda. Sedangkan Prabowo mengenakan kemeja safari warna gading.

Selanjutnya, Dasco mengkonfirmasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Megawati. Menurut dia, pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka silaturahmi setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

la menambahkan, kedua tokoh bangsa itu bersahabat dan berhubungan baik selama ini. "Pertemuan semalam itu pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas kedua tokoh ini," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa malam, 8 April 2025.

Dasco juga menjelaskan, pertemuan itu berlangsung sekitar 1,5 jam, dimulai dari sekitar pukul 20.30 WIB. la mengungkapkan, selain dirinya, sejumlah tokoh turut hadir ke kediaman Megawati. Antara lain, Ketua MPR RI yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy

• INFO KHUSUS

Indra Wijaya, hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Menurut dia, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra dan Ketua Umum PDI Perjuangan itu berlangsung empat mata, meski terdengar keduanya berbincang sambil diiringi tawa. "Pertemuan silaturahmi itu kan nggak ada masalah, mau di tempatnya Bu Mega, mau di mana. Kan itu pertemuan sahabat boleh saja," kata Wakil Ketua DPR RI itu.

Toh Dasco mengisyaratkan tak ada komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dan presiden ke-7, Joko Widodo, sebelum pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri. Alasannya, pertemuan Prabowo dan Megawati itu merupakan bentuk silaturahmi di momen Idul Fitri.

Sedangkan Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Presiden Ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri akan mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari luar koalisi. "Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif, untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 9 April 2025.

Muzani mengatakan Megawati juga menyampaikan harapan agar pemerinta-

adanya kesepakatan politik yang signifikan. "Deal. Pasti deal. Dealnya apa? Kita nggak usah tahu kok, nggak usah kita pikirkan, tapi yang jelas ini bagus buat pemerintahan," kata Hensa dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 10 April 2025.

Dia menengarai salah satu hasil dari pertemuan tersebut ialah kemungkinan masuknya kader PDI Perjuangan ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo, serta kehadiran Prabowo dalam Kongres PDI Perjuangan mendatang. "Sangat mungkin kader PDI Perjuangan akan masuk ke kabinetnya Prabowo, dan Prabowo mungkin saja akan hadir di acara Kongres PDI Perjuangan," ucapnya.

Hensat juga menangkap sinyal sua-



"Saya rasa enggak ya. Ini kan pertemuan silaturahmi, boleh dengan siapa saja," kata Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam, 8 April 2025.

Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menegaskan selama ini tak ada masalah dalam hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri. "Antara Pak Prabowo dan Bu Megawati memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban, dan hangat," ungkap Dasco.

han Presiden Prabowo senantiasa terus mengedepankan kepentingan rakyat. "Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu. Jadi pada prinsipnya ibu Megawati juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Toh dalam pandangan analisis komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio (Hensat) pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjukkan

sana pertemuan Prabowo-Megawati yang digagas dalam situasi yang menurut dia tampak "mendesak", urgent. Hensat menambahkan, urgensi tersebut menunjukkan adanya opsi politik yang sedang dikembangkan, yang baru terungkap setelah foto pertemuan keduanya dirilis ke publik.

"Dilakukan malam hari, seperti tak bisa menunggu pagi, tapi setiap silaturahmi adalah baik," ujarnya.

Dia menyoroti pula proses di balik kesepakatan pertemuan tersebut, yang dinilainya memerlukan waktu untuk dimatangkan. Pada poin ini Hensat

menduga salah satu isu krusial terkait hal tersebut ialah dinamika hubungan antara Megawati dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

"Kelihatannya deal-nya agak lama dipikirkan, terutama soal hubungan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Mungkin Ibu Mega bilang, 'Pak Prabowo, urusan saya dengan Pak Jokowi itu urusan saya, dan Pak Prabowo setuju. Soal berapa menteri PDIP yang masuk kabinet atau jabatan lain, kita lihat nanti,'" katanya.

Meski pertemuan kedua tokoh tersebut terkesan positif bagi pemerintahan ke depan, dia mengingatkan bahwa pertemuan tersebut juga dapat menjadi tantangan bagi demokrasi. Dia menyebut hal itu terkait pentingnya fungsi DPR RI sebagai penampung aspirasi rakyat

Prabowo, Mega, dan semoga selamat juga buat Pak Jokowi, dan tentu saja selamat buat Dasco yang berhasil menginisiasi pertemuan ini. Apakah baik? Menurut saya baik. Apakah perlu dikritisi? Tetap harus dikritisi," ujarnya.

Salah satu yang mengemukakan pandangan kritis itu adalah pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta M, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Ia menilai pertemuan antara presiden dan mantan presiden umum terjadi, terlebih keduanya pernah bersama pada pemilu 2009 dan merupakan tokoh sentral dari dua partai nasionalis besar, yang mana pertemuannya telah lama digadang-gadang akan terjadi.

Namun, sambung Alfath, meski bukan hal baru dalam praktik politik nasional,

utama, pertemuan ini sangat mungkin menjadi sarana melakukan konsolidasi atau negosiasi kepentingan pasca pemilu. Selain itu, adanya potensi positif yang bisa muncul dari pertemuan dua tokoh besar ini dalam konteks stabilitas politik nasional yang tentu saja memunculkan harapan untuk memperlancar transisi pemerintahan. "Harapan kita justru memperlancar transisi kekuasaan yang dirasa tak cukup mulus sekaligus mengupayakan terwujudnya kohesi nasional," tuturnya.

Meski demikian, Alfath menyebutkan terdapat tantangan atau kekhawatiran tertentu dari publik terkait pertemuan ini yang dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan elite partai lainnya. Sebab pertemuan elit secara tertutup seringkali



di tengah situasi elit politik yang tampak semakin solid.

"Buat demokrasi, ini challenge bagus. Masyarakat sipil harus benar-benar mengandalkan DPR untuk mengkritisi pemerintah," tuturnya.

Terakhir, dia pun memprediksi adanya pertemuan lanjutan, termasuk keterlibatan Jokowi dalam dinamika tersebut. "Saya yakin Pak Jokowi sudah tahu. Buktinya, dia mengomentari bahwa ini bagus," ucap dia.

Meski begitu Hensat menilai pertemuan Prabowo dan Megawati tetap perlu dikritisi, "Sekali lagi, selamat buat

format tertutupnya tetap memancing perhatian publik karena menyiratkan adanya pembahasan strategis yang tidak dikomunikasikan secara terbuka. "Keduanya memperlihatkan bahwa komunikasi informal elit politik seringkali terjadi dalam ruang-ruang yang sulit diakses oleh publik," kata Alfath menanggapi pertemuan tersebut, Kamis, 10 April 2025.

Alfath menuturkan sulit menilai pertemuan antara kedua elit pantai ini lebih bernuansa politik kekuasaan atau benar-benar dilandasi kepentingan bangsa. Mengingat keduanya adalah figur

memunculkan pertanyaan dan spekulasi publik.

"Ini hal yang saya kira wajar saat publik berharap agar pemerintah hari ini harus tetap ada yang mengontrol. Bukan masuk seluruhnya ke dalam koalisi besar. Tantangan yang harus diantisipasi oleh masyarakat dan pengamat politik dari pertemuan tertutup seperti ini, jelas memunculkan berbagai spekulasi. Sebab, dalam pertemuan 1,5 jam tersebut ada sesi empat mata antara Prabowo dan Megawati, yang disinyalir membahas negosiasi kepentingan pasca pemilu," tandasnya. • Editor: GE



MENGANTISIPASI KOALISI BESAR

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri segera berlanjut dengan implikasinya terhadap dinamika politik dalam negeri. Tetap banyak kemungkinan bisa terjadi.

Sementara banyak tanda tanya belum terjawab usai pertemuannya dengan Megawati, Presiden Prabowo Subianto sudah terbang mengunjungi kawasan Timur Tengah dan Turki. Presiden Prabowo beserta rombongan terbatas lepas landas menuju Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Rabu dini hari, 9 April 2025 sekitar pukul 01.05 WIB, meninggalkan Indonesia dan dinamika politiknya usai pertemuan di kediaman Megawati pada malam sebelumnya, Senin, 7 April 2025

Abu Dhabi, PEA, menjadi tujuan pertama dari rangkaian kunjungan Kepala Negara ke lima negara, yakni PEA, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Dalam keterangannya sebelum keberangkatan, Presiden menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral serta melakukan konsultasi strategis dengan para pemimpin negara sahabat terkait isu-isu geopolitik, geoekonomi, dan sektor kerja sama lain-

nya.

"Yang pertama, saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Yang Mulia Muhammad bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi, untuk tukar menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang," ungkap Presiden.

Dari Abu Dhabi, Presiden Prabowo kemudian akan melanjutkan lawatan ke Turki untuk melakukan kunjungan kenegaraan balasan sekaligus menghadiri Antalya Diplomacy Forum sebagai pembicara dalam sesi Leader's Talk. "Di situ, Antalya, saya juga akan melaksanakan konsultasi dengan beliau (Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan) tentang beberapa hal, juga menyangkut geopolitik dan geoekonomi, juga kerja sama industri dan perdagangan, dan pendidikan serta kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki," tuturnya.

Selanjutnya, Presiden akan men-

gunjungi Mesir untuk bertemu dengan Presiden Mesir, Abdul Fattah El-Sisi, lalu bertolak ke Qatar guna memperkuat hubungan bilateral dan menandatangani sejumlah kesepakatan strategis dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani. Lawatan luar negeri ini akan ditutup dengan kunjungan kenegaraan ke Yordania untuk berkonsultasi dengan Raja Abdullah II. "Dari situ (Qatar), saya ke Jordan, kunjungan kenegaraan dan sekali lagi konsultasi dengan Raja Abdullah II," ujarnya.

Selain bertujuan memperkuat hubungan bilateral, Presiden menegaskan bahwa kunjungan ini juga sebagai respons terhadap meningkatnya harapan komunitas internasional atas peran aktif Indonesia dalam penyelesaian konflik di Gaza dan Timur Tengah. "Saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung, mencari penyelesaian konflik di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluru-

han,” ungkapnya.

Meskipun secara geografis berada jauh dari pusat konflik, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ditambah dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia dipandang sebagai pihak yang netral dan dipercaya oleh berbagai kalangan di komunitas internasional.

“Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan kami siap, berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia,” tandasnya.

Sepeninggal Presiden yang melawat ke luar negeri usai bertemu Megawati, boleh jadi implikasi pertemuan itu akan lebih jelas. Jadi, masih memerlukan waktu setidaknya hingga Presiden kembali ke Tanah Air.

Toh pengamat politik yang juga dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta M, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia menyebutkan, terdapat tantangan atau kekhawatiran tertentu dari publik terkait pertemuan Prabowo dengan Megawati yang dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan elite partai lainnya. Menurut dia, pertemuan elite secara tertutup seringkali memunculkan pertanyaan dan spekulasi publik.

“Ini hal yang saya kira wajar di mana publik berharap agar pemerintah hari ini harus tetap ada yang mengontrol. Bukan masuk seluruhnya ke dalam koalisi besar. Tantangan yang harus diantisipasi oleh masyarakat dan pengamat politik dari pertemuan tertutup seperti ini, jelas memunculkan berbagai spekulasi. Sebab, dalam pertemuan 1,5 jam tersebut ada sesi empat mata antara Prabowo dan Megawati, yang disinyalir membahas negosiasi kepentingan pasca pemilu,” ujarnya, Kamis, 10 April 2025.

Ia mengemukakan sulit membayangkan para elite politik membahas hal substantif kepada publik secara gamblang, terlebih karena ini pertemuan informal. Adapun yang disampaikan hanya sebagian kecil saja. Padahal penting rakyat untuk terus memonitor dinamika kekuasaan dan tak terpaku pada hanya satu

peristiwa ini saja.

Alfath berharap agar pertemuan yang terjadi antar elit lebih berfokus pada upaya mensejahterakan rakyat, terlebih di tengah situasi ekonomi yang rumit. “Saya kira ini bukan semata ajang rekonsiliasi politik, tetapi juga harus bisa menjadi sarana mengontrol jalannya kekuasaan,” ujarnya.

Soal koalisi besar itu sebenarnya sudah mengemuka sejak munculnya rencana pertemuan Prabowo-Megawati sebelum pelantikan Presiden, Minggu, 20 Oktober 2024. Namun, pertemuan itu baru berlangsung hampir enam bulan setelah pelantikan Prabowo sebagai Presiden.

Sedangkan usai pertemuan Prabowo-Megawati pada Senin, 7 April 2024, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan belum

bisa memastikan apakah PDI Perjuangan akan bergabung dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Saya enggak tahu karena itu pertemuannya lebih banyak empat mata ya,” ujar Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta.

Dasco mengakui ia tidak mengetahui secara rinci isi pembicaraan antara kedua tokoh nasional tersebut. Namun, ia meyakini pertemuan tersebut membahas hal-hal strategis untuk kemajuan bangsa. “Kalau menyatukan visi saya enggak tahu persis, tetapi bertukar pikiran yang mendalam tentang bagaimana masa depan Indonesia, itu pasti,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR itu juga menegaskan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan pasca-Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Menurutnya, hubungan



• INFO KHUSUS

pribadi antara Prabowo dan Megawati selama ini berjalan sangat baik dan penuh keakraban. "Pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, keakraban dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lama dan banyak dibahas oleh kedua tokoh ini," jelas Dasco.

Sedangkan Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan respons Presiden Prabowo Subianto saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungan meski berada di luar pemerintahan. Prabowo, kata Muzani, bersyukur atas dukungan dari Megawati. "Bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta

men yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," kata Muzani.

Megawati, kata Muzani, juga berharap pemerintahan Prabowo berjalan efektif. Serta bekerja dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa. "Ya kira-kira seperti itu, pokoknya begitu (tetap di luar). Jadi, pada prinsipnya, Ibu Mega tetap berharap, agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepresidenan Pak Prabowo bisa efektif sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa," ungkapnya.

Muzani mengemukakan pula, pertemuan Prabowo dan Megawati menjadi upaya memperkuat persatuan. Ia menilai sikap kedua tokoh bangsa ini patut ditiru.

publik Indonesia. Apakah Pak Prabowo juga mesra dengan Bu Megawati, mesra dengan (Presiden ke-6) Pak SBY, juga pada saat yang bersamaan dengan (Presiden ke-7) Pak Jokowi, saya kira itu adalah hak prerogatif presiden," kata Adi lewat kanal YouTube, Rabu 9 April 2025.

Adi melanjutkan, Prabowo bukan lagi seorang Menteri Pertahanan. Sehingga, ia punya kapasitas dan legitimasi penuh sebagai kepala negara. "Oleh karena itu, jangan ada pihak yang merasa galau ataupun tidak merasa happy kalau Prabowo bertemu Megawati," sambung Direktur Parameter Politik Indonesia itu.

Adi justru melihat pertemuan Prabowo-Megawati memperlihatkan kematangan politik dan tekad untuk merangkul semua kekuatan bangsa, termasuk mereka yang pernah menjadi



Pusat, Rabu, 9 April 2025

Menurut Muzani, tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan. Ia mengemukakan, pada momen itu, Megawati menyampaikan akan memperkuat pemerintahan, tetapi tetap di luar koalisi. "Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI sebagai instru-

"Apalagi kita menghadapi masa-masa depan yang juga tidak gampang, terutama di bidang perekonomian, maka para pemimpin harus bergandengan tangan, bersilaturahmi, dan itu adalah contoh yang baik yang dilakukan oleh bangsa," ujarnya.

Sedangkan pengamat politik yang juga Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai pertemuan itu sudah sesuai dengan kapasitas dan legitimasi Prabowo sebagai Presiden. "Hari ini Prabowo Subianto adalah presiden Re-

rival politik.

Hal ini menjadi penanda bahwa Prabowo telah bertransformasi menjadi pemimpin yang mampu menjembatani kepentingan nasional sekaligus menegaskan Presiden ke-8 RI itu sudah terlepas dari bayang-bayang Jokowi.

"Sangat kelihatan sekali Prabowo sudah menjadi presiden yang sesungguhnya, yang mampu berkomunikasi dengan pihak manapun sekalipun pihak itu adalah orang-orang yang selama ini berseberangan," tandasnya. • Editor: GE

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



**INFO
PASANG
IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312**

IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

● TELP 021-791 96781 ● FAX 021-791 96786



MARUARAR SIRAIT KASIH 1.000 RUMAH BUAT WARTAWAN